



**KADERISASI HMI DALAM MENGISI
STRUKTUR KEKUASAAN DI INDONESIA**

Oleh

Sidratahta

**yang diserahkan sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Politik**

**Universitas Nasional
Program pasca sarjana
Program studi ilmu politik**

2004



**KADERISASI HMI DALAM MENGISI
STRUKTUR KEKUASAAN DI INDONESIA**

Oleh
Sidratahta

**Tesis yang diserahkan sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Politik**

**Universitas Nasional
Program pasca sarjana
Program studi ilmu politik**

2004

Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan karya saya sendiri.

Di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.

Selain itu, saya juga menyatakan bahwa di dalam tulisan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dan disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.

Jakarta, 25 September 2004

Yang Menyatakan,



Sidratahta

**KADERISASI HMI DALAM MENGISI STRUKTUR
KEKUASAAN DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Sidratahta

Telah dipertahankan dalam sidang ujian Tesis

Pada tanggal : 25 September 2004

Pembimbing,

 ✓
(Dr. Muhamad Hisyam)

Universitas Nasional
Program Pasca Sarjana
Program Studi Ilmu Politik




(Dr. Mohammad Noer)
Ketua Program



KATA PENGANTAR

Sebagai insan yang beriman, penulis patut mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang tiada henti-hentiNya memberikan nikmat menuntut ilmu, sebagai bekal dalam melaksanakan misi kemanusiaan dan kepemimpinan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia.

Ketika penulis memutuskan untuk melanjutkan studi master pada Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta di penghujung tahun 2001, saya telah berketetapan untuk mempelajari ilmu politik itu dengan sebaik-baiknya. Meskipun UNAS adalah bukan kampus negeri seperti UI yang memiliki sumber daya akademisi yang memadai, tetapi kampus ini memiliki andil besar dalam perkembangan ilmu politik dan perjuangan politik bangsa Indonesia. Beberapa alumni FISIP UNAS terkemuka seperti Dr. Deliar Noer dan Dr. Alfian telah teruji memiliki kapasitas dan integritas keilmuan sesuai cita-cita para pendirinya, Prof. Dr. MR. Sutan Takdir Alisyahbana. Demikian juga generasi pelanjut mereka yang lebih muda antara lain Drs. Syamsuddin Haris, M.Si, Dr. Mohammad Noer, Dr. Syarif Hidayat, Drs. Ramlan Siregar, M.Si dan Drs. TB Massa Djafar, M.Si telah pula mewarnai pola pemikiran penulis dalam proses transformasi keilmuan dan diskusi-diskusi kasus politik Indonesia selama reformasi.

Studi tentang HMI dan Kekuasaan telah menjadi obsesi penulis sejak lama, setidak-tidaknya ketika menjadi Ketua Umum HMI Cabang Malang periode 2000-2001, di mana secara umum kader-kader HMI generasi kami selalu mengkritisi persoalan dominasi orientasi kekuasaan di kalangan HMI. Karena itu saya mengucapkan

penghargaan kepada teman-temanku saat itu; Isra Ramly, Syaifullah, Hendry, Khatiburrasyadi, Afin Khusani, Bisman dan lainnya.

Semula tesis ini mengambil topik tentang pemikiran politik HMI. Namun pembimbing tesis Dr. Mohamad Hisyam menyarankan untuk masalah penting di HMI yaitu HMI sebagai kader politik dengan alasan, banyak alumni HMI menduduki jabatan puncak di birokrasi dan legislatif di negeri ini.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing Dr. Mohamad Hisyam yang dengan sabar dan teliti memberikan bimbingan, mengajak diskusi dan mengoreksi setiap proses penulisan tugas akhir ini. Dr. Hisyam juga selalu memberikan dorongan moral agar penulisan segera dirampungkan. Di samping, beliau selalu menyediakan waktu yang cukup dan bersikap informal di tengah kesibukannya sebagai Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan Program Pascasarjana Universitas Nasional, baik yang lama yaitu Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA maupun yang saat ini sedang menjabat Dr. Mohammad Noer (Ketua Program) dan Drs. TB Massa Djafar, M.Si (sekretaris Program). Kepada para staf mengajar program pascasarjana; Drs. Ramlan Siregar, M.Si, Dr. Indria Samego, Drs Syamsuddin Haris, M.Si, Prof. Dr. Iberamsyah. Dr. Boer Mauna, Dr. Syarif Hidayat, Dr. Irman G Lanti, Drs. Aris Munandar, M.Si dan lain-lainnya. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada teman-teman kuliah seangkatan; Robi Nurhadi, Uu Agus Santoso, Tongato, M. Alfian Alfian M. Saidi Anwar, Cipto Rojo dan khususnya kepada bang Ojo Ruslani dan M. Nasir. Tak lupa diucapkan terima kasih

kepada pak Kasmar Idris, SH, ibu Emma dan pak Syarif yang banyak membantu di sekretariat program pascasarjana UNAS.

Dalam penulisan tesis ini juga mendapat masukan dan dukungan moral dari teman-teman fungsionaris PB HMI antara lain Hasanuddin, Fadjar R Zulkarnain Agussalim Alwi, Muhammad Anwar, Tubagus Erik F. dan Marbawi. Secara khusus penulis saya perlu berterima kasih kepada saudari lin Kandedes, S.Hum (mahasiswa program pascasarjana UIN Syahid, Ciputat) yang banyak memberikan masukan dan bantuan dalam proses pencarian data kepustakaan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Melalui kesempatan ini patut disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pamanku Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH, Drs. Fatah Jassin, MM dan Dr. Abdullah, MM yang selalu memberikan dukungan moral dan motivasi. Secara lebih khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Irjen Pol. Prof. Dr. Farouk Muhammad, SH MCJA (Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK) yang selalu membimbing dan mengajak masuk sebagai peneliti, tenaga akademik dan redaktur jurnal STUDI KEPOLISIAN PTIK. Beliau adalah cendekiawan polisi terkemuka yang sengaja mengkader penulis. Ucapan terima kasih juga kepada Letjen (Purn) Agus Widjojo, MA, Ridwan Suriyadi, AKBP Dr. M. Said Saile, M.Si dan Dra. Yundini H Erwin, MA.

Penulis merasa berutang budi kepada dosen-dosen pada almamater waktu menempuh studi di *College of Foreign Language and Letters* (STIBA) Malang seperti Hartono Ruslan, DES, Dr. Mohammad Adnan Latief, MA, Waluyo Santoso, SIP, M.Si, Dr. Sakban Rosidi, M.Si, Dr. Mudjia Rahardjo, MS, Drs. Wahyu Santoso, SH, M.Si, Drs. Eko Ediyono, M.Si dan Zainul Muzahid, SS, M.Hum. Di samping itu juga kepada beberapa pengurus KAHMI yakni Dr. Ir. Ainul Rasyid, MS (Rektor IPM) Prof. Dr.

Agussalim Sitompul. Prof. Muktie Fadjar, SH, MS, (mantan Rektor Uwiga) Prof. HMA Ikhsan (Pendiri HMI Malang dan mantan Rektor IKIP Malang) Drs. Maschut (Walikota Kediri), Drs. Ernomo (mantan Bupati Trenggalek), Drs. Zainul Arifin (Bupati Bima) dan mas Danang (Direktur PETEBE) Malang.

Kepada kedua orang tua penulis, Mukhtar Jasin (alm) dan Siti Maemunnah Abdullah serta saudara-saudariku terutama Ir. Yurida Wahyuni, Samudra Putra, SE, Feni Fasta, SE Liga Alam, ST dan Adi Baiquni (mahasiswa F. Psikologi UIN Malang). Kepada mereka disampaikan penghargaan setinggi-tingginya.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas kebaikan dan budi pekerti mereka dengan limpahan rahmat dan derajat keimanan.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu politik dan HMI tercinta. Amien.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wabarakatuh.

Jakarta, 25 September 2004.

Penulis,

SIDRATAHTA, M.Si



ABSTRACT

Islamic Student Association (HMI) is one of the student organization that playing the role in creating national political cadres in the modern Indonesian political development. They were exist in many source of powers like executive, legislative, political parties and the others. It is proof that HMI have strong orientation in power than intellectual or populism.

This research is aimed to discuss the system of political socialization and political education used by HMI. Besides, the writer also would like to understand ideas, political and Islamic discourses in last of 1960's and 1970's. the writer assume that these period were well known as the greatest role especially in the meant of organizations development in new order regime under president General Soeharto..

The research was used qualitative research which focus on some document and library analyze in order to know its political history. The writer used such kind of political theory especially political socialization and political participation. In this case, every political system has a kind of political forming that help the member orientation toward social responsibility in a community and country.

The writer found some important think that HMI function as a media for recruitment of national political leaders in our country. They were participated in many of the HMI forum especially formal education system namely, Basic Training, Intermediate Training and Advance Training. We are proofing with the fact that many of HMI alumnus become important peoples in many field of work namely in government, legislative, political parties and many others. Some of them are, Akbar Tanjung, Mar'I Muhammad, Malik Fadjar, Bachtiar Chamsyah, Abdul Gafur and Yusuf Kalla and the others. Even HMI is not the most important aspect for their education background, but the HMI change their political orientation and also their world view about ideology, power, strengthening civil society and student movement. HMI has some basic values that become its political ideology that known as Nilai Dasar Perjuangan (NDP). This usually give influence for their character and vision to face the nation challenges in the future. Besides there is one important aspect in HMI struggle, that every cadre much be independent in what ever they do for the people and the country.

Finally, HMI is student mass organization that has both in Islamic and national commitments from the beginning of Indonesian independent up to now days. Its also have power orientation than social orientation. HMI historical background that very close related with Indonesia political struggle. Now HMI want to replace its vision and mission for intellectual and social orientation.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB I KADERISASI HMI DALAM MENGGISI STRUKTUR KEKUASAAN	
DI INDONESIA.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Penelitian.....	12
1.3. Masalah Penelitian.....	13
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
1.5. Tinjauan Pustaka	15
1.6. Hipotesis Penelitian.....	23
1.7. Kerangka Teori.....	23
1.8. Metodologi Penelitian	30
1.8.1. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	30
1.8.2. Definisi Operasional Istilah-istilah Kunci.....	31
1.8.3. Unit Analisis dan Teknik Penelitian.....	32
1.8.4. Sumber dan Pengabsahan Data	34

BAB II DINAMIKA HMI DAN KEKUASAAN	36
2.1. Sejarah Awal Perkembangan HMI.....	36
2.2. Konsolidasi Ideologi dan Perkaderan HMI	40
2.3. HMI dan Politik Masa Demokrasi Terpimpin	45
2.4. Partisipasi Politik HMI Masa Orde Baru.....	49
BAB III. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN POLITIK HMI	55
3.1. Perkembangan Pemikiran Islam.....	55
3.2. Relasi Islam dan Negara.....	60
3.2. 1. Hubungan yang bersifat antagonistik (1966-1981).....	66
3.2.2. Hubungan yang bersifat Resiprokal kritis (1982-1985).....	68
3.2.3. Hubungan yang bersifat akomodatif.....	69
3.3. Pemikiran Politik HMI.....	70
3.4. Asal Usul Pemikiran Politik HMI.....	74
3.5. Pembaharuan Pemikiran Islam dan Dampaknya bagi Pemikiran Politik HMI.....	78
3.6. HMI dan Pembangunan Politik.....	82
BAB IV SISTEM PERKADERAN HMI	86
4.1. Lahirnya HMI Sebagai Organisasi Kader.....	87
4.2. Sistem Perkaderan HMI, Arah, Metode dan Materinya	90
4.3. Strategi Pengelolaan Perkaderan	94
4.3.1. Lembaga Pengelola Perkaderan HMI.....	94
4.3.2. Jenjang Training.....	95
4.3.3. Kurikulum Training.....	96

4.3.4. Metode Training.....	97
4.3.5. Instruktur.....	97
4.3.6. Evaluasi Perkaderan.....	98
4.3.7. Follow Up Training.....	99
4.3.8. Insan Cita HMI.....	99
BAB V HMI DAN PENGISIAN STRUKTUR KEKUASAAN.....	103
5.1. Perkaderan Politik HMI.....	104
5.2. Pandangan Ideologi HMI dan Pengaruh Nilai Dasar Perjuangan (NDP)109.....	
5.3. Rekrutmen Politik Orde Baru Terhadap HMI.....	112
5.4. Peranan HMI di Lembaga Legislatif.....	117
5.5. Dampak Orientasi Kekuasaan HMI Terhadap Perkembangan HMI Saat ini.....	118
BAB VKESIMPULAN.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	127

DAFTAR SINGKATAN

BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
CM	: Compi Mahasiswa
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPA	: Dewan Pertimbangan Agung
GPII	: Gerakan Pemuda Islam Indonesia
GMNI	: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
GMKI	: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
HMI MPO	: Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi
KAHMI	: Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KAMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KNPI	: Komite Nasional Pemuda Indonesia
LDMI	: Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam
LK	: Latihan Kader
LPL	: Lembaga Pengelola Latihan
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat

MOT	: Master Of Training
Maperca	: Masa Perkenalan Calon Anggota
NU	: Nahdatul Ulama
NDP	: Nilai Dasar Perjuangan
Nasakom	: Nasionalis, Agama dan Komunisme
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PSII	: Partai Syarikat Islam Indonesia
PMKRI	: Pergerakan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia
PMII	: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PORPISI	: Perserikatan Organisasi Pemuda Islam Seluruh Indonesia
PPMI	: Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia
PMY	: Persarikatan Mahasiswa Yogyakarta
Pusdiklat	: Pusat Pendidikan dan Latihan
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UNAS	: Universitas Nasional
UKM	: Universitas Kebangsaan Malaysia
WAY	: World Assembly of Youth



BAB I

KADERISASI HMI DALAM MENGISI STRUKTUR KEKUASAAN DI INDONESIA

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan politik Indonesia modern, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang didirikan di Yogyakarta, 05 Pebruari 1947 merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan yang banyak melahirkan kader-kader politik bangsa. Mereka tersebar dalam berbagai lembaga-lembaga kekuasaan seperti pemerintah, DPR, MPR, MA dan sebagainya. Di samping kader HMI juga banyak berkiprah dalam berbagai partai politik baik yang bercorak Islam maupun nasionalis¹ Kecenderungan orientasi HMI masuk kedalam arena kekuasaan bukan suatu yang kebetulan, tetapi merupakan bagian dari hasil perjuangan politik dan kaderisasinya sejak awal didirikan HMI hingga saat ini. Realitas ini diperkuat oleh pandangan Azyumardi Azra bahwa atmosfir politik saat kelahiran HMI itu sangat diwarnai oleh semangat revolusioner umat Islam dan bangsa yang habis tersita guna mempertahankan proklamasi kemerdekaan dan mengusir kolonial yang menjajah rakyat Indonesia kembali²

Menyadari suasana dan iklim politik yang sedang dalam keadaan perang dan pergolakan revolusi, maka para pendiri HMI, Lafran Pane, dkk meletakkan semangat dan tujuan yang relevan dengan tantangan jamannya, seperti tercantum dalam pasal 4

¹ Lihat Sidratahta, *Ketika HMI Menjadi Beban Bangsa*, Media Indonesia, 19 Juni 2002.

² Azyumardi Azra, *Mengabdikan Republik, Memberdayakan Umat: Apresiasi Atas Pemikiran Kelslaman dan Kiprah Keindonesiaan HMI*, (Pengantar) Buku Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran kelslaman-Keindonesiaan HMI(1947-1997)*, Logos wacana Ilmu, Ciputat, 2002 hal xi

Anggaran Dasar HMI yaitu (1) mempertahankan negara republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. (2) menegakan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Komitmen kebangsaan dan keislaman HMI dengan cepat diaktualisasikan dalam bentuk program kerja sebagaimana hasil Kongres I HMI, 30 November 1947 yang mencakup dua hal. *Pertama*, HMI bekerjasama dengan rakyat Indonesia umumnya dan tentara pada khususnya, dalam mempertahankan negara kesatuan republik Indonesia. *Kedua*, bekerjasama dengan perkumpulan-perkumpulan dan partai-partai Islam dan dengan partai-partai lainnya umumnya dalam memperbaiki kehidupan politik dan ekonomi rakyat dan umat Islam³

Latar belakang sosial politik kebangsaan seperti itu telah mempengaruhi dinamika perkaderan HMI dikemudian hari. Nurcholish Madjid sebagai salah satu kader HMI terpenting, juga mengakui bahwa meskipun bukan organisasi politik tetapi sejak awal HMI mempunyai citra sebagai lembaga perkaderan yang salah satunya perkaderan politik, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan potensi generasi bangsa untuk menjadi insan-insan pimpinan dengan etika dan moral yang kuat dan dengan kemampuan tinggi. Proses perkaderan demikian merupakan konsekuensi dari posisi strategis HMI sebagai organisasi pemuda elit yang memiliki kemampuan sangat tinggi baik sebagai individu maupun secara kolektif-organisatoris.⁴

Komitmen politik HMI memang tidak bersifat sloganistik karena disaat mengadakan ulang tahun pertama di tahun 1948, Panglima Jenderal Soedirman

³ Lihat Agusssalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI (1947-1975)*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 1976 hal 20. sebagai penjelasan tambahan, lihat Ismail Hasan Metareum, *Penegakkan Jiwa Kemandirian dan Kepeloporan HMI, dalam 50 tahun HMI Mengabdikan Republik*, Ramli HM. Yusuf, editor, LASPI, Jakarta 1997 hal 36.

⁴ Nurcholish Madjid, *Mempertegas Visi Perjuangan HMI, dalam HMI dan KAHMI, Menyongsong Perubahan dan Pergantian Zaman*, Majelis Nasional KAHMI, Jakarta, 1997 hal 99-104

menyambut HMI sebagai harapan masyarakat Indonesia. Bahkan hanya satu tahun sesudahnya sebuah Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta menyatakan HMI sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa Islam di Indonesia. Pada tahap-tahap awal perkembangan HMI memang belum langsung menjadi suatu organisasi kader yang terencana, sistematis, terarah dan berkesinambungan sebagaimana lazimnya organisasi modern. Hal ini disebabkan oleh panggilan HMI untuk ikut berjuang secara fisik dalam mempertahankan kedaulatan negara dan mengkonsolidasikan diri sesudah pengakuan kedaulatan. Metareum⁵ mengatakan bahwa selama masa revolusi kemerdekaan dan masa konsolidasi organisasi, proses perkaderan HMI masih bertumpu kepada *hidden curriculum* dan masih belum jelas model perkaderannya. Secara embrional mulai dipikirkan ketika menghadapi pemilu 1955, dimana HMI menjaga jarak dengan dinamika politik praktis partai-partai politik yang tumbuh subur menjelang pemilu pertama yang demokratis itu. Konferensi akbar HMI di Kaliurang sekitar April 1955 menegaskan bahwa jika diantara pengurus HMI menjadi anggota parlemen (konstituante), mereka harus melepaskan jabatan dalam kepengurusan HMI. HMI mendukung semua partai politik Islam dan mendukung pemilihan umum.

Kemunculan HMI sebagai organisasi kader yang modern secara terencana, sistematis dan berkesinambungan baru dimulai tahun 1958 dan sistem perkaderan itu diberi nama Pendidikan dasar. Bahkan kaderisasi sebagai satu langkah modernisasi HMI itu ditandai dengan pengiriman pengurus PB HMI untuk mengikuti pelatihan kader di luar negeri antara lain Aisjah Aminy, Mahbub Junaidy dan Mahmud Yunus ke Aloka India dan Ibrahim Madylao dan Nusrul ke Amerika Serikat. Hasil studi

⁵ *Ismail Hasan Metareum, Op Cit hal 37*

perkaderan mereka di luar negeri menjadi landasan pengembangan perkaderan HMI selanjutnya. Ismail Hasan Metareum (Ketua Umum PB HMI (1957-1960) menganggap langkah penting HMI itu sebagai langkah perintisan karena belum ada organisasi kemahasiswaan yang melakukan pendidikan perkaderan secara terencana dan berkesinambungan. Lokakarya perkaderan nasional di Pekalongan awal 1960 an menghasilkan pedoman materi latihan dasar kepemimpinan oleh kongres VII HMI tahun 1963⁶

Di tengah kelangkaan kaum intelektual terdidik di perguruan tinggi saat itu, HMI telah berfungsi sebagai wahana berkumpulnya *the young educated elite* dalam jumlah yang cukup besar, dan kemunculan mereka menurut Fachry Ali, bukan saja unifikasi pandangan budaya dan politik masa muda terdidik ini bisa dicapai melalui proses perkaderan HMI yang *tipical* untuk para anggotanya. Dalam pandangan ahli sejarah ini bahwa dalam konteks perjudian politik masa depan kemampuan akademis yang masih yang dimiliki secara *massif* oleh massa anggotanya, HMI suatu ketika bisa berfungsi sebagai mesin yang mereproduksi secara besar-besaran kalangan menengah perkotaan di Indonesia.⁷

Posisi strategis HMI, menurut Fachry Ali menyebabkan, secara tak terelakkan, berbenturan dengan kekuatan lain. Sebagai bagian dari kaum modernis Islam membawa konsekuensi logis HMI diserang oleh PKI sebagai organisasi politik sayap komunis radikal karena bagi PKI usaha menghancurkan HMI adalah sesuatu yang sangat bernilai strategis. Penyerangan politik PKI terhadap HMI menandai krisis yang dihadapi HMI pada dekade 1960 an, apalagi cacat politik Masyumi yang "seideologis" dengan HMI

⁶ *ibid*, hal 38-39

⁷ Lihat Fachry Ali, *HMI dan KAHMI Menyongsong Perubahan dan Pergantian Zaman* (Jakarta, KAHMI, 1997) hal . Xxxvii.

dijadikan pembenaran kalangan PKI.⁸ Memang substansi usaha penghancuran sistemik PKI adalah merebut politik masa depan dalam konteks pembangunan politik kebangsaan dikemudian hari. Namun ternyata akhirnya HMI yang memenangkan pertarungan politik itu. Studi Hasanuddin M. Saleh (1996) menemukan bahwa HMI merupakan organisasi yang mampu menggerakkan massanya dengan cepat, menandingi organisasi revolusioner seperti PKI. HMI adalah organisasi mahasiswa yang lahir dua tahun setelah kemerdekaan, yang telah banyak melahirkan kader yang tersebar dalam posisi strategis, baik di pemerintahan dan swasta, sehingga posisi kader demikian berpotensi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik kekuasaan.⁹

Kemenangan HMI terhadap PKI merupakan modalitas politik yang sangat strategis dimasa transisi politik dari Orde Lama ke Orde Baru. Peran HMI bersama kekuatan-kekuatan lainnya, semakin terlihat dalam proses pembentukan dan peletakkan dasar-dasar kehidupan Orde Baru. HMI memang diakui sebagai organisasi yang relatif besar pada jamannya, telah mampu menjadi pilar penting front Pancasila dalam kalangan kemahasiswaan. Sejak 1970 an, ribuan sarjana-sarjana baru kader HMI memasuki berbagai profesi baik dipemerintahan maupun organisasi-organisasi politik. Dengan modal akademik, ketrampilan dan dedikasi tertentu mereka kemudian menduduki posisi-posisi strategis dalam kekuasaan dan tetap mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan bangsa pasca kemerdekaan, perkaderan HMI pun semakin baik dan tertata secara terencana dan menggunakan

⁸ *Ibid* hal xxxviii-xxxix

⁹ Hasanuddin M. Saleh, *HMI dan Rekayasa Azas Tunggal Pancasila*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996) hal 30

¹⁰ Fachry Ali, *Op Cit* hal xiiii

sistem kaderisasi sebagaimana yang dianut organisasi kemahasiswaan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Sehingga kader-kader HMI tahun 1950 an dan angkatan 66 adalah generasi pertama HMI telah berketetapan untuk menjalin hubungan dengan Orba dan memandang perlu berpartisipasi dalam kegiatan politik Orde Baru dengan memasuki institusi-institusi pemerintahan khususnya lembaga politik dan ekonomi dibawah patronase kelompok teknokrat Widjojo Nitisastro dan Sumitro Djojohadikusumo, meskipun mereka menduduki lapisan kedua dalam kekuasaan setelah lapisan teknokrat tersebut. Di antara mereka yang menempati posisi penting itu adalah Deliar Noer, Bintoro Tjokroamidjojo, Barli Halim, Madjid Ibrahim, Bustanul Arifin, Zainul Zamsi dan Umar Tusin. Bahkan ada yang menduduki pos menteri seperti Abdul Gafur, Akbar Tanjung, Mar'ie Muhammad, Mintaredjo dan lainnya. Meskipun dalam sejarahnya umat Islam pernah menggunakan partai politik Islam dan organisasi massa sebagai media politiknya tetapi HMI tidak pernah berafiliasi kepada partai politik apapun, sesuai dengan prinsip independensinya, HMI tidak berhubungan secara formal dengan suatu partai politik apapun.¹¹

Akomodasi politik Orde Baru di bawah presiden Soeharto terhadap HMI karena ternyata anggota HMI lah yang terbanyak terlibat sebagai kekuatan mahasiswa yang turut serta menumbangkan rezim Soekarno yang dikenal dengan angkatan 66, meskipun HMI mengambil sikap politik akomodasionis terhadap kebijakan kontroversial presiden Soekarno, suatu sikap yang dipandang Hakim sebagai tindakan yang tidak lazim bagi organisasi yang besar yang bercorak modern. Bahkan HMI pun berangkuhan dengan NU yang mempunyai tradisi akomodasionis, dan kengganannya HMI berkonfrontasi langsung

¹¹ Masykur Hakim, *"The Response of Muslim Youth Organizations to social-political Change: A Case of HMI Role in Indonesia"* (India, Jamia Millia Islamia, 1998)

dengan Soekarno dengan pertimbangan masih kuatnya Soekarno ternyata meleset karena Pemimpin besar revolusi itu menghadapi gelombang besar yang menghendaki pergantian kekuasaan.¹² Tetapi hanya saja Dawam Rahardjo menilai mereka masuk berpartisipasi kedalam birokrasi dan secara tegas mendukung modernisasi, tidak melalui diskusi intelektual, tetapi berpartisipasi langsung dalam proses pembangunan¹³

Proses perkaderan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan terus mengalami perkembangan, meskipun pada generasi 1950 an ini kurang maksimal karena, meminjam istilah Agussalim Sitompul, masa menanam dan buahnya baru dituai pada 1970an. Pada era ini muncul aktivis dan pemikir muda Islam brilian seperti Nurcholish Madjid, Utomo Dananjaya, Ekky Syahrudin, Djohan Effendi, Dawam Rahardjo, Ahmad Wahib, Imaduddin Abdurrahim, Adi Sasono dan lainnya dan kalangan HMI sendiri memandang kemunculan cendekiawan didikan HMI ini sama sekali diluar dugaan para pendiri HMI.¹⁴

Mencermati realitas perkaderan HMI yang selalu bersentuhan dengan dinamika dan pertarungan politik kekuasaan diatas, memang membawa konsekuensi bagi HMI yaitu HMI diwarnai oleh *mainstream* misi HMI kepada perkaderan politik. Apalagi sangat banyak kader-kader alumni HMI menduduki posisi strategis dalam struktur politik penguasa Orde Baru. Dalam posisi alumni HMI seperti itu jelas akan melemahkan peran HMI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya fungsinya sebagai pengontrol dan pengkritik kekuasaan karena HMI jelas terperangkap pada eksistensi alumnninya yang tersebar di berbagai sumber kekuasaan.

¹² *ibid.*

¹³ Kutipan Azyumardi Azra, *Op Cit* dari Syafii Anwar, *Pemikiran dan Aksi Indonesia, Kajian politik Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta, Paramadina, 1995), hal 26-28

¹⁴ Azyumardi Azra, *ibid.*

Ketika berbagai kalangan intelektual dan organisasi kemahasiswaan lainnya mengkritik semakin perosotnya pamor HMI sebagai kekuatan moral bangsa yang kritis dan independen, maka banyak alumni HMI yang langsung memberikan perlawanan dan bahkan ancaman. Tarmizi Taher misalnya memandang sikap politik HMI seperti itu dianggapnya sebagai tindakan melawan kawan (senior) sendiri. Sebetulnya mengkritik adalah hal yang wajar tetapi menurut mantan Menteri Agama itu bahwa jangan ngawur melawan kawan sendiri.¹⁵

Dengan semakin lemahnya gerakan-gerakan pembaharuan pemikiran sesuai dengan misi dan tujuan HMI sebagaimana yang pernah secara sistemik dan berdasarkan konstruksi ideologis kader-kader HMI 1960 an dan 1970 an, maka sesungguhnya juga banyak otokritik yang dilakukan alumni maupun kader HMI dewasa ini. MT Arifin memberikan kesaksian terhadap potret mundurnya kualitas intelektual kader HMI terutama penguasaan wacana keilmuan, meskipun pada setiap jenjang perkaderan itu terdapat pemahaman politik yang lumayan baik. Demikian juga Dawan Rahardjo mengatakan bahwa mobilitas vertikal HMI kepada elit birokrasi atau *power politics* menimbulkan terganggunya dan bahkan tergusurnya independensi HMI¹⁶

Namun, persoalan perkaderan HMI terlanjur sangat kompleks sehingga orientasi pada politik kekuasaan (*power politics*) sudah merupakan bagian sangat penting dalam setiap wacana dan perilaku kader-kader HMI. Sebagai organisasi yang netral, sebagian aktivis HMI mengadakan training dan pembentukan kader para aggotanya. Melalui Latihan Dasar (Basic Training), Latihan Kader Menengah (Intermediate Training) dan Advance Training (Latihan Kader III) dan Latihan Lanjutan (Senior Course). Fungsi

¹⁵ Ahmad Doli Kurnia, *Meluruskan Jalan Ke Khitah HMI*, Belukar, Yogyakarta, 2002 hal 19-20

¹⁶ *ibid* hal 21-22

training adalah mempersiapkan anggotanya dengan pemahaman agama yang memadai, ketrampilan organisasi, berkomunikasi dan manajemen sehingga mempunyai kecakapan memimpin selama mereka berada dikampus, dan persiapan menghadapi tantangan kehidupan setelah selesai studi di perguruan tinggi. Dalam mengemban tiga fungsi diatas, HMI mengalami banyak hambatan internal dan eksternal, secara internal mengalami kendala pendanaan dari iuran anggota dan umat. Dalam aspek eksternal HMI adalah pengawasan yang ketat oleh pemerintah, terutama aksi mengkritik kebijakan pemerintah.

Meskipun HMI bukan organisasi politik, tetapi mempunyai kepedulian terhadap masalah politik, terkadang keterlibatannya yang tinggi dalam kegiatan politik organisasi ini dituduh sebagai kelompok penekan. Dalam memahami hubungan HMI dengan politik, peran KAHMI sangat efektif melalui lobi-lobi politik di tingkat superstruktur kekuasaan politik, meskipun bergelut dalam wilayah intelektual, keindonesiaan dan keislaman, Dalam realitasnya sesekali memainkan peran politik yang terkadang menimbulkan problem baru bagi HMI sendiri.¹⁷ Sebagai organisasi yang telah berkembang sedemikian rupa, Anas Urbaningrum berpendapat bahwa HMI pasti bersentuhan dengan dinamika politik bangsa.

“Setiap sikap dan perilaku HMI akan tetap mempunyai nilai dan resonansi politis, HMI yang postur awalnya sebagai *moral force*, mau tidak mau juga dihitung sebagai *political force*. Kondisi itu menuntut HMI untuk mengaktualisasi potensi keduanya baik sebagai *moral force* maupun *political force*.¹⁸

¹⁷ Masykur Hakim, *Op Cit.*

¹⁸ Lihat Anas Urbaningrum, *Menuju Masyarakat Madani, Pilar dan Agenda Reformasi*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1999 hal 65

Dalam melakukan perubahan dan pembaharuan untuk mencapai tujuan HMI dalam membangun umat dan bangsa, maka perjuangan HMI dapat dilakukan melalui jalur resmi maupun jalur partikelir yakni berjuang dari dalam (*struggle from within*) dan berjuang dari luar (*struggle from without*) kekuasaan. Urbaningrum mensinyalir bahwa konsep perjuangan yang dikemukakannya khususnya kepada kader yang sudah menjadi alumni HMI agar bukan saja boleh dekat dengan kekuasaan tetapi harus masuk dalam arena kekuasaan.¹⁹ Konsep perkaderan HMI yang dikemukakan Urbaningrum diatas belum terbukti melahirkan perimbangan peranan HMI antara keberpihakannya terhadap kepentingan rakyat dengan kekuasaan. Penjelasan Nurcholish Madjid bahwa ternyata perkaderan (*training*) yang dilakukan HMI sejak 1960 an tidak semuanya membuahkan hasil yang baik karena disamping cukup banyak alumni HMI yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan juga senior (Pengurus Besar HMI) yang ingin menjadi pengurus PB HMI menggunakan *money politics*, karena menjadi pengurus besar merupakan jenjang menjadi pejabat negara.²⁰

Kritik Madjid yang dikenal sebagai arsitek ideologi politik HMI, Nilai Identitas Kader (NIK) terhadap HMI yang mengundang reaksi pro-kontra diberbagai kalangan masyarakat itu, penulis ikut mendukung dengan memberikan argumentasi baik dalam konteks akar masalahnya maupun kondisi empirik perkembangan HMI. Dalam konteks kekinian HMI telah kehilangan elan vitalnya yakni komitmen keIslaman, etos intelektual, independensi dan keberpihakan kepada rakyat akibat tidak ada lagi ruang yang kondusif bagi upaya membangun wacana yang relevan dengan agenda reformasi bangsa saat ini. Secara historik, dapat ditelusuri dalam beberapa aspek mendasar.

¹⁹ *ibid* hal 13-14

²⁰ Lihat pendapat Nurcholish Madjid, *HMI Sebaiknya Dibubarkan*, Media Indonesia, 14 Juni 2002.

Pertama, sikap kritis HMI terhadap kekuasaan Soekarno yang menerapkan Nasakom dimanfaatkan PKI untuk menuntut pembubaran HMI. *Kedua*, perpecahan internal HMI akibat pemaksaan asas tunggal HMI oleh pemerintahan Orde Baru yang otoriter. *Ketiga*, didukung oleh peran HMI sebagai sumber insani pembangunan bangsa (struggle from within). Ketiga aspek itu menyebabkan terjadinya trauma politik HMI dan kecenderungan orientasi kekuasaan politik HMI yang dicirikan sebagai kompromi politik terhadap dinamika kekuasaan dari rezim yang satu kepada rezim yang lainnya.²¹

Akbar Tanjung, menganjurkan HMI menjadi organisasi yang dapat melahirkan kader-kader politik yang mandiri baik dari kepentingan partai politik tetapi juga mandiri dari kepentingan para alumninya. Menurut Akbar bahwa kader-kader HMI diharapkan bisa muncul dalam perpolitikan nasional sehingga bisa turut membangun wajah politik nasional yang mempunyai etika dan rasa solidaritas kebangsaan yang tinggi²²

Proses perkaderan HMI yang telah berlangsung secara terencana dan sistematis selama beberapa dekade terakhir khususnya pada tahun 1960 an hingga 1970 an telah membuktikan tingginya tingkat partisipasi politik HMI baik pada era pemerintahan Orde Baru maupun era reformasi dewasa ini. Berbagai posisi strategis dalam lembaga-lembaga negara seperti DPR, MPR, MA, DPA, KPU dan bahkan dalam kabinet pemerintahan presiden Megawati Soekarno Putri masih didominasi oleh mantan-mantan kader HMI itu. Namun, semakin besarnya peran alumni HMI dalam kekuasaan membawa dampak terhadap semakin mundurnya gerakan HMI sebagai organisasi kader umat dan kader bangsa. Dengan demikian bahwa kaderisasi HMI dapat dikatakan sebagai sumber rekrutmen kekuasaan negara. Salah satu indikasinya adalah dapat

²¹ *Sidratahta, Op Cit.*

²² Akbar Tanjung, *HMI Agar Jadi Organisasi Kader Politik Yang Mandiri*, Kompas, 17 Januari 2000.

dilihat dari laporan majalah Ummat edisi 04/08/97 yang mengkalkulasikan kurang lebih 200 mantan aktivis HMI tampil sebagai wakil rakyat (DPR)²³

Dalam konteks ini, Viva Yoga Mauladi berpendapat bahwa HMI tidak lagi menjadi *mainstream* gerakan mahasiswa dan peran HMI semakin redup. Hal ini disebabkan. *Pertama*, pedoman perkaderan formal yang telah disusun berjenjang, *basic training*, *intermediate training* dan *advance training* kurang diimplementasikan karena masalah manajemen pelatihan yang konvensional dan tradisional, artinya *output* perkaderan tidak memenuhi standar kualitas. *Kedua*, perkaderan baik formal maupun non-formal, kehilangan spirit ideologisnya karena tidak mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bersemainya nilai-nilai baru yang transformatif, tetapi menurut Mauladi bahwa kendala perkaderan merupakan sebab utama hilangnya elan vital HMI yang berdampak merosotnya pamor HMI di dunia kemahasiswaan dan nasional. Persoalannya ketika kader-kader HMI tahun 1960 an-1970 an berpartisipasi politik secara efektif dalam lingkaran kekuasaan negara, tetapi, secara politik sebetulnya HMI mengalami *powerless* sehingga kurang efektif sebagai *pressure group* bagi penguasa²⁴

1.2. Pokok Penelitian

Berdasarkan latar belakang kaderisasi HMI dalam mengisi struktur kekuasaan di Indonesia, maka masalah pokok yang akan diteliti adalah perkaderan HMI yang berlangsung pada periode tertentu. Kaderisasi HMI terutama pada dekade 1960 dan 1970 an telah terbukti melahirkan banyak alumninya yang tersebar dalam berbagai

²³ M. Wahyuni Nafis dan Rifki Mochtar (Ed), *HMI Beban Sejarah Bagi Kadernya*, Fosol PB HMI, Jakarta, 2002. hal 23-24

²⁴ Viva Yoga Mauladi, *HMI Kian Redup*, (Kompas, 5 Pebruari 2002).

bidang kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan khususnya dalam mengisi struktur kekuasaan negara baik di dalam struktur birokrasi maupun lembaga legislatif di Indonesia (DPR/MPR) pada dekade 1990 an.

Proses perkaderan di HMI yang berlangsung secara singkat antara lima sampai tujuh tahun dapat melahirkan kualitas kader politik yang handal, mempunyai kapasitas dan bercorak pluralistik. Padahal mereka melakukan proses sosialisasi politik dalam wadah yang primordialistik, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Kaderisasi yang lebih mengutamakan wacana dan pemikiran politik yang didukung oleh kondisi sosial politik masyarakat dan bangsa di sekitar perkembangan HMI, maka mempengaruhi partisipasi politik HMI dalam struktur kekuasaan negara. Huntington dan Nelson (1984) dapat menjelaskan masalah HMI ini, bahwa pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, kompetisi dan lainnya akan berpengaruh terhadap partisipasi politik kalangan profesional (politisi) untuk masuk kedalam pemerintahan.²⁵

1.3. Masalah Penelitian

Dengan mengkaji HMI sebagai kader politik bangsa, perhatian penelitian dipusatkan pada beberapa pertanyaan penting untuk dijawab adalah: Bagaimanakah sistem kaderisasi HMI yang diterapkan pada dekade 1960 an dan 1970 an? Apa sajakah wacana, pemikiran politik dan doktrin ideologis HMI yang berkembang pada dekade 1960 an sampai 1970 an? Bagaimanakah proses pengisian struktur kekuasaan baik di

²⁵ Sidratahta, *HMI Sebagai Kader Politik (Kaderisasi dan Partisipasi Politik HMI)*, Reading Course, (PPS UNAS, 2003). hal 8

pemerintahan maupun DPR/MPR RI pada masa akhir Orde Baru? Serta bagaimana dampak pengisian struktur kekuasaan HMI terhadap perkembangan HMI dewasa ini?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Penelitian ini bertujuan memahami perkembangan perkaderan HMI khususnya pada periode yang dipilih yaitu antara tahun 1960 an hingga tahun 1970 an, mengingat pada dua dekade inilah dipandang sebagai puncak lahirnya kader-kader politik yang menjadi sumber rekrutmen elite kekuasaan negara khususnya di lembaga legislatif pada masa akhir Orde Baru. Mengetahui berbagai wacana, pemikiran politik dan doktrin ideologis HMI yang berkembang pada dekade 1960an sampai 1970an sehingga melahirkan orientasi politik kekuasaan yang dominan. Banyak ahli sejarah dan pemikir tentang HMI melihat masa duapuluh tahun kaderisasi HMI merupakan puncak lahirnya generasi intelektual muslim²⁶

Menghasilkan pemahaman tentang partisipasi politik HMI pada masa Orde Baru dan Reformasi, dua model rezim politik yang berbeda, di bawah Orde Baru yang otoriter dan orde reformasi dengan sistem politik demokratis. Disamping itu, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh dominasi HMI dalam kekuasaan dengan semakin menurunnya kualitas kaderisasi dan peran strategis HMI dalam gerakan pembaharuan dan berfungsi sebagai pengkritik dan pengontrol kekuasaan negara.

Studi ini tidak hanya ingin menghasilkan pengetahuan deskriptif dan fenomenologis tentang HMI sebagai sumber rekrutmen politik di lembaga-lembaga negara, tetapi juga memberikan nilai manfaat terhadap perkembangan ilmu politik

²⁶ Bachtiar Effendy, *Islam and The State: The Contribution of Islamic Parties to The Declined Of Democracy in the 1950*, makalah, tidak diterbitkan.

khususnya teori partisipasi politik. Penelitian mengenai HMI telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan dalam berbagai disiplin ilmu, tetapi kajian mengenai kader politik masih jarang dilakukan. Apalagi di Indonesia belum ada lembaga-lembaga perkaderan politik yang efektif dan prospektif melahirkan calon-calon pemimpin bangsa dimasa depan. Sebagai negara yang menghadapi transisi menuju demokrasi, maka kajian partisipasi politik adalah penting, sehingga dapat melahirkan, sebagaimana tujuan HMI, *man of future* (kader masa depan).

Jika studi yang dilakukan ini telah dapat mencapai tujuan-tujuan sebagaimana telah disebutkan dimuka, maka akan bermanfaat bagi kader HMI dalam merekonstruksikan sistem perkaderan yang sesuai dengan tantangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Diharapkan akan memberikan manfaat kepada keluarga besar HMI dalam mengembangkan pengaruh dan peranan dalam dunia politik di negeri ini. Berbagai lembaga kemahasiswaan dan kepemudaan serta partai politik sebagai wadah pengembangan dan kaderisasi calon-calon pemimpin politik dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai model dan sistem kaderisasi bagi kepemimpinan bangsa dimasa depan, terutama ketika masyarakat sudah mencapai tingkat partisipasi yang otonom.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauhmana perkembangan studi tentang masalah terkait. Dengan mengkaji terlebih dahulu sejumlah hasil penelitian disertasi, tesis dan skripsi, akan memudahkan peneliti dalam menentukan obyek penelitian yang spesifik. Karenanya tidak semua buku dan karya tentang HMI yang *review* (ditinjau) tetapi hanya difokuskan pada hasil karya yang menggunakan

metodologi ilmiah. Langkah selanjutnya adalah mengkonstruksikan *state of art* kajian terkait tersebut dalam bentuk tabel kajian tentang HMI. berikutnya peneliti melakukan adalah dalam bentuk tabel

Sebagai organisasi kemahasiswaan yang peranannya sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa, HMI telah lama menjadi obyek kajian ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu. Langkah perintisan banyak dilakukan oleh Agus Salim Sitompul yang dikenal sebagai sejarawan HMI, Studinya yang terkenal, Sejarah Perjuangan HMI (1947-1975) membahas periodisasi perjuangan HMI secara cukup lengkap, mulai dari latar belakang sejarah berdirinya HMI, saat-saat berdirinya HMI, reaksi-reaksi kelahirannya hingga tahapan perkembangan, independensi, tafsir tujuan dan otobiografi pendiri HMI Lafran Pane. Karya Sitompul yang semula diangkat dari seminar sejarah HMI di Malang tahun 1975 itu dijadikan sebagai materi pokok perkaderan HMI. Adapun metode penelitian menggunakan pendekatan historis-dokumenter dan penulisan yang bersifat deskriptif.²⁷

Sebelum penulisan sejarah Sitompul (1975), studi tentang Fragmen Lintasan Sejarah Perjuangan HMI Periode Yogyakarta telah ditulis Halim Mubin lima tahun sebelumnya. Secara umum Mubin membahas, antara lain situasi umat Islam Indonesia, *background* sejarah berdirinya, faktor pendorong, pembinaan dan perjalanan HMI dari Yogyakarta ke Jakarta serta pasang surut perkembangan HMI. Namun, menurut Sitompul bahwa Muhammad Mansyur dipandang sebagai skripsi pertama yang membahas HMI, HMI, Asas dan Sikap Perjuangannya dibawah bimbingan Mukti Ali,

²⁷ Lihat Agus Salim Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI* (Jakarta, Intermasa: 1995) hal 153-155

obyek penelitian Mansyur difokuskan pada pemikiran HMI dalam Nilai Dasar Perjuangan HMI, pendekatan yang digunakan adalah ideologis dan normatif.²⁸

Victor Tanja melakukan studi doktoral tentang HMI, sejarah dan kedudukannya di Tengah gerakan-gerakan pembaharu di Indonesia (1979). Temuan penelitian Tanja yang terkenal adalah peranan HMI yang signifikan dalam gerakan pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Tanja mengungkapkan, HMI memulas wajahnya sehingga menjadi lebih menyerupai pusat kekuasaan politik, mengingat posisinya sebagai organisasi mahasiswa muslim terbesar, maka HMI harus menjadikan pandangan keagamaannya. Nurcholish Madjid, bagi Tanja lebih suka berusaha menjadikan gagasan keagamaannya sebagai media menciptakan politik sebagai seni perjuangan kepentingan pembaharuan umat.²⁹ Kedudukan HMI yang strategis itulah, maka Tanja menyimpulkan bahwa Sejarah HMI terjalin sangat sempurna dengan sejarah Indonesia modern dan sejarah umat Islam pada khususnya.³⁰

Keberhasilan Tanja diilhami oleh beberapa penelitian sebelumnya, antara lain, Kemal Hasan sebelumnya, dengan judul *Muslim Intellectual Responses to New Order Modernization in Indonesia tahun 1982*. Kemal Hasan meletakkan gerakan pembaharuan yang dipelopori Nurcholish Madjid dekade 1970an dianggapnya sebagai perkembangan paling radikal dalam pemikiran politik Islam dalam era Orde Baru Indonesia. Madjid menurutnya berhasil memformulasikan kembali postulat-postulat fundamental tuhan, manusia dan alam fisik dan hubungannya dengan realitas politik yang baru (Orde Baru). Madjid, tulis Hasan berusaha membebaskan umat dari malaise

²⁸ Agussalim Sitompul, *Menyatu Dengan Umat dan Menyatu Dengan Bangsa*, (Ciputat, Logos, 2002) hal 22-23.

²⁹ Victor Tanja, *Op Cit* hal 117-119.

³⁰ *Ibid* hal 169.

yang telah merampas seluruh kemajuannya dan mengubah imagi tradisional menuju pembebasan secara progresif, kebebasan berpikir dan kreatifitas dalam pemikiran pentign bagi umat Islam, kegagalan mereka memungkinkan orang luar Islam menduduki posisi-posisi yang berpengaruh dalam kehidupan sosial dan politik bangsa.³¹ Hasan dengan tepat menunjuk garis pemikiran Islam HMI versi Nurcholish Madjid sebagai kelompok muslim liberal terhadap tantangan modernisasi Soeharto dalam bidang sistem politik³²

Selanjutnya, dua mantan kader HMI MPO, *Pertama*, Hasanuddin M. Saleh³³ yang menulis thesis tentang HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila (1996) mengemukakan beberapa latar belakang penelitiannya. *Pertama*, HMI adalah organisasi mahasiswa yang lahir dua tahun setelah kemerdekaan, yang telah banyak melahirkan kader yang tersebar dalam posisi strategis, baik di pemerintahan dan swasta, sehingga posisi kader demikian berpotensi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik, juga sebagai media *lobbying* primordialitas diantara kader-kadernya. *Kedua*, HMI merupakan organisasi ekstra universiter terbesar, yang sewaktu-waktu dapat melakukan *pressure* maupun dukungan politik, HMI merupakan organisasi yang mampu menggerakkan massanya dengan cepat, menandingi organisasi revolusioner seperti PKI, disamping menjadi dapur rekrutmen aktivis organisasi intra kampus. *Ketiga*, HMI memberikan respon agak berbeda dibanding organisasi kemasyarakatan lainnya dalam penerapan kebijakan asas tunggal Pancasila.

³¹ Muhammad Kamal Hasan, *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*, (Ciputat, Lingkaran Studi Indonesia, 1987) hal 114-121.

³² *Ibid* 177.

³³ Hasanuddin M Saleh, *HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila*, KS Lingkaran dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996 hal 15-20

Sebagai pendiri dan eksponen HMI MPO, obyek yang di teliti, Hasanuddin mencoba mengungkap kecenderungan dari tradisi moderat, bahkan akomodasionis, menjadi lebih kritis dalam merespon kebijakan pemerintah, Meskipun sejumlah alumni dalam lingkaran kekuasaan terus memaksa HMI sebagai pelopor asas tunggal Pancasila, tetapi sebagian besar tidak menerima pemaksaan itu yang berakibat lahirnya HMI MPO yang tetap mempertahankan asas Islam. *Kedua*, Rusli Karim menulis tesis tentang Modernisasi Politik Indonesia, Suatu Kajian Mengenai Peranan HMI MPO (1995) di UKM, Malaysia, dalam pembahasannya mencoba menjawab hubungan Islam dan politik ketika pemerintah melakukan pemisahan antara agama dengan politik, terutama yang berkaitan dengan peranan HMI MPO dalam perubahan sosial-politik khususnya rekayasa asas tunggal Pancasila.³⁴ Buku tentang biografi politik ditulis Sulastomo, "Hari-Hari Yang Panjang 1963-1966" (1989) yang mengangkat setting sosial politik sekitar tahun 1966 disaat PKI melakukan kudeta dan HMI dijadikan sasaran tuntutan pembubaran oleh PKI sebagai kekuatan politik revolusioner berhaluan komunis radikal. Dalam tulisan yang memuat pengalaman pribadinya memimpin HMI masa itu, Sulastomo banyak membahas dinamika dan bahkan keharusan HMI untuk terlibat dalam persoalan politik bangsa, meskipun tidak sistematis sebagaimana studi ilmiah, tetapi penulis ini menggunakan pendekatan historis.

Saifullah SA (1994) melakukan penelitian untuk merampungkan studi doktornya di IAIN Ciputat yang memfokuskan pada Nasionalisme HMI dan Penerapannya pada Angkatan 1966. Saifullah SA berpendapat bahwa nasionalisme HMI dapat dilihat dalam bentuknya yang konseptual dan dalam bentuknya yang aktual/praktis. Konsep

³⁴ Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat dan Bangsa*, Op Cit hal 22-23.

nasionalisme HMI menurut Saifullah dimaksudkan sebagai suatu abstraksi berbagai gejala dan proses tingkat kesadaran HMI dalam berbangsa dan berbegara dimana wujudnya dalam bentuk cara berpikir, bersikap, cara pandang yang tidak mementingkan pribadi, suku, golongan dan lainnya. Menanamkan rasa cinta bangsa, membela kelangsungan bangsa dan negara dan sikap penolakan terhadap segala ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan keberpihakan terhadap rakyat.

Bentuk nyata konsistensi HMI dalam kaitannya dengan nasionalisme adalah HMI ikut memberikan kontribusi terhadap agresi I Belanda dan sekutunya dalam bentuk Compi Mahasiswa (CM). Nasionalisme berikutnya adalah dalam bentuk menanamkan rasa kebersamaan dan persamaan senasib sesama bangsa khususnya sesama angkatan muda Islam. Sementara itu nasionalisme HMI dalam pandangan Masykur Hakim agak berbeda dimana ia menilai hal itu sebagai bentuk kegagalan para pemimpin dan aktivis partai politik Islam dalam menjadikan Islam sebagai ideologi negara, meskipun masyarakat Islam adalah mayoritas tetapi dipangung politik sebagai minoritas dan orang luar (outsider), politik Islam dikalahkan dan dimarginalkan baik secara konstitusional, pemilihan, birokratis maupun simbolik.³⁵

Studi mendalam tentang pemikiran neo-modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi dan Ahmad Wahid dan Abdurrahman Wahid dilakukan oleh Greg Barton dari Australia. Ketiga pemikir yang diteliti adalah kader-kader HMI terkemuka, kecuali Abdurrahman Wahid yang berasal dari kalangan NU. Barton menegaskan bahwa telah

³⁵ Saifullah SA, *Nasionalisme HMI, dikutip dalam Sidratahta, Reading Course HMI Sebagai Kader Politik*, (UNAS, 2003).

muncul gerakan intelektual Islam baru di Indonesia tahun 1970an dan gerakan tersebut lahir dari tradisi modernisme Islam terdahulu yang telah mapan.³⁶

Dari sisi karakter modernisme HMI memang sejalan dengan Masyumi tetapi berbeda dengan pandangan politiknya, karena HMI, bagi Barton adalah organisasi independen, terlepas tuduhan PKI "HMI anak Masyumi" Sikap politik HMI mendukung perjanjian Renville, sementara Masyumi menolak persetujuan itu dan ketika HMI dipimpin Dahlan Ranuwihardjo, menyetujui konstitusi sekuler. Dari usaha intelektual Barton pun juga ditemukan teori politik HMI yang bercorak, "akomodatif dengan kenyataan politik dan meskipun tidak berkompromi dalam bidang ideologis"³⁷

Disertasi Maskyur Hakim³⁸ pada Jamia Millia Islamia, India yang berjudul: "*The Response of Muslim Youth Organizations to social-political Change: A Case of HMI Role in Indonesia*" (1998) persoalan yang dijawabnya yakni menjelaskan peran HMI dan kontribusinya dalam perubahan sosial politik yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 1985, tahun pasca diberlakukannya asas tunggal sampai pada tumbanganya Soeharto 21 mei 1998 menyusul tuntutan mahasiswa menuntut mundur.

Dr. Masykur Hakim mengatakan HMI bahwa dari tahun 1960 an sampai 1970an, HMI pernah melakukan training bagi sejumlah organisasi mahasiswa ekstra lainnya untuk mobilisasi dan pergerakan di kota-kota besar, berarti HMI memainkan peran yang signifikan. Kebijakan pemerintah Orde Baru secara sistematis memandulkan kekuatan politik umat Islam melalui koalisi ABRI, birokrat dan Golkar. Dibidang

³⁶ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia (Pemikiran Neo Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad wahid dan Abdurrahman Wahid)*, Paramadina, Pustaka Antara, Jakarta, 1999 hal 8.

³⁷ *Ibid* hal 58-61, telaah yang lebih mendalam terhadap studi Barton akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

³⁸ Maskyur Hakim, "*The Response of Muslim Youth Organizations to social-political Change: A Case of HMI Role in Indonesia*" (1998) Jamia Millia Islamia, India

pemuda pemerintah membentuk KNPI sebagai wadah komunikasi bersama. Meskipun HMI ikut mempelopori kekuatan tandingan yakni Kelompok Cipayung, HMI mendukung gerakan Malari 1974.

Sementara itu, Agussalim Kembali melahirkan karya terbarunya dengan judul *Menyatu Dengan Umat, Menyatu Dengan Bangsa (Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI (1947-1997))*. Studi Sitompul kali ini merupakan hasil disertasi di IAIN Yogyakarta. Beberapa pokok bahasan pentingnya mencakup Tinjauan Historis Wacana HMI, dinamika organisasional HMI yang mengupas tentang perkembangan HMI dari kongres-kekongres secara utuh. Pada dua bab terakhir mengungkap fokus tesisnya yakni Dialektika Wacana Keislaman-keindonesiaan dan Refleksi kritis Wacana Gerakan HMI. Salah satu ciri terpenting karya khas Sitompul, termasuk pada studinya ini, adalah kaya akan data-data otentik, hal ini terasa sangat membantu penulis dalam mengembangkan studi tentang kaderisasi dan partisipasi politik HMI tersebut. Temuan sejarawan ini diantaranya mengatakan, konteks pemikiran keislaman-keindonesiaan HMI sesuai dengan kondisi sosial-budaya Indonesia dengan Islam sebagai mayoritas ditengah pluralisme (lihat hal 627)

Selain itu, peneliti juga menemukan tesis mantan pengurus PB HMI (1997-1999), Ichlas El Qudsi (2002) yang mengkaji komunikasi pengambilan keputusan HMI dalam menghadapi persoalan kebangsaan. Dalam sudut pandang keorganisasian, HMI adalah organisasi kader yang memiliki perangkat infra struktur untuk menjalankan konsep pengambilan keputusannya. Dengan menggunakan teori strukturasi Giddens, Qudsi mengkategorikan sejarah, identitas, azas, fungsi dan peran HMI sebagai dasar

keputusan, keputusan politik mendukung presiden Habibie adalah contohnya. Menariknya Qudsi juga mengatakan HMI sebagai organisasi semi-politik.³⁹

1.6. Hipotesis Penelitian.

Berdasarkan kajian penelitian ini dengan melihat fakta-fakta dan berbagai studi sebelumnya, maka dapat diberikan hipotesis bahwa HMI merupakan organisasi kemahasiswaan yang melakukan proses perkaderan secara terus menerus sehingga melahirkan kader-kader generasi muda Islam yang berkualitas tinggi dan dalam berbagai disiplin ilmu. Dengan menunjuk dimanika eksternal yang mempengaruhi psikologi-politis perkembangan HMI, maka terdapat salah satu orientasi yang menonjol yaitu adanya *mainstream* politik. Hal ini terjadi sebagai keharusan pencapaian tujuan HMI dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. HMI sadar bahwa negara harus diwarnai dengan nilai-nilai Islam yang universal. Kecenderungan itulah yang dapat ditangkap sebagai keberhasilan HMI dalam melahirkan kader-kader politik terbaiknya dalam mengisi struktur kekuasaan akhir Orde Baru, bahkan hingga saat ini.

1.7. Kerangka Teori

Studi mengenai perkaderan HMI mengarahkan peneliti kepada teori-teori sosialisasi dan partisipasi politik. Salah satu ilmuwan yang membahas masalah itu adalah Michael Rush dan Philip Althoff (1983). Mereka mengungkapkan bahwa para filsuf

³⁹ M. Ichlas El Qudsi, *Komunikasi Pengambilan Keputusan Organisasi Mahasiswa Ekstra Universitas dalam Persoalan Kebangsaan, studi kasus sikap PB HMI terhadap pergantian jabatan presiden dari Suharto ke Habibie*, (tesis, UI, 2002.)

politik telah mengungkapkan pentingnya sosialisasi politik sebagai kajian penting ilmu politik. Plato dan Aristoteles telah menekankan pentingnya melatih para anggota masyarakat untuk memahami tipe-tipe aktivitas politik. Sedangkan Rousseau mengakui tentang pentingnya peranan pendidikan politik untuk menghitung nilai-nilai. Ahli ilmu politik berhaluan liberal abad 19 pun memberikan penekanan terhadap kebutuhan untuk mendidik penguasa-penguasa itu⁴⁰

Rush dan Althoff merumuskan konsep sosialisasi politik sebagai proses, oleh pengaruh mana seseorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala lingkungan politik, mempelajari berbagai sikap politik serta memberikan penilaian terhadapnya. Mereka memandang pentingnya sosialisasi politik bagi individu-individu yang terlibat dalam satu sistem politik yaitu dalam partisipasi politik⁴¹

Manusia adalah makhluk berpolitik (*zoon Politicon*) yang dibekali dengan akal budi untuk berpikir dan berkarya, membangun dunia dan menciptakan budaya. Meskipun Politik dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai hal yang tidak berguna, kotor dan perbuatan yang manipulatif, Kartono (1989) beranggapan bahwa melalui pendidikan politik, maka membuat rakyat lebih melek politik, menjadi sadar politik, kreatif dan partisipatif.⁴² Pendidikan politik (*political forming*), dimaksudkan untuk membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat atau orientasi diri untuk pembentukan kesadaran dan tanggung jawab menjadi insan politik. Semua anggota masyarakat, secara langsung atau tidak, mengalami proses

⁴⁰ Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik (An Introduction to political sociology)*, Cetakan Ketujuh, Grafindo, Jakarta, 2000 hal 27-28

⁴¹ *ibid* hal 22-23

⁴² Lihat Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, Mandar maju, Jakarta, 1989 hal 1-5

sosialisasi politik. Dalam kaitan itu Alfian mengatakan bahwa melalui proses sosialisasi politik itu, masyarakat mengenal, memahami dan menghayati nilai-nilai politik tertentu yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku politik dalam kehidupan masyarakat baik penguasa maupun orang awam. Proses sosialisasi politik misalnya kearah pembangunan sikap dan tingkah laku politik yang demokratis. Alfian menunjuk arah pendidikan politik di Indonesia khususnya generasi muda (HMI, PMII, GMNI, PMKRI dan lainnya) adalah untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat menuju suatu pemahaman yang sesuai dengan sistem politik demokratis⁴³

Sosialisasi politik adalah bagian dari pendidikan sosial yang kegiatannya akan mengarahkan orang memperoleh berbagai pengalaman, pengetahuan, nilai, orientasi dan kesiapan untuk ikut berpartisipasi, dengan tingkat aktivitas yang berbeda-beda, sebagai anggota sebuah komunitas dalam masyarakat. Bentuk dari sosialisasi dapat bersifat formal, nonformal, terencana maupun tidak terencana, akan berbagai pengetahuan, nilai, dan perilaku politik, serta karakter kepribadian yang mempunyai muatan politik. Setelah mengalami kematangan maka kader-kader politik itu akan mencapai posisi yang dapat mengantarkan untuk memainkan peran politik. Dalam proses itu terjadi transformasi berbagai nilai, keyakinan dan perasaan yang membentuk kultur politik dengan baik dari generasi ke generasi.⁴⁴

⁴³ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia (Kumpulan karangan)*, (Jakarta, YIIS dan Gramedia, 1983) hal 233-235.

⁴⁴ Pandangan ini merupakan rangkuman dari pemikiran beberapa ahli ilmu politik yaitu Almond dan Powell, Fred Greenstein dan Eric Rome, buku mereka *Political Socialization*, *International Encyclopedia of the Social Science* vol 14 hal 551. dan Eric Rome, *Modern Politicc, An Internatrional to Behavior and Institutions* hal 18

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses yang individu memperoleh orientasi-orientasi politiknya secara khusus (yakni pengetahuan, perasaan, norma dan sikap kritisnya terhadap dunia politik).⁴⁵

Menurut Utsman AB Ruslan dalam bukunya pendidikan politik Ikhwanul Muslimin bahwa ada dua metode sosialisasi politik, yaitu. *Pertama*, metode tidak langsung (indirect political learning). *Kedua*, metode langsung (direct political learning). Metode tidak langsung merupakan proses mendapatkan berbagai persiapan dan orientasi secara umum, yang tidak harus bersifat politis, tetapi mempengaruhi perkembangan orientasi politik pada individu itu, artinya pada mulanya kader itu mendapatkan kaderisasi nonpolitik tetapi berubah tema-tema politik yang akhirnya menjadi orientasi politik setelah terjadi perubahan bertahap padanya. Perlu ditegaskan bahwa belajar politik secara tidak langsung meliputi perolehan berbagai tradisi, ketrampilan dan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aktivitas politik.

Diantara metode tidak langsung yang penting adalah melalui pelatihan (apprenticeship). Misalnya keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai asosiasi mahasiswa, mereka dapat memperoleh kecakapan, pengalaman dan visi nonpolitik, yang nantinya akan berintegrasi dengan sistem politik. Pelatihan atau kaderisasi itulah yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam kehidupan politik masyarakatnya⁴⁶

Metode yang kedua melalui generalisasi (generalization) artinya mencakup nilai-nilai sosial ke berbagai bidang politik bahwa dengan keyakinan individu akan membentuk kepribadian politik. Verba menegaskan sesungguhnya berbagai bentuk nilai dan keyakinan kultural, yaitu nilai-nilai universal yang selalu membangun kultur politik.

⁴⁵ ibid

⁴⁶ Dr. Utsman Abdul Muiz Ruslan, *Pendidikan Politik (Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis Evaluatif terhadap Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin 1928 hingga 1954*. hal 74-77

Dimensi-dimensi keyakinan fundamental tentang kemanusiaan semua akan berkaitan erat dengan orientasi politik⁴⁷

Metode kedua adalah metode pengajaran langsung, melalui proses transformasi muatan politik tertentu kepada individu, dengan tujuan membentuk orientasi-orientasi politik diantaranya. (a) Pembelajaran politik (*political Learning*) yaitu berbagai proses kegiatan yang dimaksudkan untuk mentransfer orientasi-orientasi politik kepada orang lain, baik melalui jalur formal maupun nonformal. (b) imitasi (*imitation* atau taklik), meniru cara hidup para pemimpin dan tokoh merupakan sumber penting bagi nilai-nilai dan orientasi politik. (c) pengalaman-pengalaman politik, yakni hal-hal yang diperoleh seseorang melalui partisipasi politik. Metode langsung mempunyai peranan yang lebih urgensif daripada nonformal.⁴⁸

Dalam kajian ilmu politik fenomena munculnya kader politik di HMI adalah menarik untuk diteliti. Giesecke (dalam Kartono) mengungkapkan pendidikan politik sebagai sarana menyiapkan kader-kader untuk pertarungan dan perjuangan politik secara sistematis untuk membentuk individu agar mampu berpartisipasi dalam pencapaian tujuan politik secara moral dan bertanggungjawab.⁴⁹ Giesecke juga mengatakan bahwa dengan pendidikan politik secara sistematis disertai analisis yang tajam, serta kritik yang obyektif, maka akan didapatkan wawasan politik (*political insight*). Secara hipotetik, proses kaderisasi formal maupun non formal HMI telah mampu melahirkan kader politik yang sesuai dan dibutuhkan zamannya dikemudian hari.

⁴⁷ Verba, *Op Cit* hal 78

⁴⁸ Utsman, *Op Cit*. Hal 78

⁴⁹ Lihat Kartini Kartono, *Pendidikan Politik*, Mandar Maju, Bandung, 1989.

Pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa dengan jalan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik agar menang dalam perjuangan politik. Pendidikan politik juga merupakan upaya sistematis dan disengaja untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis-moral dalam mencapai tujuan politik. Melalui pendidikan politik, orang akan berusaha melakukan pembentukan pribadi yang demokratis disamping usaha demokratisasi dari struktur masyarakatnya, melalui pendidikan politik, maka akan lahir perubahan sikap dari apatisme kepada sikap yang aktif, penuh inisiatif, maju dan demokratis. Sehingga pendidikan politik diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada proses demokratisasi dalam kehidupan masyarakat.⁵⁰

Pendidikan politik diadakan untuk mempersiapkan (1) kader-kader politik yang mampu berfungsi dalam pertarungan politik (2) untuk mendapatkan penyelesaian politik (3) sesuai dengan konsep politik yang telah ditetapkan. Selanjutnya pendidikan politik adalah proses mempengaruhi individu agar ia mendapatkan informasi, wawasan dan ketrampilan politik sehingga ia sanggup bersikap kritis dan menjadi lebih terarah dalam hidupnya. Pendidikan politik mendorong diri dan warga negara dalam lingkungannya menuju kehidupan yang lebih baik.

Wawasan politik yang tajam dan tepat biasanya diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan politik secara sistematis, disertai analisis yang tajam sehingga orang akan berani memberikan kritik yang obyektif. Tetapi wawasan politik (*political insight*) selalu didapatkan melalui kondisi sosial yang tidak mapan. Bila dalam berdemokrasi

⁵⁰ Kartini Kartono, *Op Cit* hal 14-17

banyak melibatkan rakyat, maka demokrasi pendidikan adalah syarat mutlak bagi rakyat. Giesecke juga menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan ikatan kontrak politik yang menyangkut dua hal penting yaitu dalam kaitannya dengan kontrak sosial-etis yang mewajibkan keikutsertaan rakyat untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa.

Menurut Rush dan Altroff bahwa terdapat hirarki yang paling sederhana dan berarti dalam menentukan luasnya partisipasi politik. Pada puncaknya hirarki terdapat orang-orang yang menduduki berbagai jabatan dalam sistem politik, baik pemegang jabatan politik maupun anggota-anggota birokrasi pada berbagai tingkatan dan mereka masing-masing berkepentingan dengan pelaksanaan kekuasaan politik formal. Berikut ini mencakup seluruh jajaran partisipasi politik dan untuk dapat diterapkan pada semua tipe sistem politik⁵¹

Dibawah para pemegang atau pencari jabatan itu terdapat mereka yang merupakan anggota organisasi politik atau semi politik yang berfungsi sebagai agen mobilisasi politik. Dalam institusi sosial dan politik ini pula mereka mendiskusikan secara intensif bagaimana mendapatkan kekuasaan politik tersebut. Dalam kasus negara maju seperti AS bahwa rekrutmen politik jarang terdapat dari kelas ekonomi yang rendah sebagai pemegang jabatan politik. Namun badan-badan perekrutan informal terpenting adalah lembaga pendidikan khusus yang mempersiapkan individu-individu dengan kualifikasi formal yang diperlukan. Penelitian Mathews (dalam Rush)

⁵¹ Lihat Michael Rush dan Phillip A. *Op Cit* hal 124

menemukan kaum profesional (55 persen) yang telah menempuh jalan naik melalui aneka ragam jabatan politik dan terbanyak dari unsur birokrat⁵²

1.8. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan cara, kaidah dan ketentuan-ketentuan tertentu yang baku dan terkonvensi untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, menurut Hisyam bahwa cara mengembangkan ilmu pengetahuan itu berbeda dalam setiap disiplin ilmu, selain disebabkan oleh pandangan epistemologi yang spesifik juga oleh *subject formal* dan *subject material* yang tidak sama antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Meskipun begitu, problem utama pengembangan ilmu pengetahuan serupa yaitu terkait dengan hubungan antara teori atau gagasan dengan kenyataan.⁵³

1.8.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dengan mempertimbangkan objek dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam studi ini, maka peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif. Karena itu peneliti mencoba memahami kaderisasi dan partisipasi HMI sebagai suatu fenomena sosial yang penting di negeri ini, maka akan mengkaji hal itu dengan menggunakan teori-teori sosialisasi politik khususnya yang berkaitan dengan rekrutmen politik dan partisipasi politik. Kedua teori ini merupakan suatu teori yang merupakan satu-kesatuan. Penelitian kualitatif termasuk model yang relatif mudah dimengerti dan digunakan yang memahami dan mengungkap suatu fenomena sosial dan politik. Anas

⁵² *ibid* hal 125-126, 243-247

⁵³ Lihat M. Hisyam, *Merancang Penelitian Sejarah Politik*, makalah disampaikan pada pelatihan tenaga teknis sejarah tingkat lanjutan, Direktorat Sejarah, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata di Ciawi, 1-10 Juli 2003.

Saidi memberikan perbandingan, bila penelitian kuantitatif analisis data akan dilakukan setelah data dikumpulkan, tetapi analisis kualitatif data justru sudah dilakukan sejak data itu dikumpulkan. Hal ini disebabkan oleh tujuan utama penelitian kualitatif bukan mencari penjelasan sebab akibat, tetapi lebih pada memahami situasi yang terjadi. Dengan kata lain, menurut Saidi, untuk memverifikasi teori melalui pembuktian hipotesa dan tujuan akhir analisis kualitatif adalah pembentukan teori.⁵⁴

1.8.2. Definisi Operasional Istilah-istilah Kunci

Untuk memudahkan pemahaman tentang istilah-istilah kunci, maka diperlukan pendefinisian beberapa istilah dalam penelitian ini, yaitu:

- HMI, merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam yang beranggotakan para mahasiswa Islam. Dengan demikian status HMI adalah sebagai organisasi kemahasiswaan dan HMI berfungsi sebagai organisasi kader.
- **Kader Politik HMI** adalah kader HMI yang diarahkan secara terarah dan terencana melalui pemfokusan kepada proses pendidikan dan partisipasi politik, sehingga mereka siap memasuki arena kekuasaan baik dalam pemerintahan maupun legislatif. Profil kader HMI adalah terdapat dalam tujuan HMI pasal 5 AD HMI yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.
- **Perkaderan HMI** adalah usaha organisasi yang dilaksanakan secara sadar dan sistematis selaras dengan pedoman perkaderan HMI, sehingga memungkinkan

⁵⁴ Anas Saidi, *Analisis Metode Penelitian Kualitatif, dalam Modul Pelatihan Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta, PEP-LIPI, 1999) hal 177-179

seseorang anggota HMI mengaktualisasikan potensi dirinya menjadi kader muslim-intelektual-profesional, yang memiliki kualitas insan cita.⁵⁵

- **Pendidikan Politik** adalah bentuk pendidikan orang dewasa dengan jalan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik agar menang dalam perjuangan politik. Pendidikan politik juga merupakan upaya sistematis dan disengaja untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis-moral dalam mencapai tujuan politik (Kartono Kartono, 1989).
- **Partisipasi Politik** adalah kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Sementara menurut Huntington bahwa beberapa ahli ilmu politik juga mendefinisikan sebagai orientasi-orientasi warga negara terhadap politik serta perilaku mereka yang nyata (Huntington & Nelson, 1994).partisipasi politik dapat diarahkan untuk mengubah keputusan pejabat negara yang sedang berkuasa, menggantikan atau mempertahankan pejabat-pejabat itu atau mempertahankan organisasi sistem politik yang ada dalam aturan permainan politiknya.

1.8.3. Unit Analisis dan Teknik Penelitian

Berbagai data yang berkaitan dengan HMI akan dikumpulkan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dengan menggunakan teknik dokumenter, pengamatan dan wawancara. Dokumen yang ditelaah meliputi berbagai sumber data baik primer, sekunder dan konsep dan teori yang berkaitan dengan topik yang dipilih. Pengamatan dilakukan terhadap konteks dan proses kaderisasi, perkembangan dan partisipasi kader-

⁵⁵ lihat Hasil Lokakarya Perkaderan Nasional HMI, Jakarta, 4-8 November 2000.

kader HMI dalam lembaga-lembaga negara di Indonesia. Banyak penelitian yang menggunakan metode ini, dalam lingkungan sosial seperti lembaga sosial (social institution) seperti departemen, dan kelompok sosial (social groups) misalnya kelompok studi mahasiswa⁵⁶ Selain itu, peneliti juga akan menggunakan metode *verstehen* yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang lingkungan (anggota masyarakat didalamnya), ilmuan sosial berusaha menempatkan diri pada kedudukan orang lain, disamping mengenai nilai, cita-cita, norma sosial, pengharapan, perasaan dan ilmu pengetahuan dan masalah sehari-hari.⁵⁷

Sedangkan wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (in depth interview) dengan kader-kader yang telah berhasil mengisi struktur kekuasaan di lembaga legislatif maupun eksekutif. lembaga legislatif terdiri dari Akbar Tanjung, Fuad Bawazier, Aisyah Amini dan lainnya, wawancara dilakukan juga dengan kader-kader HMI yang tersebar dalam kehidupan bangsa dan masyarakat lainnya seperti Agussalim Sitompul, Nurcholish Madjid, Sulastomo, Deliar Noer dan sebagainya.

Data lapangan berupa dokumen, laporan pengamatan, rekaman, transkrip hasil wawancara diidentifikasi dan diklasifikasi untuk kemudian dilanjutkan dengan analisis data. Soedarmo membagi analisis data dengan tiga langkah, (a) analisis selama pengumpulan data (analysis during data collection) dimaksudkan untuk menentukan

⁵⁶ J.J.J.M. Wuisman, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, PPIIS dengan PIIS-Univ. Leiden dan Unibraw, Malang, 1991 hal 72-73

⁵⁷ *ibid.* hal 72-73

pusat perhatian (*focusing*), menyusun pertanyaan-pertanyaan analitik, serta memberikan dasar bagi analisis pasca pengumpulan data (*analysis after data collection*)⁵⁸

1.8.4. Sumber dan Pengabsahan Data

Data penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen formal HMI, dokumen perkembangan kaderisasi HMI dan buku-buku serta hasil penelitian mendalam tentang HMI. Tetapi untuk mencapai tingkat kredibilitas atau keabsahan data melalui penerapan empat kriteria sebagaimana diajukan Lincoln dan Gube (1985),⁵⁹ yaitu derajat (1) kepercayaan (*credibility*), (2), keteralihan (*transferability*) (3) kebergantungan (*dependability*) dan (4) kepastian (*confirmability*). Sementara, Mudjia Rahardjo⁶⁰ mengemukakan beberapa teknik untuk mendapatkan tingkat kepercayaan data yakni dengan ketekunan pengamatan untuk menemukan kedalaman, pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi dan konsultasi baik secara formal maupun informal, dengan para pakar politik dan HMI. Disamping itu, Rahardjo menyebut teknik triangulasi dengan cara pemeriksaan antar teknik pengumpulan data, pemeriksaan antar-sumber data, pemeriksaan antar peneliti dan pemeriksaan antar teori.

Dalam konteks metode triangulasi itu, penelitian ini akan dilakukan diskusi dan pengembangan teori serta mengkaji lagi secara mendalam hasil temuan yang sudah dilakukan penelitian yang sama sebelumnya.

I. Sistematika Penelitian.

- Bab I Pendahuluan

⁵⁸ Soedarmo, *Birokrasi Pelayanan Masyarakat Kota (Studi Pembentukan Tertib Interaksi Birokrasi Garis-Depan Dengan Warga Kota)*, Surabaya, disertasi, PPS Unair, Surabaya 1999.

⁵⁹ Yvonna S, Lincoln and Gube E. Egon, *Naturalistic Inquiry*, SAGE Publication, London, 1985.

⁶⁰ Mudjia Rahardjo, *Bahasa dan Kekuasaan : Studi Wacana Politik Abdurrahman Wahid Dalam Perspektif Hermeneutika Gadamerian*, proposal disertasi, Unair, Surabaya, 2003.

Bab I meliputi pembahasan terhadap rencana tesis secara lengkap, meliputi antara lain latar belakang masalah, pokok penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori sampai pada metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

- Dalam pembahasan bab II akan melakukan kajian sejarah perkembangan HMI dan akan difokuskan pada dinamika HMI dan Kekuasaan.
- Bab III merupakan pokok bahasan mengenai berbagai wacana, pemikiran-pemikiran HMI dalam aspek politik, ideologi gerakan dan pemikiran keislaman.
- Bab berikutnya, pada bab IV penulis akan mengkhususkan pembahasan mengenai perkembangan perkaderan HMI, proses dan materi perkaderan serta out put (hasil yang telah dicapai) dalam perkaderan HMI.
- Bab V merupakan pokok bahasan inti penelitian ini, yakni Kaderisasi HMI dalam pengisian struktur kekuasaan. Bagaimana kader-kader HMI melakukan rekrutmen politik mereka dalam beberapa struktur kekuasaan penting di Indonesia terutama di lembaga legislatif dan eksekutif. Bahasan ini akan mengaitkan dengan wajah politik dan kekuasaan di Indonesia dewasa ini.
- Pada bagian akhir penulisan tesis ini merupakan kesimpulan dan penutup.



BAB II

DINAMIKA HMI DAN KEKUASAAN

Dalam pembahasan bab II ini akan dikemukakan tentang dinamika HMI dengan kekuasaan terutama diarahkan pada faktor-faktor pendorong dan mempengaruhi orientasi struktur kekuasaan negara di Indonesia ia sejak awal kemerdekaan. Dengan demikian pembahasan tentang tinjauan sejarah perkembangan HMI menjadi amat relevan agar dapat diketahui secara akurat persoalan yang ada didalamnya.

2.1. Sejarah Awal Perkembangan HMI

Sebagaimana kita ketahui bahwa HMI didirikan tanggal 5 Pebruari 1947 di Yogyakarta, pada saat itu bangsa Indonesia sedang berjuang mempertahankan kedaulatan negara dari agresi militer Belanda yang sebelumnya telah menjajah beratus-ratus tahun. Kenyataan ini bukan saja karena munculnya pada tahun 1947 itu dengan semangat dan rasion detre yang sangat berbeda dengan berbagai organisasi kemahasiswaan lainnya yang merupakan bagian dari partai politik seperti Persarikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) yang berhaluan ideologi komunis dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) yang seideologis dengan Masyumi, tetapi HMI langsung menegaskan dirinya sebagai organisasi kemahasiswaan yang Independen.⁶¹

Meskipun reaksi keras langsung menampar “bayi baru lahir” ini dengan alasan akan memecah belah kekuatan mahasiswa, tetapi para pendiri HMI yang juga

⁶¹ Studi tentang HMI sejak kelahirannya hingga era reformasi telah banyak dilakukan ilmuan dalam dan luar negeri baik untuk meraih derajat sarjana, master maupun doktor. Menurut Al Chaidar bahwa studi terbaru tentang HMI ditemukan bahwa PAN akan segera menjadi partai HMI dimasa depan .lihat Sejarah Politik HMI. LK I UNAS, 2003.

mahasiswa-mahasiswa baru Sekolah Tinggi Islam (STI, kini UII Yogyakarta) seperti Lafran Pane, Zarkasi, Maisaroh dan 11 teman-temannya yang lain dilawan mereka dengan gerakan intelektual, bukan perlawanan politik yaitu dengan menggelar berbagai acara semacam seminar dan diskusi untuk meningkatkan kesadaran ideologi, politik, sosial dan dunia kemahasiswaan. Hasil kegiatan ilmiah mereka diberitakan (dipublisir) dan disebarakan dikalangan mahasiswa dan masyarakat. Disamping beragam strategi politik jitu terus dilakukan untuk segera mendapat posisi dan kedudukan strategis HMI ditengah-tengah masyarakat dan bangsa yang sedang mengalami transformasi sosial besar-besaran, diantara revolusi dan kemerdekaan. Menurut Dahlan Ranuwihardjo, pada bulan-bulan pertama tahun 1947 itu, suasana politik diwilayah RI terutama di Yogyakarta, menunjukkan adanya polarisasi politik antara partai sosialis dibawah Syahrir Amir Syarifuddin berikut ormas-ormasnya (Sobsi, Psindo, Gerwani dll) sebagai pendukung pemerintahan syahrir. Sementara Masyumi dibawah soekirman, PNI dibawah KM Sarkoro, persatuan perjuangan dibawah pimpinan tan Malaka adalah sebagai oposisi.⁶² Sejak awal HMI sudah menampakkan sebagai organisasi pembaharu. *Pertama*, HMI menjadi pemicu munculnya organisasi baru yang berhaluan keagamaan seperti PMKRI, GMKI dan GMNI. Kedua, HMI ikut memprakarsai diadakannya Kongres Mahasiswa Seluruh Indonesia di Malang juni 1947 yang melahirkan Federasi antara Organisasi-organisasi Mahasiswa Republikan yang dinamakan PPMI⁶³ Dalam upaya perjanjian melalui konferensi meja bundar antara Indonesia-belanda, PPMI dibawah Tirtosudiro tampil menyuarakan aspirasi mahasiswa tentang pentingnya

⁶² Dahlan Ranuwihardjo, *Pengantar 50 Tahun Sejarah Perjuangan HMI*, Op Cit hal 3

⁶³ *ibid* hal 5

persatuan dan meninggalkan garis Van Mook (Belanda) yang memecah belah bangsa dengan politik *divide et impera*.⁶⁴

Pertarungan politik antara pemerintah dan oposisi yang juga menderivasikan konflik dikalangan mahasiswa, mengundang keprihatinan sebagian mahasiswa Islam yang kemudian mendirikan organisasi kemahasiswaan yang independen, HMI. Nampaknya dominasi PMY yang berhaluan sosialis menjadi salah satu penyebab utama polarisasi politik dikalangan mahasiswa. Komitmen para pendiri HMI itu didasarkan pada kekosongan semangat religiusitas dikalangan mahasiswa Islam saat itu, hal itu yang mendorong Lafran pane dan kawan-kawannya untuk terus merealisasikan sebuah gerakan mahasiswa yang dikemudian hari menjadi suatu organisasi mahasiswa terbesar yang disegani. Dalam seminar sejarah HMI 30 an tahun kemudian, 1975 di Malang diketahui bahwa motivasi dasar pembentukan HMI adanya keinginan melihat Islam berkembang dengan baik di Indonesia, dengan menyiapkan kader-kader bangsa yang memiliki komitmen keislaman yang tinggi. Rumusan yang dihasilkan seminar sejarah adalah adanya penegasan tentang penegakkan ajaran Islam, HMI harus mampu mengatasi kemelaratan, penindasan dan HMI harus turut mempertahankan negara republik indonesia baik dalam negeri maupun luar negeri serta mengusahakan kemakmuran rakyat.⁶⁵ Menariknya, sebuah organisasi baru harus langsung terlibat dalam perjuangan bersenjata melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Menurut Hasanuddin bahwa ada dua momentum penting dimana anggota HMI terlibat secara intens dalam perjuangan bersenjata ketika menghadapi agresi militer Belanda I dan pemberontakan kaum komunis di dalam negeri. Sebagai konsekuensinya anggota

⁶⁴ *ibid* hal 6

⁶⁵ Lihat Agussalim Sitompul, *Sejarah HMI, Op Cit*

HMI, yang belakangan dikenal dengan Compi Mahasiswa (CM) itu mengikuti latihan militer yang diadakan markas besar Angkatan darat.⁶⁶ Sejumlah anggota HMI ikut komandan dalam Compi Mahasiswa itu yaitu Ahmad Tirtosudiro dan Dahlan Ranuwihardjo. Salah satu anggota HMI, Hartono bahkan menjadi komandan CM se Yogyakarta yang mengerahkan HMI kegunung-gunung memperkuat perlawanan rakyat dalam melawan agresi militer Belanda⁶⁷. Komitmen kebangsaan HMI merupakan realisasi program HMI yang diputuskan kongres I tahun 1947 yang berbunyi "berkerjasama dengan rakyat Indonesia dan tentara dalam mempertahankan negara."⁶⁸

Keterlibatan HMI dalam masa revolusi fisik dalam mempertahankan kemerdekaan mengesankan pimpinan-pimpinan bangsa Indonesia. panglima Besar Jenderal Soedirman ketika memberikan sambutan pada ulang tahun HMI I, mengartikan HMI dengan Harapan Masyarakat Indonesia, artinya HMI diharapkan menjadi wadah artikulasi politik umat Islam dan hal itu menunjukkan bahwa HMI merupakan kekuatan politik penting dalam mempertahankan kedaulatan negara.⁶⁹

Dari tinjauan historis awal kelahiran HMI diatas, nampak bahwa semangat kelahiran HMI diwarnai dengan masalah politik bangsa yang dihadapkan dengan agresi militer Belanda disatu sisi, dan polarisasi politik kepartaian disisi lain. Namun, Agussalim Sitompul berpendapat bahwa fase ini berakhir ditandai dengan pengakuan kedaulatan rakyat tanggal 27 Desember 1949 yang membawa fase baru kehidupan

⁶⁶ Hasanuddin M Saleh, *HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila*, KS Lingkaran, Jakarta, 1996 hal 36-38

⁶⁷ Corp mahasiswa yang berintikan HMI, disamping sebagai kesatuan tempur juga bertugas memasang ranjau, inteligen, penerangan, duduk dalam staf dan lainnya.

⁶⁸ Lihat Agussalim Sitompul, *Historiografi HMI 1947-1993*, Intermesa 1995 hal 56

⁶⁹ Hasanuddin, *Op Cit* hal 41-42

bangsa Indonesia⁷⁰ Di samping itu, bagi HMI tegaknya kedaulatan negara adalah sangat penting mengingat bahwa Islam tidak mungkin dikembangkan dengan baik jika rakyat dan bangsa Indonesia belum bebas dari kekuasaan yang menindas. Pandangan ini ditarik dari sejarah perjalanan umat Islam yang selalu terdesak baik ketika berada dalam sistem kekuasaan penjajah Belanda yang berlangsung selama tiga setengah abad maupun penjajahan Jepang yang berlangsung tiga setengah tahun⁷¹

2.2. Konsolidasi Ideologi dan Perkaderan HMI

Masa awal 1950 an merupakan masa-masa konsolidasi organisasi. Hal ini bukan saja karena perjuangan fisik melawan agresi Belanda telah usai tetapi juga HMI menyesuaikan diri dengan perpindahan kembali ibukota dari Yogyakarta ke Jakarta dengan memindahkan pusat kegiatan HMI ke Jakarta. Momentum konsolidasi HMI ditandai dengan akan diadakannya kongres sebagai kewajiban organisatoris yakni kongres II akhir tahun 1951. Menurut Hasanuddin bahwa setelah kongres, gerak organisasi berjalan relatif baik dan hampir tidak ada permasalahan internal yang menghambat roda organisasi sehingga HMI menjadi semakin solid⁷² Sebelumnya pembinaan dan konsolidasi organisasi mengalami kemacetan karena situasi perang kemerdekaan, pengurus HMI terlibat dalam berbagai front sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan rapat dan kegiatan HMI.

Bahkan suara sinis dan sumbang yang menuntut HMI dibubarkan pun berdatangan. HMI dihadapkan pada tantangan baru, jalan terus atau membubarkan diri. Sejarahwan HMI, Agussalim menyimpulkan bahwa tahun 1950 adalah tahun yang

⁷⁰ *ibid* hal 57

⁷¹ Hasanuddin M Saleh, *Op Cit* hal 36-37

⁷² *ibid* hal 42

paling gelap dan suram bagi perjalanan HMI. Namun untuk mengantisipasi bubarnya HMI maka Lafran Pane sebagai pendiri tampil kembali memimpin HMI sebagai bentuk tanggungjawab terhadap masa depan HMI⁷³ Dengan penuh kesabaran, keuletan yang tidak mengenal lelah dan menyerah. Lafran dan Dahlan Ranuwihardjo (sekretaris) mengkonsolidasikan kembali kekuatan HMI yang masih ada sehingga dapat menjalankan roda organisasi secara wajar.

Selama 13 tahun HMI mengadakan konsolidasi organisasi, sehingga memungkinkan untuk tampil sebagai organisasi kader dan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Pola pembinaan anggota yang diarahkan menjadi sarjana muslim yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan untuk menjadi kader bangsa. Selain upaya pembinaan terhadap nilai-nilai transformatif keIslaman juga mulai membangun rasa nasionalisme kebangsaan. Strategi yang digunakan adalah rasa kecintaan organisasi sebagai wahana perkaderan menuju tercapainya bangsa yang berkemanusiaan dan bermartabat. Pola pembentukan pribadi melalui latihan dan perkaderan sebagai usaha mencetak kader bangsa disegala bidang kehidupan dilakukan. Faktor motivasi anggota masuk HMI dilakukan sejak awal rekrutmen keanggotaan agar tidak mengalami penyimpangan. Beberapa materi inti pembinaan meliputi; KeIslaman, kebangsaan, nasionalisme, kebanggaan terhadap HMI atau ke HMI an, kemasyarakatan serta penyaluran bakat dan minat serta proses perkaderan lainnya.⁷⁴

Masa konsolidasi organisasi merupakan langkah yang berhasil, karena pada masa itu HMI mampu merumuskan posisinya ditengah-tengah bangsa dan negara. *Pertama*, sebagai organisasi pemuda Islam, memiliki tanggungjawab menjadi *agent of*

⁷³ Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya Dengan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1997 hal 39

⁷⁴ Agussalim, *Op Cit* hal 42-43

change bangsa dan negara. *Kedua*, sebagai organisasi mahasiswa, memiliki tanggungjawab dalam persoalan kemahasiswaan khususnya perguruan tinggi umumnya dan *Ketiga*, sebagai pendukung dasar Islam, bertanggungjawab terhadap penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.⁷⁵

Hasil perkaderan tahap awal ini berhasil meletakkan dasar pergerakan HMI secara lebih modern dan mulai dengan peranan internasionalnya. HMI menjadi anggota federasi Perserikatan pelajar Mahasiswa Indonesia (PPMI)⁷⁶, Perserikatan Organisasi-organisasi Pemuda Islam Seluruh Indonesia (PORPISI)⁷⁷. Porpisi merupakan organisasi penggerak dari Kongres Pemuda Islam Se Dunia yang berlangsung di Karachi, Pakistan. HMI juga terlibat dalam sidang pemuda sedunia (world Association of Youth (WAY) yang beraliran barat. HMI juga menjadi anggota persatuan mahasiswa sedunia (International Union of Student) serta ikut dalam International Student Conference (ISC)⁷⁸

Dalam konteks independensi HMI dapat dilihat ketika negara kita menerapkan sistem politik parlementer. Dalam suasana partai-partai politik yang berkompetisi dengan intensitas yang tinggi dalam memperebutkan kekuasaan, HMI mencoba menempatkan posisinya secara obyektif khususnya dikalangan partai-partai politik Islam. Dengan latar belakang organisasi yang bersifat netral, maka HMI tidak secara tegas memberikan dukungannya kepada Masyumi mengingat ada empat partai

⁷⁵ Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan relevansinya Dengan Sejarah Perjuangan Bangsa*, AdityaMedia, Yogyakarta, 1997.

⁷⁶ Dalam tubuh organisasi PPMI juga terjadi hegemoni HMI sejak awal hingga dalam perkembangannya kemudian, semasa perang kemerdekaan A Tirtosudiro tampil sebagai ketua PPMI dan Dahlan Ranuwihardjo menjadi Ketua Umum PPMI Periode 1951-1952. Ide-ide kerjasama luar negeri PPMI merupakan gagasan cemerlang yang lahir dari Dahlan Ranuwihardjo. Konflik internal dalam tubuh PPMI juga akhirnya diselesaikan HMI. Lihat Agussalim, *Historiografi, Op Cit* hal 27

⁷⁷ Dalam organisasi ini Masykur, Ketua HMI Cabang Yogyakarta, tampil sebagai anggota dewan pimpinan Kongres.

⁷⁸ Hasanuddin, *HMI dan Rekayasa, Op Cit* hal 43.

yang beraliran Islam. Untuk menghindari friksi dalam organisasi karena persoalan politik eksternal, maka HMI memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk memilih salah satu diantara partai politik Islam tersebut. Menurut Hasanuddin bahwa sikap ini bertentangan dengan sikap HMI bersama organisasi Islam Indonesia tahun 1949, memperbaharui kesepakatan empat tahun sebelumnya, bahwa umat Islam hanya diwakili oleh satu partai politik saja yaitu Masyumi.⁷⁹

Perubahan sikap politik HMI itu bukan tanpa dasar, tetapi merupakan perwujudan dari konsistensi HMI sebagai organisasi independen. Umpamanya keputusan Kongres ke 5 HMI tahun 1957 nomor 11 tentang kedudukan HMI menegaskan bahwa HMI tetap menjadi milik dan anak kandung umat Islam dan bukan menjadi bawahan dari salah satu partai politik Islam manapun juga. Begitupun kongres sebelumnya tahun 1953 yang menegaskan HMI tetap independen, bukan *underbouw* partai Masyumi⁸⁰ Menurut Sulastomo bahwa ada alasan mendasar yang melatari sikap HMI untuk tidak mendukung misalnya Masyumi sebagai representasi politik umat Islam. HMI mencermati bahwa perjalanan bangsa Indonesia memperlihatkan perpecahan umat Islam, padahal Islam adalah agama mayoritas penduduk negara ini. disekitar dasawarsa 1950-1960 an, ternyata politik telah memecah belah umat karena waktu itu ada empat partai politik Islam dan diluar keempat partai itu juga masih ada umat yang mengambil jalan lain misalnya gerakan darul Islam. Kenyataan inilah dalam pandangan Sulastomo menghasilkan dalam pemilu 1955 itu dimana partai politik Islam tidak mampu menguasai lebih dari 50 persen yaitu hanya 45 %. Meskipun umat Islam saat itu berjumlah hampir 90 persen. Konsep politik dan beenegara partai politik Islam

⁷⁹ Hasanuddin M Saleh, *Op Cit* hal 43-44

⁸⁰ Agussalim Sitompul, *Visi Perjuangan HMI*, Madani Vol 2 No 4, tahun 1999 hal 46-47

belum mampu mewakili aspirasi politik umat Islam artinya belum mampu menawarkan konsep yang dapat diterima seluruh kalangan umat Islam itu sendiri⁸¹

"...tidak jarang aktivis HMI atau kader HMI, memiliki pandangan dan sikap yang ternyata dapat dikesankan sebagai kepanjangan tangan dari salah satu partai politik. Inilah yang sering terjadi bahwa HMI terombang ambing oleh suatu pendulum, kemana orientasi pimpinannya waktu itu, sungguhpun (sudah tentu) tidak begitu transparan, hal ini baru terkait dengan formula "HMI adalah kader umat, belum terkait dengan rumusan "HMI kader bangsa" Kenyataan ini merupakan tantangan bagi HMI, HMI harus pandai-pandai menempatkan diri untuk dapat diterima oleh keempat partai itu, terkadang menimbulkan resiko penilaian yang tidak wajar, dekat dengan NU, dapat dianggap sebagai jauh dari Masyumi dan sebaliknya. Persoalannya bagi HMI tidak saja apakah dapat diterima oleh keempat partai politik Islam itu tetapi juga pertimbangan kepentingan bangsa..."⁸²

Konsekuensi pencantuman sifat HMI sebagai organisasi yang independen dalam konstitusi HMI memerlukan penjelasan sebagai berikut; *Pertama*, menurut fitrah kejadiannya manusia diciptakan dalam keadaan bebas merdeka oleh karena itu HMI sebagai organisasi mahasiswa harus bersifat independen. *Kedua*, status dan fungsi HMI yang memiliki watak dan sifat kepeloporan yang berfungsi sebagai perkaderan yang melahirkan kader-kader pembaharu. *Ketiga*, sifat independensi HMI yang merupakan yang berwujud dalam bentuk sikap adalah cenderung berpihak kepada kebenaran, bebas, merdeka, terbuka, obyektif, rasional, kritis dan progresif serta jujur, adil dan demokratis. *Keempat*, peranan HMI dimasa depan, anggota HMI merupakan investasi kemanusiaan dimasa depan yang akan menduduki jabatan dan kepemimpinan yang sesuai dengan kemampuannya. Independensi harus menjadi watak dasar perkaderan HMI⁸³

⁸¹ Lihat Sulastomo, *HMI dan Politik*, dalam 50 tahun HMI, *Op Cit* hal 86

⁸² *ibid*

⁸³ *ibid* hal 46

2.3. HMI dan Politik Masa Demokrasi Terpimpin

Bila dalam kajian peneliti difokuskan pada pengisian jabatan struktural kekuasaan pada akhir Orde Baru, maka diperlukan penjelasan historik tentang akar persoalan HMI dan politik. Tahun 1961 presiden Soekarno bersama Ali Sastroamijoyo (PNI), Idham Chalid (NU) dan DN Aidit (PKI) mencetuskan ide Nasionalisme, Agama dan Komunisme (Nasakom) yang pertama kali dipidatokan presiden Soekarno pada 17 Agustus 1961. nasakom ditafsirkan sebagai bagian dari spirit Pancasila. Menghadapi manifesto politik itu, yang secara umum justru bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kebangsaan Indonesia modern, HMI mengambil sikap secara lunak. Hal ini dapat dilihat dalam suara-suara HMI yang mendukung gerakan revolusioner Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi dan sebagainya⁸⁴

Masuknya unsur PKI dalam manifesto politik Soekarno menjadi masalah tersendiri bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Gambaran suasana sosial dan politik waktu itu ditulis dalam penelitian mendalam Syaifullah SA⁸⁵ Menurutnya bahwa tujuan dan misi PKI yang membuat organisasi ini melakukan aksi-aksi dan penyelewengan sebagai berikut. PKI menerapkan sosialisme ala markisme di Indonesia dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemegang kunci negara Indonesia, melalui penguasaan supra dan infrastruktur Indonesia dan menciptakan suasana, iklim yang dapat memacu kearah terciptanya tujuan akhir yakni masyarakat dan negara sosialisme ala Markisme tersebut⁸⁶

⁸⁴ Lihat Hasanuddin M saleh, *Op Cit* hal 46

⁸⁵ Saifullah SA, *Konsep Nasionalisme HMI Sebagaimana Tercermin Dalam Pidato Dies dan Penerapannya dalam Gerakan Angkatan 1966*, Disertasi IAIN Syahid, 1994

⁸⁶ Soetjipto, G30S PKI, AZ Abidin dan Lopa, *Bahaya Komunisme*, 1982 dalam Saifullah SA, *ibid* hal 163

Walaupun pada mulanya PKI menggunakan cara-cara yang plastis, tetapi pada tingkat tertentu PKI sering menggunakan cara-cara kekerasan. Hal ini terbukti dengan makar dan pemberontakan yang dilakukannya di tiga daerah (Tegal, Brebes dan Pemalang) akhir 1945 dan pemberontakan Madiun tahun 1948, dimana pada puncaknya PKI berhasil menguasai Madiun dan sekitarnya, kemudian membangun pemerintahan kumunis Indonesia dengan mengangkat Soemarsono sebagai Gubernur Militer, Soejono sebagai panglima Merah serta Abdul Muttalib sebagai walikota Madiun. Namun serangan balasan dari pemerintahan RI yang dengan tegas mengatakan bahwa "ikut PKI Muso akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia Merdeka atau ikut Soekarno-Hatta yang insyaAllah akan memimpin negara RI yang merdeka tidak dijajah oleh negara manapun juga" Sebenarnya dua pemberontakan PKI di atas telah memberikan isyarat kepada bangsa Indonesia bahwa PKI adalah bahaya laten bagi bangsa Indonesia⁸⁷

Sedangkan Soekarno yang tetap konsisten dengan sikap politiknya dimasa muda sejak 1920 an tentang keharusan bersatunya kekuatan-kekuatan nasionalis utama di Indonesia melawan penjajahan yakni nasionalisme, Islam dan marxisme, apalagi fakta politik menunjukkan PKI dapat tampil sebagai salah satu kekuatan politik penting dalam pemilu 1955, maka Soekarno mendesak agar PKI masuk kedalam kabinet dengan alasan kegotongroyongan yang telah melekat pada diri masyarakat Indonesia, *all members of the familly should eat at a single table and work at the single workbench*, tegas Soekarno⁸⁸ terlepas dari wacana kultural yang mendorong Soekarno mengintegrasikan nilai-nilai dan ajaran politik yang sesungguhnya saling bertentangan

⁸⁷ *ibid* hal 163-165

⁸⁸ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca and New York, Cornell University Press, 1968 hal 542

itu tetapi pengakuan eksistensi PKI membuka pintu lebar-lebar bagi inisiatif politik kaum komunis itu⁸⁹

Perkembangan politik masa demokrasi terpimpin itu, menyebabkan HMI menghadapi situasi krisis karena sesuai karakteristiknya kalangan komunis selalu berusaha menghancurkan kekuatan-kekuatan politik yang menghalangi ekspansinya kedalam kekuasaan. Maka setelah berhasil menghancurkan pengaruh Hatta, PSI dan Masyumi serta kekuatan lainnya, HMI segera menjadi target PKI untuk dihancurkan. Hal ini didasari oleh prediksi PKI bahwa HMI potensial menjadi lawan utamanya karena HMI memiliki kekuatan terutama di dalam kampus-kampus⁹⁰

Usaha menghancurkan HMI dikomandani oleh DN Aidit yang mengatakan bahwa HMI harus bubar sebagaimana juga Masyumi sebab organisasi itu menurut Aidit adalah kontra revolusi. Tekanan politik terhadap HMI tampaknya segera mempengaruhi pendapat umum, meskipun presiden Soekarno menginstruksikan tentang penertiban HMI dari unsur kontrarevolusi tetapi organisasi seperti CGMI tetap menuntut untuk dibubarkan. Disamping berbagai demonstrasi dan usaha penyingkiran HMI secara sistematis dipangung politik Indonesia⁹¹

Disamping HMI tetap dianggap belum sepenuhnya bersih dari unsur-unsur kontrarevolusi oleh GMNI saat itu⁹² juga terungkap ketika Soerjadi (mantan ketua umum GMNI) dalam mengomentari buku "Hari-hari yang panjang 1963-1966" bahwa apa yang dilakukan oleh HMI dalam merespons peristiwa G30S PKI saat itu tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh partai politik. Berkaitan pendapat diatas,

⁸⁹ Bernald Dahm, dalam Fachry Ali, *Op Cit*

⁹⁰ *ibid*

⁹¹ *ibid*

⁹² *ibid*

Sulastomo mengakui bahwa persoalan yang dihadapi HMI pada saat terjadi peristiwa yang hingga kini terus dikaji otentisitas sejarahnya itu, tidak saja terlibat dalam pengumpulan politik melawan PKI, tetapi juga dalam penyelesaian masalah politik pasca pemberontakan PKI serta bahkan penyelesaian dualisme kepemimpinan nasional di awal Orde Baru. HMI adalah satu-satunya organisasi mahasiswa yang diundang dalam hearing (dengar pendapat umum) dalam transisi dari Orde Lama kepada Orde Baru⁹³

Dalam konteks HMI sebagai organisasi kader dan gerakan yang independen, kritik Soerjadi diatas penting untuk menguji artikulasi independensi etis HMI. Sulastomo menanggapi dengan tingkat "kedaruratan" perkembangan politik nasional yang menyebabkan HMI berperan dalam wilayah politik sejauh itu. Sebagai organisasi mahasiswa, sumbangan yang terbesar HMI bagi bangsa dan negara adalah kalau HMI masih mampu mencetak kaum terpelajar, intelektual yang handal yang ditandai dengan kegiatan studi, sehingga mampu melahirkan kader bangsa yang berkualitas. Nampaknya hal inilah yang diperhitungkan PKI. Kegiatan politik HMI sekitar tahun 1960 an masih mengacu kepada nilai-nilai artinya HMI masih memperjuangkan suatu nilai kebenaran bukan kepentingan tetapi kepentingan bangsa⁹⁴

Akan tetapi menurut Eki Syahrudin bahwa sikap politik HMI sepanjang tahun 1960-1965 merupakan pilihan survival atau ideologi survival HMI. Dengan pilihan itu seolah-olah HMI telah melupakan hal-hal penting seperti solidaritas sosial sesama pejuang Islam dan ketundukan kepada Nasakom terutama kepada Masyumi dan PSI serta keikutsertaan HMI dalam ikut menggayang Malaysia sebagai sesama Melayu, Islam, anti komunis dan sebagainya. Strategi survivalitas HMI itu dianggap kurang tepat

⁹³ Sulastomo, *HMI dan Politik, Op Cit, hal 87-88*

⁹⁴ HMI tidak terlibat dalam politik praktis secara langsung misalnya di DPR tetapi GMNI dan CGMI justru memiliki wakil di DPR yang diwakili masing-masing Ketua Umumnya.

bila dipakai dengan teori keseimbangan, dalam pengertian HMI diperlukan oleh Angkatan Darat dan Soekarno, kalau HMI melakukan aliansi strategis dengan AD dan Soekarno, maka survival itu bisa dijaga tanpa harus menjauhkan diri dengan tokoh seperjuangan, sesama HMI sekalipun seperti Deliar Noer⁹⁵

2.4. Partisipasi Politik HMI Masa Orde Baru.

Pada awal memunculannya, Orde Baru adalah sistem politik yang lebih memberikan harapan bagi tatanan negara-bangsa Indonesia modern. Karena itu cukup beralasan bila HMI adalah salah satu organisasi pergerakan sosial yang mendorong dan bahkan hingga terciptanya stabilitas politik baru pasca peristiwa 1965, yang sekaligus menjatuhkan Soekarno dari kursi kekuasaannya. Sampai dengan delapan belas tahun kemudian, 1983, Orde Baru masih dipandang lebih baik terutama bagi artikulasi politik Islam. Menurut Nurcholish Madjid bahwa Orde Baru menunjukkan banyak segi yang lebih baik untuk kaum muslimin dibanding dengan masa Orde Lama. Mengingat sejak awal perkembangannya Orde Baru mendapat dukungan kuat dari kelompok beraspirasi politik Islam ketimbang kelompok lainnya⁹⁶

Angkatan 66 melihat perubahan politik tahun 1965-1966 sebagai suatu peristiwa yang besar, karena berlangsung suatu peristiwa revolusi atau perubahan revolusioner. Sebagaimana terlihat dari motto angkatan 1966 yaitu menghancurkan Orde lama dan membangun Orde Baru. Soekarno dan Orde lamanya dianggap gagal dan menyeleweng

⁹⁵ *ibid*

⁹⁶ Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Kita*, dalam Nasir Tamara, *Sejarah Politik Islam Orde Baru*, Prisma 5, 1988. Nasir tamara menjelaskan bahwa dia adalah tokoh muslim modernis yang menjadi figur utama pembaharuan Islam, pemikirannya mempunyai kredibilitas yang tidak diragukan. Ketiga terjadi perubahan politik dari pemerintahan Orde Lama kepada Orde Baru yang berlangsung setelah G30S tahun 1965 sampai dengan pengambilalihan kekuasaan oleh Jenderal Soeharto melalui Supersemar, Nurcholish Madjid menjadi tokoh HMI, organisasi yang paling gencar dituntut dibubarkan PKI.

dari cita-cita UUD 1945, Pancasila. Korupsi merajalela, demokrasi dipimpin hanyalah bungkus dari kediktatoran, akhlak memburuk dan kekacauan ekonomi. Dari aspek peranan legislatif, melalui Jenderal AH Nasution yang menjabat Ketua MPRS, cita-cita Orde Baru dirumuskan dalam pidatonya dimusyawarah KAMI di Jakarta pada Juli 1966, Nasution menegaskan bahwa tujuan perjuangan kita adalah mendobrak semua penyelewengan ipoleksos dan mental susila, menegakkan kebenaran dan keadilan, UUD 45 dan tuntutan rakyat⁹⁷

Peranan HMI dalam proses pembentukan Orde Baru sangat besar, dimana basis kekuatan non komunis saat itu yang dikenal dengan angkatan 1966 adalah HMI. Adapun metode gerakan yang dilakukan oleh para mahasiswa pada periode 1965-1966 praktis direkayasa oleh aktivis HMI yang ada di kampus maupun di gerakan ekstra universitas. Hampir dapat dipastikan apabila ada gerakan mahasiswa di kota-kota yang ada universitasnya, maka tokoh-tokoh gerakan mahasiswanya adalah kader-kader HMI, HMI selalu mengambil posisi yang menentukan. Kondisi ini disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, merupakan hasil proses kaderisasi (training formal) yang sangat intensif dilakukan pada jajaran organisasi (rayon, komisariat dan cabang serta lembaga pengelola latihannya) dan pada semua tingkat pelatihan mulai basic training, intermediate training sampai advance training yang berlangsung sekitar tahun 1963-1965. *Kedua*, disebabkan karena para aktivis itu semasa periode pergerakan (1964-65) menghadapi penggayangan PKI terhadap HMI sehingga kader-kader HMI terlatih

⁹⁷ *ibid*

menghadapi setiap masalah yang dihadapinya dengan melakukan gerakan *counter attack* (gerakan balasan) terhadap PKI⁹⁸

Studi Hasanuddin (1996) telah membuktikan kecanggihan kaderisasi HMI baik dari segi militansi maupun ideologi dan pemikirannya. HMI merupakan organisasi yang mampu menggerakkan massanya dengan cepat, menandingi organisasi revolusioner seperti PKI. HMI adalah organisasi mahasiswa yang lahir dua tahun setelah kemerdekaan, yang telah banyak melahirkan kader yang tersebar dalam posisi strategis, baik di pemerintahan dan swasta, sehingga posisi kader demikian berpotensi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik kekuasaan. Sehingga kader-kader HMI tahun 1950 an dan angkatan 66 adalah generasi pertama HMI telah berketetapan untuk menjalin hubungan dengan Orde Baru dan memandang perlu berpartisipasi dalam kegiatan politik Orba dengan memasuki institusi-institusi pemerintahan khususnya lembaga politik dan ekonomi dibawah patronase kelompok teknokrat Widjojo Nitisastro dan Sumitro Djojohadikusumo, meskipun mereka menduduki lapisan kedua dalam kekuasaan setelah lapisan teknokrat tersebut.⁹⁹

Diantara mereka yang menempati posisi penting itu adalah Deliar Noer, Bintoro Tjokroamidjojo, Barli Halim, Madjid Ibrahim, Bustanul Arifin, Zainul Zamsi dan Umar Tusin. Bahkan ada yang menduduki pos menteri seperti Abdul Gafur, Akbar Tanjung, Mar'ie Muhammad, Mintaredjo dan lainnya. Meskipun dalam sejarahnya umat Islam pernah menggunakan partai politik Islam dan organisasi massa sebagai media politiknya tetapi HMI tidak pernah berafiliasi kepada partai politik apapun sesuai dengan prinsip

⁹⁸ Fahmi Idris, *dalam 50 tahun HMI, Op Cit hal 75-77*

⁹⁹ Sidratahta, *Sejarah Politik HMI*, makalah Disampaikan pada Basic Training (LK 1) HMI UNAS, 8-11 Oktober 2003. di Puncak Bogor.

independensinya, HMI tidak berhubungan secara formal dengan suatu partai politik apapun. (Masykur Hakim, 1998)¹⁰⁰

Kaderisasi¹⁰¹ merupakan langkah yang memungkinkan HMI muncul sebagai kekuatan mahasiswa yang bahkan daya jangkauannya, meminjam istilah Bachtiar Effendy, melampaui cita-cita para pendiri HMI. Ribuan kader muslim profesional diatas menjadi bukti historik betapa HMI sebenarnya merupakan organisasi kader pertama di Indonesia.

Menurut Victor I Tanja yang melakukan studi doktoral tentang HMI, sejarah dan kedudukannya di Tengah gerakan-gerakan pembaharu di Indonesia (1979). Menemukan erat hubungan HMI dengan partisipasinya dalam pembangunan khususnya Orde Baru, Temuan penelitian Tanja yang terkenal adalah peranan HMI yang signifikan dalam gerakan pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Tanja mengungkapkan, HMI memulas wajahnya sehingga menjadi lebih menyerupai pusat kekuasaan politik, mengingat posisinya sebagai organisasi mahasiswa muslim terbesar, maka HMI harus menjadikan pandangan keagamaannya. Muncholish Madjid, bagi Tanja lebih suka berusaha menjadikan gagasan keagamaannya sebagai media menciptakan politik sebagai seni perjuangan kepentingan pembaharuan umat. Kedudukan HMI yang strategis itulah, maka Tanja menyimpulkan bahwa Sejarah HMI terjalin sangat sempurna dengan sejarah Indonesia modern dan sejarah umat Islam pada khususnya.¹⁰²

¹⁰⁰ *ibid*

¹⁰¹ *Perkaderan HMI adalah usaha organisasi yang dilaksanakan secara sadar dan sistematis selaras dengan pedoman perkaderan HMI, sehingga memungkinkan seseorang anggota HMI mengaktualisasikan potensi dirinya menjadi kader muslim-intelektual-profesional, yang memiliki kualitas insan cita (lihat Agussalim, Op Cit)*

¹⁰² *Sidratahta, Op Cit*

Dalam pandangan Victor Tanja bahwa sejak tahun 1970 pemerintah Orde Baru membatasi kegiatan partai politik dengan dalih memberikan tempat istimewa bagi pembangunan ekonomi, partai politik Islam tampil dalam wahad yang disatukan (hasil fusi) yakni PPP, pembatasan itu termasuk membendung kegiatan politik HMI, dalam Kongres 1976, HMI menyerukan anggota-anggotanya untuk mengikuti pemilu 1977 sebagai pemilih-pemilih yang bebas. Walaupun diingatkan untuk memberikan suara yang sejalan dengan asas HMI dan keislaman. Akbar Tanjung, Ketua Umum PB HMI berkampanye untuk Golkar, sementara Ridwan Saidi, bekas Ketua Umum PB HMI, berkampanye untuk PPP.¹⁰³

Strategi Politik Orde Baru memang sangat ampuh untuk melumpuhkan kekuatan mahasiswa secara struktural maupun kultural. Lembaga kemahasiswaan intra kampus yang demokratis seperti DEMA terpaksa harus dibubarkan sebagai konsekuensi dari depolitisasi kampus yang diterapkan melalui NKK/BKK (1978). Setelah itu sasaran berikutnya adalah mengkooptasi kekuatan kultural mahasiswa seperti HMI, GMNI, PMKRI, PMII dan lainnya dengan penerapan asas tunggal pancasila dengan KNPI sebagai media satu-satunya yang diakui penguasa Orde Baru yang otoriter itu. Sebagai organisasi mahasiswa terbesar saat itu HMI jelas menghadapi posisi dilematis antara kekuatan yang menolak asas tunggal dengan yang bersedia berkompromi dengan kekuasaan. Ismatillah, aktivis HMI MPO menganggap kelompoknyalah yang benar karena berhasil mempertahankan idealismenya dan masih mempunyai cita-cita pada gerakan dakwah Islam. Sedangkan kelompok "Pancasila Yes" (HMI-Dipo) dianggap telah menjual idealismenya kepada kekuasaan. Sementara itu, Viva Yoga menanggapi

¹⁰³ Victor Tanja, *HMI, Sejarah dan Kedudukannya Di Tengah Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1982

tulisan Ismatillah dengan alasan bagi HMI-Dipo menerima Pancasila karena nilai Islam dan Pancasila tidak bertentangan karena semua sila dan butir-butir Pancasila tidak bertentangan dengan nilai Islam. Kalau tidak bertentangan berarti nilai Pancasila termasuk Islami.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Sidratahta, *Konflik HMI Dengan Kekuasaan Orde Baru, Makalah Tanggapan Tulisan Viva Yoga Mauladi di Republika*, 2003.



BAB III.

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN POLITIK HMI

Meskipun HMI dikenal sebagai suatu organisasi perkaderan yang lebih berorientasi politik terutama sebagai sumber rekrutmen politik lembaga-lembaga negara seperti DPR dan pemerintahan, tetapi HMI memiliki berbagai wacana, pemikiran atau gagasan-gagasan yang berkembang dalam berbagai kegiatan perkaderan HMI.

Segala gagasan dan wacana yang ditekuni kader-kader HMI terutama pada dekade 1960 an hingga 1970 an, telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi suatu pemikiran-pemikiran politik yang dapat berguna bagi aktualisasi kader-kader HMI dalam pengisian struktur kekuasaan di negeri ini.

3.1. Perkembangan Pemikiran Islam

Dalam perkembangan HMI, maka persoalan keislaman sudah merupakan suatu kajian yang dilakukan secara intensif sejak awal. Sebagaimana kita ketahui bahwa latar belakang kelahiran HMI merupakan kerisauan generasi muslim saat itu yang menyaksikan keterputusan gerakan pembaharuan umat Islam di Indonesia. setelah suatu gerakan muda Islam yang dikenal dengan Jong Islaminten Bond (JIB) pada jaman penjajahan Belanda dan Jepang hanya mampu mengkader satu generasi yakni dari 1924-1945.

Dalam pandangan Syafii Maarif bahwa JIB yang didirikan pada tahun 1925 dengan godfathernya KH. Agus Salim, seorang intelektual yang jenius, melahirkan sejumlah kader-kader politik yang handal seperti Mohammad Roem (seorang pendiri

republik Indonesia), Mohammad Natsir juga adalah tokoh intelektual dan politisi yang menjadi simbol moral bangsa hingga kini. Maarif cenderung memasukkan generasi JIB sebagai generasi Islam yang cerdas, visioner dan paling arif dalam politik¹⁰⁵

Berbeda dengan persoalan yang dihadapi generasi JIB yang jelas menghadapi sistem politik etis yang diterapkan kaum kolonial, sehingga mereka memiliki kesadaran nasionalisme yang tinggi. Friksi-friksi Islam, nasionalis, komunis dan sebagainya belum nampak sama sekali. Namun, HMI yang lahir setelah kemerdekaan harus dihadapkan dengan masalah-masalah diantara kekuatan-kekuatan bangsa sendiri. Dalam kerangka supra struktur politik Indonesia, panggung perbedaan itu mengambil tempat pada penguatan ideologis dan konstitusional negara. Menurut Bahtiar Effendi, perbedaan itu tercermin pada polarisasi dua kelompok besar yakni golongan nasionalis dan golongan agama. Golongan yang pertama tidak menginginkan Indonesia tidak didasarkan pada paham keagamaan, dimana Soekarno, Mohammad Yamin, Supomo, Hatta sebagai ujung tombaknya. Mereka menginginkan bangsa Indonesia didasarkan paham yang dapat diterima semua golongan dan yang diusulkan adalah Pancasila. Kelompok kedua menginginkan Islam sebagai dasar negara. Kelompok yang dimotori oleh Natsir, Wahid Hasyim, Ki Bagus, Sukiman dan sebagainya mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Kelompok ini mengajukan alasan bahwa Islam adalah agama yang memberikan petunjuk bagi seluruh aspek kehidupan dan yang lainnya adalah aspek sosiologis bahwa umat Islam adalah warga mayoritas di Indonesia¹⁰⁶ Pernah suatu jalan tengah dihasilkan yaitu dengan diterimanya Piagam

¹⁰⁵ Lihat Syafii Maarif, *Pengantar Buku Tidak Ada Negara Islam; Mohamad Rum dan Nurcholish Madjid, "Dialog Dua Generasi, Jembatan, Jakarta 1997.*

¹⁰⁶ Bahtiar Effendi, *Teologi Baru Politik Islam, Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi, Galang Press, Yogyakarta, 2001. hal 67-69*

Jakarta pada juni 1945, dengan mengakomodasi kepentingan umat Islam, dengan mewajibkan untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun kesepakatan itu dianulir sehari sesudah kemerdekaan dengan hanya memasukkan dalam rumusan Pancasila itu, Ketuhanan yang maha esa. Kenyataan sejarah seperti inilah nampaknya yang terus mewarisi konflik antar generasi sesudahnya. Karena perdebatan antara nasionalis dan agama saat itu gagal menghasilkan konsensus yang dinegosiasikan dalam kehidupan kenegaraan.

Dalam konteks ideologis, HMI jelas mewakili kalangan Islam terutama Islam modernis di Indonesia, maka adalah suatu hal yang wajar terjadi ketika pada jaman pemerintahan demokrasi dipimpin dibawah Soekarno, HMI mendapat berbagai tuduhan sebagai kekuatan kontra revolusi. Tersirat di dalam berbagai upaya pembubaran HMI oleh kaum komunis adalah ketika menemukan semacam musuh ideologis yang sama yakni Islam.

Perkembangan pemikiran keIslaman HMI, baru mendapatkan ruang publik (public sprehe) yang luas untuk kembali mengembangkan wacana keIslaman secara kontekstual adalah ketika Orde Baru muncul pasca revolusi yang gagal pada tahun 1965. HMI seakan mendapatkan momentum untuk mengekspresikan pemikiran-pemikiran Islam yang terpendam sebelumnya. Di saat inilah, Kemal Hasan menyebut peranan HMI awal Orde baru sebagai respon ideologis terhadap masalah modernisasi. Pemerintah menghadapi tugas berat melakukan perbaikan ekonomi dan politik, ditengah krisis ekonomi dan kecenderungan besar inflasi tinggi warisan Orde Lama berupa strategi global untuk membangun dunia baru. Orde Baru memulai dengan pembangunan

dan stabilitas politik mutlak perlu diberi prioritas utama oleh negara¹⁰⁷ menurut Kemal bahwa pemerintah baru itu mengajukan konsep modernisasi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Ketika semua golongan politik, termasuk HMI sepakat bahwa modernisasi sebagai obat mujarab bagi penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi Indonesia, maka muncul berbagai perbedaan pandangan mengenai masalah modernisasi tersebut.

Penerimaan HMI terhadap pendekatan pembangunan Orde Baru yang menekankan pada modernisasi barangkali, berkaitan dengan reinterpretasi nilai-nilai kemanusiaan Islam melalui mazhab transformasi sosial dengan usaha menciptakan hubungan antara Islam dan negara yang harmonis dan integratif dalam beberapa aspek pokok. *Pertama*, berkembangnya masyarakat yang egaliter dan emansipatoris. Oleh karena kompleksnya tantangan yang dihadapi, maka diperlukan strategi pendekatan yang akomodatif bagi aspirasi umat Islam. *Kedua*, dibawah pemerintahan Orde baru, negara akan menjadi semakin kuat. Dengan kerangka pikir seperti itu dalam pandangan Bahtiar bahwa umat Islam perlu diarahkan kepada upaya memahami makna politik secara luas, mencakup program, strategi dan wilayah perjuangan. Di samping merumuskan hubungan yang substantif dan signifikan antara kekuatan politik Islam dengan negara serta lembaga-lembaga sosial politik yang ada yang mempunyai visi perjuangan yang sama serta mencoba merumuskan kembali tujuan politik Islam yang inklusif.¹⁰⁸

Jika ditelusuri lebih jauh bahwa gerakan-gerakan pembaharuan Islam di Indonesia tak lepas dari kontak pengaruh dengan gerakan-gerakan pembaharuan yang

¹⁰⁷ Muhammad Kamal Hasan, *Op Cit* hal 7-8

¹⁰⁸ Lihat Bahtiar Effendy, *Op Cit*

muncul di dunia Islam pada umumnya, hal itu melalui berbagai hubungan perdagangan dan pemikiran yang lama dengan misalnya Timur Tengah. Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam terkemuka yang sering menjadi sumber inspirasi aktivis HMI memperkenalkan empat model perkembangan. (1) tahap gerakan revivalisme pramodern atau revivalis awal gerakan ini merupakan reaksi dari dekadensi moral masyarakat Islam yang diliputi oleh kebekuan pemikiran pembaharuan. Gerakan tahap pertama diarahkan pada transformasi secara mendasar guna mengatasi kemunduran moral sosial dari masyarakat Islam. (2) gerakan modernisme klasik, dilakukan melalui pembaharuan lembaga-lembaga pendidikan, konsekuensi model ini khususnya dibanyak negara Islam warisan kolonial adalah dengan menggunakan ide-ide barat sebagai ukuran kemajuan. Bahkan al Quran dan sunnah tetap dipakai sebagai justifikasi bagi gagasan barat. Tahap ke (3) adalah revivalisme pasca modern (post modernist revivalist) dalam tahapan ini, maka ide barat terutama bidang politik, sosial maupun ekonomi memperoleh cover atau kesejajaran arti dengan istilah Islam. Maka gerakan-gerakan sosial dan politik merupakan aksentuasi yang utama dari gerakan ini yang juga terorganisir dengan modern.¹⁰⁹

Gerakan ini muncul dalam fase-fase kemodernan yang telah lama melanda dunia Islam melalui pencerahan di abad XVI dan seterusnya hingga abad XX. Sedangkan munculnya pembaharuan di Indonesia ditandai dengan bangkitnya nasionalisme dunia Islam untuk menentang negara-negara kolonial barat, selain kemauan untuk menjadi masyarakat Islam yang maju kedepan.¹¹⁰

¹⁰⁹ Awad Bahasoan, *Gerakan pembaharuan Islam: Interpretasi dan Kritik*, LP3ES, Nomor Ekstra, 1984 hal 110-112

¹¹⁰ *ibid.* hal 113

Dalam perspektif pemikiran politik Islam, menurut Dien Syamsuddin bahwa hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai telah menjadi salah satu isu penting yang mendorong lahirnya teori-teori baik mengenai pola hubungan antara pihak maupun mengenai masyarakat ideal yang perlu tercipta dari hubungan tersebut. Pemikiran politik Islam, sejatinya mencerminkan pencairan intelektual yang panjang dan berkesinambungan tentang hakikat peranan pemerintahan sebagai instrumen yang tak terpisahkan untuk menanggulangi masalah keagamaan dan keduniawian. Seperti lazim dalam paradigma pemikiran, pemikiran politik Islam juga menampilkan dua spektrum pandangan tentang hubungan yang berkuasa dan yang dikuasai¹¹¹ Namun terdapat perbedaan tajam antara ulama politik terhadap kekuasaan, terutama pada masa pramodern, yang dipengaruhi oleh faktor geo-sosio politik dan budaya, sehingga secara umum sejarah peradaban umat Islam menampilkan pihak yang berkuasa (halifah, amir atau sultan) pada posisi superior dengan kekuasaan mutlak dan kedaulatan berdimensi ilahi. Hal itu tercermin dari misalnya gelar *Allah filard* (wakil tuhan dibumi) atau *zil allah fi al ard* (bayang-bayang tuhan dibumi). Posisi ulama yang lemah secara sosial politik mendorong ulama politik itu melegitimasi pihak yang berkuasa dengan alasan-alasan keagamaan.¹¹²

3.2. Relasi Islam dan Negara

Masalah hubungan Islam dan negara telah mendapat ruang perdebatan sendiri dalam diskursus Indonesia modern. Wacana ini menurut Bachtiar Effendi berlandaskan

¹¹¹ Lihat Dien syamsuddin, *Antara Yang Berkuasa dan Yang Dikuasai (makalah pidato ilmiah pengukuhannya sebagai guru besar pemikiran politik Islam di universitas Islam negeri (UIN) Jakarta, Jurnal Katalis, Vol 1/2/2001.*

¹¹² *ibid*

pada hubungan politik Islam dan negara muncul dari pandangan yang berbeda dikalangan para pendiri negara bagaimana Indonesia yang dicita-citakan. Hubungan yang tidak harmonis antara Islam dan negara-bangsa justru muncul dari keinginan mengartikulasikan secara sosio-kultural, ekonomis dan politis di Indonesia. Pada sisi lain, terdapat juga pemikiran yang mengedepankan substansialisme Islam yaitu tentang pentingnya keadilan, kesamaan, partisipasi dan musyawarah.¹¹³

Secara sosio-kultural bahwa Islam di Indonesia berkembang di tengah masyarakat yang telah mempunyai corak kebudayaan tersendiri. Keislaman orang Indonesia bersifat khas jika dibandingkan dengan masyarakat manapun di dunia, tetapi Islam tidak banyak mengubah kebiasaan praktek kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya Mahabarata jauh lebih berpengaruh daripada Al Quran dalam pembentukan kehidupan sosial orang Jawa. Banyak pengamat yang meremehkan keberadaan Islam santri di Indonesia dan mengangkat tinggi kelompok abangan yang dipandang lebih dominan dalam segala hal dibanding dengan kelompok santri.¹¹⁴

Berdasarkan pada perkembangan Islam yang semakin pesat itu, maka Kahane (dalam Karim) mengajukan hipotesis sebagai berikut;

1. Islam sebagai agama penakluk pertama yang datang ke Indonesia.
2. Kesederhanaan tradisi (ajaran) Islam.
3. Persamaan antara agama pribumi dan Islam.
4. Kemungkinan wujud bersama agama orang Jawa dan Islam.
5. Alasan pelengkap, sebagai alat yang diperlukan untuk hubungan komersial, pembangunan dan pertukaran.
6. Taktik penetrasi.
7. Islam sebagai satu kekuatan penentang terhadap kepentingan penjajah dan cara-cara paksaan.

¹¹³ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Paramadina Jakarta, 1998

¹¹⁴ Pokok pikiran ini adalah rangkuman dari hasil-hasil studi para Indonesianis seperti Geertz, Stange, Landon, Lapidus dan lainnya. Lihat Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Politik Islam*, Tiara Wacana Yogya, 1999.

8. Penyebaran Islam sebagai hasil kekosongan budaya dan institusi yang disebabkan oleh runtuhnya kerajaan-kerajaan pusat Indonesia.

Menurut Karim bahwa pada dekade 1970 an dan 1980 an terdapat kenyataan bahwa sosialisasi Islam telah dijalankan baik melalui institusi pendidikan disemua tingkatannya atau pun melalui pendidikan luar sekolah seperti pengajian dan kegiatan kampus. Dalam proses itu terjadi pula Islamisasi birokrasi. Namun keberagaman (religiosity) masyarakat Indonesia dikaitkan dengan afiliasi politik yang dikenal dengan dua aliran. *Pertama*, yang berasaskan kepada agama dan *Kedua*, menurut pandangan yang dianutnya, baik tradisional maupun modern, berbeda sikap terhadap perubahan sosial dan kekuasaan. Karim menyimpulkan bahwa sejak abad ke 15 Islam telah menjadi senjata ekonomi dan politik untuk membebaskan mereka dari kebangsawanan Majapahit¹¹⁵

Dinamika umat Islam dalam hubungannya dengan negara Orde Baru pada awal dekade 1970 an yang tetap diwarnai dengan ketegangan dan konfrontasi sehingga membawa dampak pada peminggiran posisi politik Islam era Orde Baru dibanding dengan kelompok lainnya. Berbagai penerapan strategi mengedepankan artikulasi partai Islam dan oposisi kurun waktu itu ternyata semakin menempatkan umat Islam di pinggiran percaturan Politik rezim yang dikomandani Soeharto itu. Indikasi paling riil adalah semakin merosotnya posisi politik di panggung politik dimana tidak adanya jabatan strategis negara yang dipegang oleh tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang gerakan Islam. Sementara konsep kebijakan yang dihasilkan negara juga banyak yang tidak mengakomodasi aspirasi kaum muslimin. Kondisi ini membawa konsekuensi

¹¹⁵ *Ibid* hal 37-39

psikologis bahkan sebagai beban karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, terhadap para pemimpin Islam Indonesia, terutama kalangan intelektual generasi baru dekade 1970 an¹¹⁶

Menariknya, gerakan pemikiran baru ini banyak dimotori oleh tokoh-tokoh HMI waktu itu. Gerakan ini tidak saja membicarakan tentang persoalan politik Orde Baru yang memojokkan umat Islam tetapi juga membicarakan tentang Tuhan, manusia dan berbagai persoalan kemasyarakatan, terutama hubungannya dengan politik umat Islam serta bagaimana melakukan terobosan-terobosan untuk mengembalikan daya gerak psikologis umat Islam.

Sebagaimana yang tampak dalam diskursus intelektual mereka, agenda yang penting diajukan adalah; (1) meninjau kembali landasan teologis atau filosofis politik Islam (2) mendefinisikan kembali cita-cita politik Islam dan (3) penilaian kembali tentang cara-cara bagaimana cita-cita politik tersebut dapat dicapai secara efektif. Dalam konteks perkembangan politik dan keagamaan, para pelaku pembaharuan dari kalangan HMI menolak berbagai pandangan dokmatis kalangan elite muslim. Mereka meragukan ketepatan strategi, taktik dan cita-cita politik Islam. Para pemikir HMI ini berpandangan berbeda dengan generasi tua tentang hubungan Islam dan ideologi, mereka menolak gagasan Islam sebagai ideologi atau pemikiran bahwa negara merupakan perpanjangan tangan dari Islam. Meskipun Islam sebagai agama, mengandung ajaran sosial politik. Pada saat itu perhatian mereka tertuju pada agenda pembaharuan pemikiran Islam. Sikap kader-kader HMI seperti Dawam, Ahmad wahib, Djohan Effendi dan lainnya beranggapan didasarkan pada pendekatan konservatif yang

¹¹⁶ Lihat Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, Pustaka Pelajar, 1999 hal 141-143

mematok padangan keagamaan tentang urusan-urusan duniawi yakni politik dalam cara yang formalistik, legalistik dalam orientasinya¹¹⁷

Para tokoh HMI itu menyerukan pembaharuan pemikiran Islam dan menyegarkan kembali pemahaman keagamaan kaum muslim. Sebagai salah satu organisasi mahasiswa Islam paling menonjol di negeri ini, HMI merupakan organisasi kader terbaik untuk dimasuki para mahasiswa agar mereka menjadi akrab dengan permasalahan-permasalahan penting, baik yang berhubungan dengan masyarakat muslim maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Meskipun seperti yang dikaji Effendi bahwa agenda pembaharuan pemikiran Islam bukan merupakan kebijakan resmi HMI, karena adanya perbedaan pendapat yang tajam diantara mereka mengenai sifat dan substansinya, yang diperkuat oleh sejarah politik Islam. Keterlibatan mereka merupakan inisiatif kultural. Di Yogyakarta gerakan itu dimotori oleh Djohan Effendi, Mansyur Hamid, Ahmad Wahid dan Dawam Rahardjo. Dimana mereka terlibat secara aktif dalam *Limited Group*. Lingkaran ini merupakan forum yang membahas berbagai persoalan keagamaan, sosial, kultural dan politik, dalam suasana yang bebas kelompok ini memberikan kesempatan kepada seluruh peserta aktif untuk mengungkapkan ide, pikiran dan gagasan yang bahkan keluar dari batas religius yang lazim.¹¹⁸

Melalui diskusi-diskusi panjang dan intens yang adakan lembaga *buffer* HMI, *Limited Group* tersebut, mereka sampai pada beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, menurut mereka bahwa tidak ada bukti yang tegas bahwa Al Quran dan Sunnah mewajibkan kaum muslim untuk mendirikan negara Islam. Bahkan

¹¹⁷ Djohan Effendy, *Op Cit* hal 129-131

¹¹⁸ *ibid* hal 133

eksperimentasi politik Nabi Muhammad tidak mengandung unsur proklamasi berdirinya negara Islam, karena itu mereka menolak pembentukan negara Islam di Indonesia.

Kedua, mereka mengakui bahwa Islam memberikan seperangkat prinsip sosial politik, meskipun mereka berpandangan Islam bukanlah ideologi, karena itu ideologisasi Islam mereduksi nilai Islam.

Ketiga, karena Islam merupakan agama yang universal, maka pemahaman kaum muslim tidak harus formalistik melainkan pemahamannya harus didasarkan pada penafsiran yang menyeluruh secara kontekstual dan bahkan menurut Ahmad Wahib, bahwa meniscayakan transformasi Islam kedalam prinsip dan praktek kontemporer.

Keempat, manusia tidak mungkin menjangkau kebenaran mutlak tetapi bersifat relatif dalam nilai karena itu dapat berubah. Tidak boleh ada klaim mana pemahaman yang paling benar dalam interpretasi ajaran Islam.

Dengan dasar pemikiran yang fundamental itu, mereka memperjuangkan corak Islam yang lebih substantif, mereka dapat menerima bentuk negara seperti sekarang ini, HMI berupaya menghilangkan antagonisme lama antara politik Islam dan negara. Oleh karena itu sejak tahun 1969 HMI pernah mempelopori Pancasila sebagai cita-cita ideologi mereka dan akhirnya mereka menegaskan tentang perlunya kaum muslimin menegaskan komitmennya kepada Islam dalam perspektif nilai-nilainya bukan kelembagaan Islam seperti Ormas dan parpol¹¹⁹

Jika dicermati bahwa sikap politik HMI seperti itu sejalan dengan kalangan nasionalis sekuler yang memperjuangkan negara yang tidak berdasarkan negara Islam. Ketika ideologi negara disusun oleh para pendiri negara kita, penerimaan terhadap

¹¹⁹ *ibid*

Pancasila dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, golongan Islam yang menerima penghapusan Piagam Jakarta itu adalah atas keberhasilan lobi Moh Hatta, hasil kesepakatannya bahwa bila dimaksudkan untuk persatuan bangsa, maka tujuh kata itu diganti dengan ketuhanan yang maha esa dan hal itu merupakan cerminan dari tauhid. Kedua, suhu politik sehari setelah kemerdekaan sangat tinggi, mereka tidak mau suasana yang tidak stabil hanya karena perdebatan yang tidak usai soal kenegaraan, sedangkan negara baru ini butuh segera konstitusi. Ketiga, golongan Islam berharap bahwa setelah enam bulan pasca kemerdekaan akan diadakan pemilihan umum dimana mereka dapat berpartisipasi didalamnya dan mereka yakin akan memenangkan pemilu itu dan konstitusi atau piagam Jakarta dapat diperjuangkan kembali.¹²⁰

Azis Thaba mengklasifikasikan beberapa model hubungan Islam dengan negara era Orde Baru kedalam hubungan yang bersifat antagonistik, resiprokal kritis dan akomodasionis.

3.2. 1. Hubungan yang bersifat antagonistik (1966-1981)

pada awalnya muncul harapan yang besar dari kalangan umat Islam bahwa pemerintahan Orde Baru akan melakukan langkah normalisasi terhadap kekuatan politik Islam yang sempat tergusur selama masa Soekarno misalnya keinginan melakukan rehabilitasi terhadap Masyumi sebagai kekuatan politik umat Islam. Disamping terus digelindingkan isu penerapan syariat Islam sebagai upaya memadukan kembali hubungan Islam dan negara, mendirikan kembali partai politik baru bagi umat Islam. Ide itu diangkat oleh Moh Hatta bersama alumni HMI dan PII dengan nama partai PDII (Partai Demokrasi Islam Indonesia). sementara itu kalangan Muhammadiyah juga ingin

¹²⁰ A. Azis Thaba, *Islam dan Negara, Dalam Politik Orde Baru*, GIP, 1996 hal 156

mengaktifkan kembali Partai Islam Indonesia (PII), sebuah partai politik yang didirikan mereka pada jaman pergerakan.

Namun sejumlah keinginan diatas, tidak ada satupun yang dapat diluluskan pemerintah. Pemerintah Orde Baru mengajukan alasan melalui strategi pembangunan yang akan diterapkan yang menerapkan pembangunan ekonomi, sementara pembangunan politik hanyalah pelengkap yakni untuk menciptakan stabilitas politik. Maka pemerintah menerapkan kebijakan yang kemudian memarginalisasi peranan agama dalam negara. Bahkan pasca Orde Baru berhasil dikonsolidasikan, maka kekuatan politik Islam dilakukan kontrol secara represif karena bagi penguasa saat itu sangat mengkhawatirkan¹²¹ Beberapa aspek penting yang dikhawatirkan penguasa Orde Baru saat itu adalah munculnya radikalisme Islam yang terus berjuang membentuk negara Islam, yang oleh Moertopo sebagai trauma politik masa lalu. Masalah usulan umat Islam terhadap berdirinya partai Islam menanggung kekhawatiran akan kembalinya konflik-ideologis yang sempat muncul pada era Orde Lama serta isu-isu lainnya yang masih menyimpan masalah bagi rezim Orba yang diawalnya didukung oleh kekuatan umat Islam terutama juga oleh HMI. Sikap politik rezim yang dipimpin Soeharto ini sangat mengecewakan salah satu proklamator negeri ini terutama bagi kepentingan partisipasi politik generasi muda seperti HMI dan PII. Menurut Hatta bahwa cita-cita gerakan mendirikan partai PDII adalah sejarah, menurutnya bahwa sejak akhir 1950 an hingga awal 1960 an banyak sekali pemuda dan mahasiswa khususnya HMI dan PII yang kecewa dengan penyelenggaraan negara, dalam masa itu HMI diintimidasi oleh PKI dan antek-anteknya.

¹²¹ *ibid* hal 242-243

3.2.2. Hubungan yang bersifat Resiprokal kritis (1982-1985)

Pada periode ini ditandai dengan saling memahami dan mempelajari posisi masing-masing. Pemerintah melakukan uji coba politik dengan menerapkan asas tunggal Pancasila bagi partai politik dan ormas. Penerapan asas tunggal dilatarbelakangi oleh trauma masa lalu terutama jatuh banggunya Orde lama dalam pemerintahan akibat konflik ideologi. Menurut penguasa Orde Baru bahwa agar kita tidak selalu terhinggapi kerawanan-kerawanan yang menghantui timbulnya perpecahan dan kekacauan dengan kekerasan karena ulah kita sendiri dan hal itu akan merangsang fanatisme kelompok yang sempit¹²²

Asas tunggal bagi HMI merupakan masalah tersendiri dan melahirkan dua kekuatan yang terpecah antara menolak dan mendukung yaitu dengan lahirnya HMI Dipo dan HMI MPO. Dalam kongresnya yang ke 15 (1983) terjadi perdebatan yang alot. Dimana pemerintah hanya akan memberikan izin pelaksanaan kongres kalau akan dapat menerima Pancasila dan bahkan HMI diharap dapat mempeloporinya. Abdul Gafur, menteri Pemuda dan Olahraga, yang juga alumni HMI mempengaruhi peserta untuk dapat menerima asas tunggal. Ketika Gafur memberikan argumentasi perlunya pemuda dibina, maka peserta menjawab dengan tegas bahwa pemuda tidak perlu dibina. Gafur kembali mengatakan secara emosi, kalau tidak dibina, maka generasi muda bisa jadi monyet. Dalam forum itu juga pendiri HMI, Lafran Pane menegaskan bahwa HMI pada dasarnya adalah organisasi perjuangan nasionalis dan baru kemudian Islam¹²³ tetapi mantan Ketua Umum PB HMI, Deliar Noer menegaskan bahwa akan ada implikasi yang luas kalau penerapan asas tunggal tetap dilakukan. Beberapa

¹²² *ibid*

¹²³ Lihat Rusli Karim, *Op Cit* dan Hasanuddin M Saleh, *Op Cit*

argumentasi Deliar adalah akan menafikan pluralisme masyarakat, menghalangi orang yang memiliki kesamaan keyakinan untuk menggolongkan sesamanya. Asas tunggal juga menafikan hubungan antara agama dan politik yang dalam pandangan Islam bertentangan. Hal itu juga menurut ahli ilmu politik pertama Indonesia itu bahwa asas tunggal akan mengarah kepada sistem partai tunggal.

3.2.3. Hubungan yang bersifat akomodatif.

Setelah melalui *political test*, umat Islam dinilai negara telah lulus ujian dan umat Islam semakin memahami kebijakan negara yang tidak akan menjauhkan mereka dari ajaran Islam maka saatnya untuk menggunakan pendekatan akomodatif. Dalam konteks itu pemerintah berusaha membatasi campurtangannya dalam urusan masyarakat. Menurut Azis Thaba, pengalaman pemerintah dengan HMI merupakan faktor penentu. Hubungan ini ditandai dengan kebijakan yang populis bagi umat Islam. Mengeluarkan kebijakan penghapusan berbusana Jilbab, RUU pengadilan agama, pengiriman dai ke tempat transmigran, terbentuknya ICMI, penghijauan di DPR/MPR, kabinet pembangunan VI yang sudah mulai didominasi oleh kalangan Islam khususnya HMI. Pemerintah melalui wapres Soedarmono menyambut baik kehadiran ICMI karena organisasi ini lahir dari kesadaran para cendekiawan muslim sendiri untuk meningkatkan peranan mereka dalam pembangunan. Namun banyak kritis yang dilontarkan tokoh seperti Abdurrahman Wahid yang memandang sebagai sikap yang sekretarian dari umat Islam dan juga Arbi sanit yang menyoroti keterlibatan ICMI dalam politik praktis seperti dominasi di DPR/MPR dan kabinet, Sanit mengatakan bahwa ICMI melakukan *political leverage*¹²⁴

¹²⁴ *ibid* hal 290-293.

3.3. Pemikiran Politik HMI.

Mengkaji dan menelusuri pemikiran-pemikiran politik HMI adalah suatu hal yang tidak mudah, meskipun ketika menyebut HMI orang akan langsung mengidentikkan pemahamannya terhadap organisasi ini dengan dunia politik. Sebab citra diri HMI yang menonjol adalah kuatnya orientasi politik. Menurut Nurcholish Madjid (Cak Nur) bahwa dalam perjuangan menegakkan misi keislaman dan kebangsaan HMI, maka pemikiran kenegaraannya bergerak dalam mainstream yang sebangun dengan perkembangan wawasan HMI itu sendiri. Dalam setiap perkembangan HMI, HMI selalu dituntut untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai anak semua umat Islam. Cak Nur memandang bahwa kesadaran sebagai anak umat itu menumbuhkan perilaku pluralis dan independen dalam pemikiran dan budaya organisasi HMI.

Pola partisipasi HMI didasarkan pada kesadaran ideologis HMI sebagai kader bangsa, dengan pemahaman realitas dan ideologis tertentu terhadap masalah kebangsaan serta harapan HMI terhadap tujuan dan target yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai bangsa yang plural. Harapan dan visi kebangsaan itu juga disesuaikan dengan cita-cita politik HMI sejak didirikannya, berupa partisipasi kecendekiawan dan partisipasi dalam perjuangan membela negara secara fisik. Sedangkan model partisipasi HMI dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan bersifat aktif, sifat partisipasi HMI tercermin dari sikap dan peranan HMI dalam mengkritisi dan bahkan bersifat oposisi terhadap jalannya pembangunan bangsa¹²⁵ Hal ini menurut Cak Nur harus didasarkan partisipasi yang independen baik kedalam umat Islam maupun keluar dalam pergaulannya dengan kelompok-kelompok politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dengan

¹²⁵ Nurcholish Madjid, *Wacana Kenegaraan HMI (Sebuah Pengantar) Mahasiswa dan Wacana Kenegaraan (Kumpulan Rekomendasi Kongres HMI 1971-1999)* hal XVI-XVII

catatan bahwa HMI harus obyektif melihat persoalan pembangunan yang dikritik apakah sesuai dengan agenda-agenda pembangunan yang dibutuhkan masyarakat itu sendiri.

Sebagai konsekuensi dari organisasi yang independen, HMI seringkali harus berhadapan dengan resistensi umat Islam lainnya terutama Masyumi. Dalam penelitian mendalam Greg Barton diketahui bahwa HMI mengalami hubungan tidak mesra dengan Masyumi, meskipun dilihat dari karakter gerakan dan platformnya memiliki kesamaan dengan partai politik umat Islam itu. Barton menilai ada perbedaan mendasar HMI dengan organisasi lainnya yang merupakan anak atau bagian dari partai politik tetapi HMI merupakan organisasi independen, mandiri; terlepas dari tuduhan PKI bahwa HMI adalah anak Masyumi. Independensi HMI ditunjukkan tidak hanya pada penolakannya untuk bergabung dengan partai politik yang ada, melainkan juga oleh cita-citanya untuk menjadi organisasi yang kritis terhadap partai-partai politik yang ada bahkan pada masyumi. Dalam merespon perkembangan politik HMI bukan saja berbeda misalnya ketika terjadi perundingan Renville bahwa HMI mendukung perjanjian politik Indonesia dan Belanda. HMI mendukung konstitusi sekuler (Pancasila) untuk Indonesia sementara Masyumi mendukung konstitusi yang Islami yang merupakan cita-cita politik kebanyakan umat Islam saat itu. Hubungan HMI dengan Masyumi semakin buruk ketika HMI memutuskan sikap politiknya mendukung keempat partai politik Islam (Masyumi, NU, PSII dan Perti)¹²⁶

Pada masa demokrasi terpimpin (1950-1963) itu muncul berbagai persoalan politik khususnya dikalangan umat Islam yang tengah mengalami perpecahan dan

¹²⁶ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neomodernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, Paramadina-Pustaka Antara, Jakarta, 1999 hal 58-61

bahkan rapuh. Sementara itu, terjadi pertarungan pemikiran dan kepentingan antara golongan Islam dengan kaum nasionalis dan komunisme. Oleh kedua golongan itu menuduh umat Islam dan khususnya HMI sebagai kekuatan pembaharunya, sebagai kekuatan yang kontra revolusi, subversif dan anti Pancasila. Namun, berbagai serangan politik itu justru memperkuat soliditas internal HMI sehingga mampu merumuskan berbagai pemikiran yang berguna bagi perkembangan masyarakat Islam maupun masalah-masalah kebangsaan¹²⁷

Sebagai organisasi yang bercorak developmentalis HMI terus berusaha mencapai tujuan-tujuannya dengan bangunan wacana-wacana kebangsaan modern. Ada lima aspek penting yang menjadi wacana penting HMI saat itu yaitu pemikiran politik, pendidikan, agama, ekonomi dan kebudayaan. Sebelumnya, secara umum HMI memiliki pandangan yang jauh kedepan mengenai masalah kebangsaan. Endang Saifuddin Anshari menggarisbawahi ada tiga dimensi yang harus diperhatikan dalam membicarakan komitmen kebangsaan (biasa HMI menyebut keindonesiaan), yaitu, Indonesia sebagai negeri, Indonesia sebagai nasyon dan Indonesia sebagai negara. Dalam menerangkan sebagai negeri, Anshari menerangkan posisi strategis Indonesia yang menghubungkan dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia (Indonesia) dengan puluhan pulau-pulau besar maupun kecil terletak dalam posisi daerah sebagai Zamrud Katulistiwa karenanya Indonesia mempunyai nilai strategis secara ekonomi, politik dan sosial budaya. Sebagai suatu nasyon yang penuh keberagaman suku, agama, adat, bahasa dan sebagainya maka keberadaan HMI sebagai

¹²⁷ Hubungan antara Islam dan kekuasaan yang didominasi kalangan nasionalis (Soekarno) dan komunis memang kurang harmonis karena pada saat yang sama muncul gerakan separatis seperti Republik Maluku Selatan (RMS), Darul Islam (DI/TI), SM Kartosuwiryo di Jawa Barat (1949), Daud Beureueh di Aceh (1953), Kahar Muzakar di Sulawesi pada tahun yang sama. Lihat Agussalim Sitompul, *Pemikiran Kelslaman-Kebangsaan HMI*, *Op Cit* hal 294-295

organisasi Islam perlu memperhatikan pluralisme. HMI harus berperan dalam mewujudkan upaya integrasi nasional¹²⁸

Dalam kaitan dengan penelusuran pemikiran politik HMI, maka akan dijelaskan hubungan aspek agama dan politik. Dalam perspektif agama dapat dilihat dari tafsir asas HMI, yaitu kebenaran Islam memiliki jaminan kesempurnaan sebagai peraturan yang mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat, kemudian tugas utama umat Islam untuk memikul tugas suci (*mission sacre*) untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Pandangan Agusssalim dan Barton memiliki kesamaan dalam pandangan ideologi keagamaan bahwa HMI sejak awal mendukung Pancasila sebagai ideologi. Kewajiban umat Islam adalah mengisi kemerdekaan dan HMI sebagai kader dan pengemban masa depan umat Islam merumuskan agenda-agenda kemanusiaan karena mahasiswa Islam dipandang sebagai elemen yang paling sadar sebagai kader umat dimasa depan. Nilai dasar Perjuangan (NDP) tentang keterpaduan iman, ilmu dan amal telah dijelaskan Ismail Hasan (Ketua Umum PB HMI) tahun 1958, aspek-aspek dalam NDP itu harus menjadi spirit HMI dalam perjuangannya. Menurutnya HMI harus memiliki keyakinan moral, keilmuan yang tinggi dan mempunyai daya kreatif yang tinggi.¹²⁹

HMI merupakan organisasi yang moderat sehingga selalu dapat menyesuaikan diri dengan realitas politik yang harus dihadapinya. Dalam posisi yang moderat seperti itu, maka mencoba mengisi ruang dimana umat Islam tengah mengalami marginalisasi dan bahkan kemandekan politik. Bahkan HMI mencoba menyelesaikan persepsi kekuasaan yang dipandang dapat mengusik basis kebangsaan. Negara pada sisi lain,

¹²⁸ Lihat Ade Komaruddin dan M. Fauzie, (ed) HMI Menjawab Tantangan Zaman, 1990.

¹²⁹ Lihat Agusssalim Sitompul, *ibid* hal 297

berusaha untuk menghalangi dan melakukan domestikasi terhadap gerak ideologi politik Islam. Dalam posisi Islam politik yang mengalami kelemahan dalam kehidupan kenegaraan seperti itu, maka HMI melakukan kaderisasi secara luas sehingga diharapkan akan lahir generasi baru muslim yang dapat mengisi struktur kekuasaan negara dikemudian hari.

Sementara itu pada posisi Islam yang dihadapkan dengan persepsi tentang adanya usaha-usaha "mengkomunuskan" Indonesia, dimana Soekarno berkeinginan membentuk kabinet gotong royong yang melibatkan PKI didalamnya, HMI pun menyerang secara kritis dengan menuntut perlunya ditegakkan kembali Piagam Jakarta, dimana Islam dijadikan sebagai dasar negara. Secara resmi hasil Kongres ke 5 HMI di Medan, 1957 mengeluarkan keputusan menuntut tegaknya negara Islam di Indonesia, tuntutan itu berkaitan dengan momentum situasi konstituante yang bersidang menentukan dasar negara pengganti UUDS 1950.¹³⁰

3.4. Asal Usul Pemikiran Politik HMI

Menurut Agussalim Sitompul bahwa ada dua faktor penting yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran-pemikiran HMI di bidang politik. *Pertama*, terkait dengan penjajahan bangsa-bangsa Barat di Indonesia dan kemerdekaannya bahwa kemerdekaan bangsa kita mutlak dikembalikan kepada pewaris sah kemerdekaan itu yakni bangsa Indonesia sendiri, ternyata penjajahan membawa malapetaka bagi bangsa. HMI memandang bahwa jika negara Indonesia masih dijajah Belanda, maka kedaulatan rakyat perlu ditegakkan. Saat itu nampaknya dominasi kekuasaan Belanda masih kokoh

¹³⁰ Usulan HMI kali ini memiliki kesamaan dengan perjuangan partai-partai Islam seperti Masyumi, NU, PSII dan Perti, argumentasi dasarnya adalah universalitas Islam bahwa jika usulan dikabulkan, maka akan menjamin pluralisme agama, suku dan kesamaan derajat bangsa Indonesia.

dan kuat. Apalagi penjajahan itu bukan saja secara fisik tetapi juga secara kerohanian (misalnya kedatangan misi jending bersamaan dengan penjajahan Belanda). Negara kita menurut HMI harus berdiri sejajar di tengah negara-negara lainnya didunia. *Kedua*, pemikiran politik HMI kedua adalah terungkap ketika Dies Natalis I HMI di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, 6 Pebruari 1948, dalam pidato wakil ketua PB HMI, Ahmad Tirtosudiro ditegaskan bahwa:

Bahwa didasarkan pada ilmu pengetahuan sejarah kemasyarakatan disimpulkan bahwa bagi bangsa dan negara hanya satu bentuk yang tepat yaitu harus sesuai dengan sifat keadaan dan jiwa masyarakat kita, maka perlu dipikirkan sedalam-dalamnya tentang segala dogma dan teori yang bersifat wetenschappelijk. Hal itu akan mengubah struktur masyarakat Indonesia.¹³¹

Di akhir pidatonya, Tirtosudiro berujar bahwa mahasiswa Indonesia diharapkan memperhatikan fungsi sosialnya sebagai mahasiswa yang menceburkan diri dalam masyarakat dengan berpedoman pada adagium yang mengatakan bahwa "seorang politikus yang tidak mengetahui sisiologi, serupa nahkoda yang buta mengemudikan kapal dengan tiada mengetahui jalannya ombak dan adanya karang hingga menjadi korban."

Ketika HMI berhadapan dengan kaum komunis, PKI adalah gerakan komunisme radikal di Indonesia, HMI dibawah pimpinan Soelastomo berusaha bersikap akomodatif terhadap gagasan-gagasan manifesto politik Soekarno yang dikenal Nasakom. A Dahlan Ranuwihardjo sebagai senior HMI saat itu, yang menyaksikan langsung berbagai upaya pengayangan dan pembubaran HMI oleh terutama PKI, maka hati nuraninya mengatakan perlunya ia menjelaskan langsung kepada Bung Karno dan memohon agar tidak membubarkan HMI dan membawa HMI ke garis politik revolusioner Soekarno.

¹³¹ Agussalim Sitompul, *Op Cit* hal 306-307

Untuk melaksanakan gagasannya itu, nampaknya Dahlan menggunakan strategi tersembunyi. Diantara teman senior Dahlan nampaknya kurang mendukung dan mendorong HMI tegas dan konsisten seperti Masyumi dan GPII menolak Pancasila dan Manipol lainnya. Dahlan optimis bahwa target bertemu Soekarno akan berhasil dan didiskusikan secara mendalam yang dikenal dengan ikrar gunung puyuh yang berangkat dari teori *Bread front* (front lebar) yang memandang bahwa jika HMI dibubarkan Soekarno, maka potensi HMI akan memperkuat barisannya seperti juga DI/TII dan separatisme lainnya.

Dalam pertemuan Dahlan Ranuwihardjo yang dibantu Ruslan Abdul Gani (Menko Penerangan) pada 3 Juli 1964 dengan presiden Soekarno di istana merdeka, maka disepakati beberapa hal.¹³²

1. Diri saya (Dahlan Ranuwihardjo) ditugaskan untuk membersihkan HMI dari unsur-unsur kontrarevolusioner.
2. HMI diakui sebagai alat revolusi dan akan menerima bimbingan langsung dari Soekarno dalam Kursus Kader Revolusi.

Menurut pengakuan Ranuwihardjo bahwa hasil pertemuan penting senior HMI dengan presiden Soekarno itu dipandanginya sebagai political deal (perjanjian politik) dengan pemimpin besar revolusi itu, dan membersihkan HMI hari bekas anggota GPII. Disamping bagaimana HMI tetap menjadi kekuatan yang mendukung dasar negara Pancasila dan Nasakom. Soekarno akan memberikan kebebasan bagi HMI untuk terus melakukan kaderisasi dan pendidikan politik kepada anggota-anggotanya dalam training khusus yang disebut dengan Kursus Kader Revolusi. Disamping itu juga disertai dengan keluarnya keputusan presiden (kepres) yang berisi penertiban terhadap HMI. Hasil lobi

¹³² A Dahlan Ranuwihardjo, *Bung Karno dan HMI. Dalam Pergulatan Sejarah, Mengapa Bung Karno Tidak Membubarkan HMI?*, Intrans, 2002. (Viva Yoga, editor). hal 33-37

politiknya itu dianggap sebagai pertanda HMI akan memenangkan perang melawan lawan-lawan politik, dan sejarah membuktikan bahwa HMI lah sebagai pemenangnya.

Pada sisi lain, HMI tetap eksis dan mampu mengatasi aksi-aksi penggayangan terhadap HMI, bukan saja karena adanya deal politics antara Dahlan Ranuwihardjo-Soekarno tetapi juga berkat perjuangan PB HMI, para aktivis HMI disemua jajarannya, Badko, Pengurus Cabang, Pengurus Rayon, Komisariat, Kohati, lembaga-lembaga khusus seperti LDMI, LAPMI dan lainnya yang semuanya bertekad bahwa jiwa dan kejuangannya untuk mempertahankan HMI.¹³³

Sejak awal dasawarsa 1970 an dan 1980 an, kita menyaksikan munculnya intelektualisme baru yang dipelopori oleh HMI. Menurut Effendi bahwa paling tidak ada tiga bidang pemikiran yang memiliki andil besar dalam mengubah intelektualisme dan aktivisme politik Islam lama, yakni pembaharuan pemikiran Islam, pembaharuan politik dan birokrasi serta transformasi sosial. Masing-masing aliran dalam gerakan HMI melakukan gerakan pembaharuan secara serentak. Bidang pembaharuan pemikiran menekankan pada pentingnya Islam berperan, khususnya ketika berhadapan dengan dinamika jaman yang terus berubah. Kelompok HMI yang consern dalam birokrasi menegaskan bahwa komunitas Islam harus ikut serta dalam proses kehidupan politik atau birokrasi negara. Sedangkan kelompok kultural terus melakukan pemberdayaan masyarakat sampai lapisan akar rumput. Agar masyarakat, apabila telah mengalami proses pemberdayaan secara ekonomi dan politik, mereka bisa mendukung sebuah

¹³³ *ibid.* hal 55.

konstruksi masyarakat Islam yang menitikberatkan pada nilai-nilai keadilan, persamaan dan musyawarah, Pancasila¹³⁴

Transformasi pemikiran politik HMI itu nampaknya direspons positif oleh negara, sehingga sejak akhir dasawarsa 1980 an, telah mulai terjadi akomodasi yang signifikan oleh pemerintah terhadap aspirasi politik umat Islam. R William Liddle¹³⁵ mengatakan bahwa tokoh HMI, Nurcholish Madjid mengatakan *Islam yes, partai Islam no*, adalah merupakan semboyan yang tepat untuk menggambarkan peran golongan Islam dalam sebuah pemerintahan Indonesia yang demokratis, efektif dan stabil. Golongan Islam berjuang bukan lewat kepartaian sebagaimana Islam Orde Lama, tetapi berjuang lewat organisasi-organisasi sosial yang memperjuangkan kepentingan dan visi mereka (HMI) di berbagai arena politik, termasuk badan legislatif dan birokrasi.

3.5. **Pembaharuan Pemikiran Islam dan Dampaknya bagi Pemikiran Politik HMI.**

Dalam disertasinya, Greg Barton mengkategorikan pemikiran Nurcholish Madjid kedalam tiga aspek. (1) pembaharuan pemikiran Islam. (2) Islam dan masyarakat modern-industrial dan (3) Islam dan hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan. Dalam rangka menyusun kebijakan-kebijakan HMI diawal Orde Baru, Madjid banyak menyebarkan tulisannya diberbagai media maupun forum ilmiah. Menurut Barton Madjid menjabarkan gagasan pembaharuan pemikiran Islam kedalam pemikiran-pemikiran yang operasional sebagai berikut;

¹³⁴ Lihat Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam (Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi)*, Galang Press, Yogyakarta, 2001. hal 91-93

¹³⁵ *Kompas* 7 Februari 1990

Pentingnya prinsip-prinsip moral yang abadi, dibalik peradaban besar dan kekuatan persenjataan yang lengkap dan kemakmuran adalah sesuatu yang sangat kuat, tersimpan gagasan-gagasan besar dan sistem pemikiran yang unggul, tanpa itu peradaban akan mengalami kematian. Selanjutnya dengan meminjamkan konsep Hamka, Madjid menegaskan bahwa Pancasila sebagai bilangan 10.000 (sepuluh ribu), dimana angka 1 merupakan perumpamaan sila pertama, ketuhanan yang maha esa, dan angka nol berikutnya merupakan ialah sederetan angka nol belaka dan betapa panjangnya angka nol itu tetap tidak berarti, tetapi ia akan berarti kalau ditambah angka 1 didepannya.

Madjid mengatakan bahwa simanya prinsip ketuhanan berarti akan melahirkan sekularisme dan seorang sekuler yang konsekuen adalah ateis. Dalam konteks Islam yang paripurna bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan dunia politik, dan meminjam HJ Benda bahwa pemisahan agama setidaknya-didaknya dikatakan tidak realistis dan pemisahan agama dan politik adalah gejala sementara Islam yang sedang mengalami kemunduran.¹³⁶

Rasionalitas dan rasionalisme, menurut Madjid bahwa Islam menjunjung tinggi dan menganjurkan rasionalitas. Rasionalitas lebih menekankan sistem pemikiran dan pedoman hidup yang didasarkan dunia materialistik. Sedangkan rasionalisme adalah ajaran tertentu. Madjid selalu berulang-ulang menekankan pada rasionalitas, iman yang keduanya bekerja dimana yang satu didunia temporal dan lainnya didunia transenden. Konsep ini nampaknya berkembang menjadi kerangka Nilai Dasar Perjuangan (NDP)

¹³⁶ Lihat Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia, Pemikiran Neomodernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, Paramadina-Pustaka Antara, Jakarta, 1999 hal 89-91

HMI. Secara lebih konstruktif, Madjid menyusun tahap pertumbuhan pemahaman. Naluri, Panca indera, Rasionalitas dan Wahyu.

Rasionalitas dan Humanisme (ateis), berkaitan dengan masalah ini, Madjid memfokuskan kajiannya pada ideologi-ideologi lama yang menjadi musuh modernisme Islam; westernisasi, liberalisme dan komunisme. Madjid mengajukan penolakan terhadap liberalisme bahwa Islam menganjurkan kebebasan individu dan kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan lainnya. Menurutnya bahwa kebebasan individu yang mutlak sebagaimana paham liberalisme kapitalisme akan melahirkan kerugian secara sosial dan bagi kelangsungan kehidupan manusia¹³⁷

Pelajaran dari Masa lalu-peran para intelektual, pelajaran berharga bagi masa lalu Indonesia dapat diambil dari demokrasi terpimpin dimana demokrasi semakin hari semakin menjadi pelayan Soekarno dan melalui Soekarno melayani komunisme. Masa transisi waktu itu bagi Madjid merupakan bahan pelajaran kaum intelektual bagi model demokrasi dimasa depan. Madjid memandang modernisasi itu penting, misalnya politik etis Belanda memberikan masukan positif bagi perkembangan Indonesia modern, disamping membawa dampak negatif bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Nurcholish Madjid memandang bahwa perjuangan untuk kepentingan umat Islam perlu mendapatkan peranan yang lebih besar dan karena itu umat khususnya HMI harus banyak belajar dari manapun¹³⁸

Perkembangan pesat terhadap penyebaran Islam ternyata tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai, Madjid meresahkan mengapa organisasi Islam mengalami keruntuhan model gerakannya ketika Islam sebagai agama dan sebagai kumpulan ide-

¹³⁷ *ibid* hal 92-94.

¹³⁸ *Ibid* hal 98-99

ide yang sedang mengalami kemajian?. Menurutnya bahwa hal ini terjadi karena disamping organisasi Islam itu mengalami masturbasi juga partai-partai Islam mengalami kehilangan kepercayaan umatnya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan keharusan pembaharuan pemikiran Islam, dimana gagasan-gagasan dinamis dapat dikembangkan. Langkah ini diperlukan melalui tiga proses yang saling terkait. Sekularisasi, Kekebasan Intelektual dan gagasan mengenai kemajuan dan sikap terbuka.

Menurut Deliar Noer bahwa kaderisasi HMI diarahkan kepada upaya melahirkan cendekiawan ulama dan ulama cendekiawan dalam kehidupan masyarakat dna bangsa Indonesia. tetapi sebagai negara yang baru merdeka, maka harapan untuk ikut menikmati kekuasaan politik kemudian menjadi godaan yang sama kuatnya baik bagi organisasi keagamaan maupun politik. Seperti halnya organisasi lainnya HMI pun terseret kedalam orbit kekuatan politik demikian. Apalagi pasca kejatuhan Soekarno yang dipandang tertutup bagi munculnya Islam politik. Menurut Victor Tanja bahwa seperti organisasi Islam lainnya, HMI memulas wajahnya sehingga menjadi lebih menyerupai pusat kekuasaan politik dan ketika presiden Soekarno telah terlempar dari kekuasaannya, maka terjadi kebangkitan kembali kebebasan pribadi yang terpasung, pluralisme yang diakui sebagai ukuran nasional untuk mencapai cita-cita sosial dan kebebasan pribadi dibenarkan oleh pemerintah baru sebagai dasar modernisasi¹³⁹

Bagi HMI yang merupakan organisasi mahasiswa terbesar, menghadapi dua kendala dalam pergerakannya. *Pertama*, keanggotaan yang besar merupakan petunjuk bahwa kaum cendekiawan muda muslim masih banyak yang konsisten dengan moral

¹³⁹ Lihat Victor Tanja, *HMI, Sejarah dan Kehidupannya di Tengah Gerakan-Gerakan Islam Pembaharu di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1982. hal 114-117

agamanya. *Kedua*, terdapat kemungkinan untuk mempolitisasi terhadap watak dasar organisasi sebagai wadah perkaderan dan keagamaan. Jika menjadi boneka kekuasaan maka ia tidak dapat melaksanakan fungsi dan misi pembaharuannya. Untuk memecahkan masalah ini, Deliar Noer¹⁴⁰ menganjurkan agar HMI harus tetap konsisten mendidik para anggotanya untuk menempatkan politik dalam hubungannya yang sebenarnya terutama dalam mencetak pemimpin-pemimpin bangsa dengan berbagai keahliannya agar menjadi kekuatan intelektual bangsa. Secara lebih kongkrit, Nurcholish Madjid memandang politik sebagai seni untuk memberi dan menerima, tidak seperti pandangan kalangan politisi Islam yang menjadikan gagasan-gagasan mereka sebagai tujuan besar politik Indonesia¹⁴¹

3.6. HMI dan Pembangunan Politik.

HMI sebagai sumber insani pembangunan bangsa, nampaknya terus mengembangkan pemikiran-pemikirannya khususnya terkait dengan pembangunan politik di Indonesia. Pada Kongres X HMI yang memilih Akbar Tanjung sebagai Ketua Umumnya, terdapat beberapa rekomendasi penting. Pasca pemilu 1971 antusiasme politik pemerintah dan rakyat Indonesia mengalami penurunan sehingga menimbulkan kesan sementara bahwa "*politik no, pembangunan yes.*" HMI memandang bahwa antara pembangunan politik dan ekonomi suatu bangsa harus berjalan saling menopang satu sama lainnya. Indikator kenaikan GNP Indonesia perlu diimbangi dengan pembangunan politik, khususnya pemerintahan.

¹⁴⁰ Deliar Noer adalah mantan Ketua Umum PB HMI dan doktor ilmu politik pertama Indonesia dan alumni Universitas Nasional (UNAS).

¹⁴¹ Victor Tanja, *Op Cit*, hal 119

Meskipun, untuk menjamin pemerataan pembangunan dibutuhkan *strong government* dan *clean government*. Sikap politik HMI seperti itu nampaknya ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar dalam lembaga legislatif DPR baik ditingkat pusat maupun daerah. Adalah sikap yang ambigu ketika HMI mengharapkan sistem demokrasi dapat terwujud adanya kontrol yang efektif, oleh mesin politik sangat dominan? HMI juga menuntut adanya perubahan struktur politik (khususnya masalah kepartaian).¹⁴²

Dalam pandangan HMI awal dekade 1970 an bahwa diperlukan pembaharuan struktur politik yang dapat ditempuh melalui dua pendekatan. Sistem mobilisasi (*mobilition system*) dan sistem rekonsiliasi (*reconsiliation system*), sistem mobilisasi diajukan HMI dengan meniru perkembangan penting dalam sistem politik RRC yang memang menggunakan sistem partai tunggal. Sedangkan model yang kedua adalah sebagaimana dipraktekkan negara-negara di Eropa Barat dalam membangun ekonomi dan demokrasinya. Oleh karena itu dalam kasus pembaharuan struktur politik Indonesia, HMI mengusulkan beberapa tindakan strategis menciptakan prakondisi kearah itu. (1) penyederhanaan partai politik dengan memfungsikan partai-partai politik secara wajar. Fungsionalisasi Golkar sebagai lembaga pendukung pembangunan nasional. Di samping juga HMI mengajak komponen bangsa saat itu untuk melakukan pembinaan *floating mass* agar pembangunan menjadi lebih *favourable* bagi pembinaan karakter bangsa.¹⁴³ Berkaitan dengan masalah Golkar, HMI bersikap mendua, disatu sisi mendukung eksistensinya, tetapi menuntut ketegasan fungsi Golkar sebagai partai politik, sebagai

¹⁴² Lihat Hasil-Hasil Kongres X HMI, Palembang, 3-10 Oktober 1971.

¹⁴³ Rekomendasi HMI, *ibid*.

golongan karya dan juga bertindak sebagai partai pemerintah dan menjadi bagian dari aparaturnya pemerintahan itu sendiri.

Seiring dengan peningkatan kesadaran politik masyarakat pada pertengahan tahun 1970 an dan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai, HMI mencermati adanya peningkatan partisipasi politik segenap kelompok-kelompok masyarakat. Merespons perkembangan itu, HMI menuntut adanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat yakni dengan adanya pemerintahan yang kuat dan bersih. Hasil Kongres HMI ke XII dengan jelas mengharapkan pelaksanaan demokrasi politik. Pemikiran politik HMI menyangkut demokrasi politik adalah seluruh usaha timbal balik, baik pemerintah maupun kelompok masyarakat, untuk memberikan peranan maksimal dan adil terhadap pranata politik resmi dan organisasi sosial yang hidup ditengah masyarakat. Disini HMI memaknai dinamika politik nasional dengan memandang pentingnya kebersamaan dan pluralisme¹⁴⁴ HMI sebaliknya menolak monolitisme dalam kehidupan politik yang tidak relevan bagi penciptaan budaya politik demokratis yang sedang dibangun.¹⁴⁵

HMI tidak memandang demokrasi politik itu sebagai faktor yang independen, tetapi merupakan satu konsep yang menyeluruh dengan aspek-aspek demokrasi lainnya, seperti demokrasi politik, demokrasi pendidikan, demokrasi sosial budaya, demokrasi hukum dan ekonomi. HMI mencontohkan hubungan antara kesenjangan ekonomi dengan bagaimana hukum itu ditegakkan (rule of law). Selain itu juga HMI menyoroti pentingnya pembukaan ruang publik dalam proses penentuan kebijakan menyangkut hajat hidup orang banyak. Secara jauh ke depan, sekitar tiga dekade lalu, HMI telah

¹⁴⁴ Istilah yang trend saat itu adalah kegotong royongan dan bhinneka tunggal ika.

¹⁴⁵ Lihat Akbar Tanjung, dkk, *Mahasiswa dan Wacana Kenegaraan (Kumpulan Rekomendasi Kongres HMI 1971-1999)*, Fosal PB HMI, Jakarta, 2002. hal 25-28

menyikapi agar lembaga legislatif dapat berfungsi maksimal agar wakil rakyat itu dapat melaksanakan kehendak rakyat, dengan menyelesaikan berbagai masalah sosial dan politik. Disamping peranan legislatif itu dapat terkontrol dan akuntabel tetapi sekaligus sebagai proses pendidikan politik¹⁴⁶.

¹⁴⁶ Lihat Hasil Kongres XII HMI di Ujung Pandang, 9-11 Februari 1979



BAB IV

SISTEM PERKADERAN HMI

Dalam kehidupan kebangsaan di Indonesia, HMI dikenal sebagai lembaga kemahasiswaan yang mampu melahirkan kader-kader bangsa diberbagai bidang, terutama di lembaga eksekutif dan legislatif. Sebelum mengarah kepada pokok bahasan inti mengenai kaderisasi HMI dalam mengisi struktur kekuasaan di Indonesia, maka diperlukan penjelasan tentang bagaimana perkaderan HMI dilakukan, arah, program dan kurikulum perkaderannya sehingga mampu melahirkan kader-kader bangsa yang berkiprah di pusat-pusat kekuasaan negeri ini.

Ada tiga kekuatan kunci saling bertaut yang telah mampu menciptakan HMI begitu memukau; masing-masing latihan kader (LK), tradisi intelektual dan independensi. Ketiga kekuatan itu merupakan kesatuan tidak tercerai dan utuh, elemen-elemen pokok yang saling tunjang-menunjang dalam membangun basis perkaderan HMI yang tangguh. Lewat bahasa HMI menurut N. Tahqiq, ketiga unsur tersebut ditujukan demi mencapai tujuan HMI, "Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernapaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT". Melalui metode itu HMI dipertimbangkan sebagai gerakan pembaharu¹⁴⁷

Rumusan tujuan HMI yang tetap sama sepanjang masa ini dipandang sebagai semacam sebuah ayat suci bagi setiap kader HMI. Siapa saja yang merasa sebagai kader

¹⁴⁷ Lihat Nanang Tahqiq, *Bye Bye HMI, dalam HMI, Beban Sejarah Bagi Kadernya?*, M. Wahyuni Nafis dan Rifki Mochtar (ed), Fosal PB HMI, 2002. hal 77

HMI, baik yang kini masih sebagai anggota ataupun yang telah alumni, tujuan HMI telah menjadi semacam cita-cita perjuangan mereka yang intrinsik kedalam semangat untuk membangun diri, masyarakat, bangsa dan negaranya¹⁴⁸ Sebagai organisasi perkaderan HMI meletakkan arah pencapaian tujuannya pada terciptanya insan berkualitas lima dengan tujuh belas kualitas yakni. *Pertama*, insan akademis (berpendidikan tinggi, mampu berpikir kritis dan rasional), *Kedua*, insan pencipta, kader HMI dituntut agar mampu melahirkan gagasan dan kreativitas serta dapat menerjemahkan ajaran Islam dalam konteks kekinian dan keIndonesiaan. *Ketiga*, sebagai insan pengabdian, kader HMI harus mampu berkarya yang berguna bagi umat dan bangsa. *Keempat*, Insan yang bernafaskan Islam yaitu berpedoman pada Al Quran dan Al Hadist. Untuk mencapai tujuan itu, maka HMI menyelenggarakan perkaderan berjenjang, mulai dari Basic Training (LK I), Intermediate Training (LK II) hingga Advance Training (LK III)¹⁴⁹

4.1. Lahirnya HMI Sebagai Organisasi Kader.

Dari berbagai sumber yang menjelaskan sejak kapan HMI memulai dengan model perkaderan yang modern. Menurut sumber-sumber HMI diketahui sejak diselenggarakannya *International Center For Advance Study and Training*, di India pada pertengahan juli 1959, oleh *World Association of Youth (WAY)* yang diikuti oleh berbagai negara, termasuk Indonesia yang diwakili oleh Aisyah Amini dan Soedan yang keduanya mewakili HMI meskipun Soedan mewakili GPII. Dalam pelatihan bagi calon-

¹⁴⁸ Pengakuan ini pernah disampaikan oleh Dr. Harry Azhar Azis, dalam Orasi Ilmiah Pelantikan PB HMI Periode 2003-2005, *Membangun Kembali Keadilan dan Kesejahteraan*, 12 November 2003.

¹⁴⁹ Sidratahta, *Membedah Gerakan Koorporatisme HMI*, makalah yang ditulis menjelang Kongres ke 21 di Yogyakarta, 1997 dan merupakan kutipan dari buku *Panduan Perkaderan HMI*.

calon pemimpin pemuda yang dikenal dengan ALOKA itu merupakan salah satu pelatihan UNESCO. Dua peserta Indonesia yang mengikuti ALOKA terinspirasi untuk mengembangkan model pelatihan atau kaderisasi bagi HMI, yang pertama kali dinamakan dengan Pendidikan Dasar.¹⁵⁰

Namun pembicaraan awal masalah perkaderan HMI dimulai pada konferensi HMI di Taruna Giri, Puncak Bogor, yang diadakan akhir juli 1959. konferensi HMI waktu itu melahirkan konsep pendidikan kader HMI yang dinamakan *Pendidikan Dasar*. Pada tingkat nasional ditetapkan untuk mengadakan *training centre, workshop, kursus menulis* dan sebagainya. Sedangkan perkaderan ditingkat cabang HMI difokuskan pada kegiatan-kegiatan ilmiah seperti ceramah, diskusi-diskusi, seminar, simposium serta penelitian (riset). Menurut sejarawan HMI, Agussalim Sitompul bahwa konsep pendidikan dasar hasil konferensi Taruna Giri itulah yang dikembangkan sehingga terbentuk pola perkaderan HMI sampai sekarang ini.¹⁵¹

Sesuai dengan tuntutan perubahan organisasi, perkaderan HMI pun mengalami perkembangan dan perubahan melalui institusi pengambilan keputusan yaitu mekanisme Kongres HMI. Salah satu langkah modernisasi perkaderan dapat dilihat dalam hasil Kongres ke-17 tahun 1988 dengan membentuk Lembaga Pengelola Latihan (LPL). Substansi perubahan-perubahan itu menyangkut sistem penjenjangan training, metode perkaderan, kurikulum, silabus, instruktur, sistem evaluasi/penilaian. Sebelum itu juga telah banyak usaha-usaha perbaikan sistem perkaderan HMI melalui berbagai kegiatan misalnya Seminar Nasional Metode Training di Kaliurang tahun 1963. pada tahun 1967 diselenggarakan seminar perkaderan dan senior course di Pekalongan. Seminar kader

¹⁵⁰ Lihat Soe'dan, *International Centre for Advance Study and Training World Assembly of Youth*, PB HMI, 1959

¹⁵¹ Agussalim Sitompul, *Op Cit* hal 258

nasional diadakan di Jakarta. Lokakarya perkaderan di Kaliurang, seminar yang sama diadakan di Surabaya (1983) dan Mataram (1986).

HMI adalah organisasi kader dan sifat kekaderan HMI dapat dipahami dari status HMI sebagai organisasi mahasiswa. Secara fungsional HMI adalah organisasi yang melakukan proses perkaderan secara sistematis dan terencana. Selain mendapatkan kaderisasi dari perguruan tinggi atau universitas dengan spesialisasi jurusannya, kader-kader HMI juga banyak menimba ilmu melalui proses kaderisasi di HMI baik yang berjenjang seperti LK I, LK II dan LK III maupun melalui perkaderan nonformal seperti Kursus Ideologi dan Strategi dan taktik (SESKO), manajemen organisasi dan sebagainya. Disamping kader-kader HMI melakukan ideologisasi melalui pengkajian Nilai Dasar Perjuangan (NDP) melalui tahapan baik sebagai materi utama dalam basic training maupun follow up nya misalnya up grading instruktur NDP dan kolokium pembaharuan pemikiran Islam¹⁵²

Menurut Soerjadi (Mantan Ketua Umum PP GMNI) bahwa kaderisasi adalah proses yang digerakkan secara sadar untuk meningkatkan kualitas anggota agar memenuhi kualifikasi tertentu yang diharapkan. Melalui proses kaderisasi antara lain anggota organisasi diharapkan mengenal, memahami dan menghayati nilai-nilai tertentu yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai organisasi yang hidup dan terus berkembang di tengah-tengah masyarakat HMI tentunya tidak lepas dari kaderisasi. Bahkan menurutnya sebagai orang luar (outsider)

¹⁵² Diolah dari beberapa sumber resmi HMI dan sumber sejarahnya.

menilai bahwa HMI memiliki sistem dan kesinambungan pendidikan kader yang paling baik diantara organisasi ekstra universitas yang ada di Indonesia.¹⁵³

4.2. Sistem Perkaderan HMI, Arah, Metode dan Materinya.

Dalam refleksi sejarah HMI menghasilkan kesimpulan bahwa perlu dilakukan pembenahan arah gerak HMI dengan melakukan penataan sistem perkaderan. Sebagai organisasi yang menghimpun anggota secara sukarela, posisi perkaderan sangat menentukan. Melalui sistem perkaderan paling tidak terbentuk identifikasi anggota terhadap HMI dan diharapkan adanya proses peningkatan kualitas anggota sebagaimana tuntutan idealisme organisasi. Hasanuddin M.S. memasukkan adanya kondisi eksternal pada akhir 1970 an yang mendorong dan berpengaruh signifikan terhadap perlunya penataan perkaderan HMI. *Pertama*, terhadap tuntutan kepekaan mahasiswa teradap realitas sosial yang semakin terancam oleh pemberlakuannya kebijakan NKK/BKK, sementara sebenarnya mahasiswa tetap menginginkan adanya integrasi antara mahasiswa dan kehidupan sosial dimana mahasiswa menempatkan diri sebagai kekuatan pengontrol, tetapi pemerintah Orde Baru bertekad untuk memarginalkan posisi dan peran politik mahasiswa. *Kedua*, suasana antusiasme berIslam kalangan muda yang menghendaki HMI lebih mengenal dengan dimensi keIslamannya.¹⁵⁴

¹⁵³ Lihat Soearjadi, *Kontribusi Pengkaderan HMI dalam Mendukung Komunikasi dan Harmonisasi Gerakan Organisasi Mahasiswa Ekstra Universitas*, Seri Pustaka Kepemudaan, Jakarta, 1997

¹⁵⁴ Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hasil lokakarya perkaderan di Surabaya menghasilkan pedoman perkaderan yang mulai diberlakukan secara formal tahun 1983. namun hasil itu merupakan revisi dari lokakarya sebelumnya di Kaliurang tahun 1975. yang kemudian disahkan melalui kongres XII di Semarang setahun sesudahnya. Hasanuddin M. Saleh, *HMI dan Rekayasa Asas Tunggal*, Op Cit hal 104-105 lihat juga *Pedoman Perkaderan HMI Hasil Lokakarya Perkaderan Nasional* di Surabaya, 1983 oleh PB HMI.

Dalam pedoman perkaderan tahun 1984 dipandang lebih berorientasi keIslaman, hal itu terlihat dari penegasan didalamnya bahwa sebagai organisasi mahasiswa yang berdasarkan Islam, HMI meletakkan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber pada Al Quran dan Al Sunnah pada tempat utama dan berwibawa bagi sistem perkaderannya. Dalam sistem pendidikan Islam yang menempatkan tujuh elemen dasar konsep-konsep yaitu konsep agama, manusia, masyarakat, keadilan, akhlak dan sekolah. Keseluruhan konsep itu merupakan satu-kesatuan bangunan dasar sistem pendidikan yang diterapkan juga oleh HMI.

Perkaderan HMI adalah proses upaya organisasi untuk mengaktualisasikan potensi manusia bagi para anggota HMI sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka meningkatkan kualitas dirinya menjadi kader yang memiliki kemampuan serta kesediaan menghayati, mengamalkan dan mengembangkan dalam dimensi kemasyarakatan, kebangsaan dan negara. Hal itu berarti perkaderan HMI pada dasarnya merupakan usaha meningkatkan kualitas kader HMI yang meliputi pengetahuan, sikap dan ketrampilan secara menyeluruh dalam menghadirkan kekhalifaan menjadi rahmat bagi lingkungannya¹⁵⁵

Tampaknya HMI menghendaki proses perkaderan akan melahirkan tipe ideal yaitu duta-duta pembaharu, penyuar ide progres, insan berkepribadianimbang dan padu, kritis, dinamis, adil dan jujur serta tidak takabur dan menjadi sosok kader yang takwa kepada Allah SWT. Berkaitan dengan materi perkaderan yang diberikan dalam perkaderan HMI didominasi oleh materi keIslaman. Materi-materi itu meliputi keIslaman, ideologi (NDP), Ke HMI an, Keorganisasian, kekaryaan, kepemimpinan,

¹⁵⁵ *Ibid* hal 106

sejarah Islam, filsafat ilmu, perguruan tinggi dan kemahasiswaan, studium general serta strategi dan taktik¹⁵⁶

Eksistensi suatu organisasi apapun, apalagi lembaga-lembaga kemahasiswaan sebagai sumber rekrutmen kepemimpinan bangsa di masa depan, pasti memerlukan kader. Kader adalah anggota inti organisasi, mereka ini adalah ujung tombak dan penggerak organisasi. Karenanya mereka harus memiliki pandangan, visi dan ideologi organisasi tersebut. Sebagaimana disebutkan pada bahasan sebelumnya bahwa setiap kader memerlukan sosialisasi politik dan pendidikan politik. Dalam konteks kader HMI merumuskan sebagai tulang punggung organisasi, pelopor, penggerak, pelaksana dan penyelamat cita-cita HMI masa kini dan mendatang dimanapun berada, dengan tetap berorientasi kepada asas syariat Islam.

Berdasarkan konsepsi diatas, setidaknya terdapat beberapa ciri yang harus terintegrasi dalam diri setiap kader HMI. Seorang kader harus terbentuk melalui perkaderan yang akan membentuk kepribadiannya, sehingga kader-kader HMI harus mengacu kepada Nilai Dasar Perjuangan (NDP) atau Nilai Identitas Kader (NIK) HMI. Secara operasional kader HMI berpegang pada konstitusi dan pedoman perkaderan HMI. Kader juga harus mempunyai komitmen yang tinggi dan tunduk kepada visi dan misi perjuangan HMI. Pola dasar perkaderan HMI menegaskan bahwa kader HMI adalah anggota HMI yang telah menjalani proses perkaderan sehingga memiliki ciri, integritas, kepribadian, iman, ilmu dan amal yang dapat mencitrakan HMI sehingga siap

¹⁵⁶ *ibid* hal 107

berperanan sebagai lembaga perkaderan, maka secara totalitas juga mengembangkan potensi-potensi kader HMI. Hal itu didasarkan pada pandangan bahwa anggota HMI adalah human investement yang memerlukan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan berbagai kualitas yang diperlukan untuk menyongsong masa depan kader-kader HMI. Arah pembinaan strategis dalam perkaderan HMI adalah dengan memberikan wawasan kepemimpinan bagi kader-kader HMI. Guna melaksanakan perkaderan itu, maka diperlukan media-media perkaderan yang dikenal dengan training. Sebagian besar kegiatan HMI merupakan pendidikan kader yang menitikberatkan pada segi-segi tertentu, meliputi;

- a. watak dan kepribadiannya, yaitu memberikan kesadaran beragama, akhlak dan watak. Dengan modal itu diharapkan kader HMI memiliki nilai idealisme dan moralitas yang memadai.
- b. Kemampuan ilmiah, dimana kader HMI harus memiliki ilmu pengetahuan, intelektualitas dan wisdom (kebijaksanaan). Mungkin hal itu diharapkan kader HMI memiliki kesadaran untuk berpihak kepada masyarakat kecil (mustadaafin).
- c. Aspek ketrampilan dalam melaksanakan tujuan dan misi organisasi.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Lihat *Pedoman Perkaderan HMI dan LPL*, 1986, lihat Agussalim Sitompul, Menyana..., Op Cit hal 260-263

¹⁵⁸ *ibid*

Bila aspek-aspek perkaderan sebagaimana dijelaskan diatas, kader diarahkan untuk mencapai cita-cita ideal HMI yakni terbinanya insan akademis yang memiliki setidaknya dua kualitas utama kegiatan yang berbasis kampus atau perguruan tinggi dan kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan dengan memperhatikan dimensi kreatifitas dan pembaharuan.

4.3. Strategi Pengelolaan Perkaderan

Sistem kaderisasi HMI merupakan konsep terpadu mulai dari training dan jenjang training, kurikulum, instruktur, metode, pengorganisasian hingga evaluasi training HMI.

4.3.1. Lembaga Pengelola Perkaderan HMI.

Di dalam perkaderan HMI dikenal Lembaga Pengelola Latihan (LPL) yang berfungsi mengatur dan mengelola pelatihan atau kaderisasi. LPL bertanggungjawab terhadap proses dari awal hingga akhir dari perkaderan. Agar penerapannya sesuai dengan model training yang baku dan konstitusional. Sejak dihasilkan rumusan-rumusan penting mengenai pola perkaderan HMI pada awal tahun 1970an, maka kaderisasi dijadikan sebagai semacam sekolah HMI dan lembaga pendidikan formal bagi kader-kader HMI. Dalam setiap pelaksanaan training formal seperti LK I, II dan bahkan LK III, selalu dibentuk Master of Training (MOT) yang berfungsi antara lain memimpin pelaksanaan training dan mengawasinya. MOT harus bertanggungjawab atas jalannya proses training dari awal hingga akhir dan dibantu oleh senior dan organisasi pelaksana baik steering committee maupun organizing committee (OC)nya. Sementara itu fungsi instruktur bukan saja berfungsi melakukan transfer ilmu tentang berbagai hal

terutama materi ideologi dan kebangsaan itu tetapi juga mendidik jiwa dan semangat kepeloporan serta membangkitkan sikap kritisismenya.¹⁵⁹

Tugas LPL antara lain adalah menyiapkan pengelolaan latihan atas permintaan PB HMI sebagai institusi tertingginya dan atau lembaga dibawahnya seperti HMI cabang. Secara khusus diperlukan Bakomas LPL untuk menyiapkan pengelolaan perkaderan tingkat nasional seperti Latihan Kader III, Pusdiklat, Up Grading, Instruktur NDP. Secara operasional perkaderan juga ditangani langsung oleh bidang Pembinaan Anggota (PA) HMI. Secara komprehensif mengenai pola dasar perkaderan terdapat dalam buku pedoman perkaderan HMI.

4.3.2. Jenjang Training.

Sistem training formal dirumuskan melalui kongres ke 7 HMI di Jakarta tahun 1963. dalam konsep yang dinamakan Metode Training itu mencakup pengertian kader, tujuan pelatihan, sistem pelatihan, klasifikasi kader, waktu dan penjenjangan training. Hal ini merupakan momentum yang paling menentukan model kaderisasi HMI yang bersifat modern. Penjenjangan training HMI meliputi Basic Training, Intermediate Training dan Advance Training. Dua tahun kemudian dilakukan revisi mengenai jenjang perkaderan tersebut menjadi Basic Training dilaksanakan oleh komisariat atau rayon, intermediate training diselenggarakan oleh cabang, ideopolitor I dilaksanakan Badko dan ideopolitor II oleh PB HMI. Agussalim Sitompul mencatat perkembangan selanjutnya bahwa dalam kongres HMI ke 9 di Malang tahun 1969 dilakukan penyempurnaan lagi konsep perkaderan itu. Jenjang HMI menjadi lima tingkatan. Pra entry training atau masa Pengenalan Tjalon Anggota (Maperca) diselenggarakan

¹⁵⁹ *ibid* hal 271.

pengurus cabang, *Basic Training* oleh Komisariat dan Rayon, intermediate training oleh pengurus cabang, *Advance Training* diselenggarakan Badko HMI dan seminar nasional oleh PB HMI dan dalam perkembangannya dewasa ini konsep dan sistem perkaderan terus mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal HMI.¹⁶⁰

Menurut Agussalim Sitompul bahwa berbagai perubahan dan penyempurnaan ini membuktikan bahwa sistem perkaderan HMI mengalami dinamika, melalui berbagai perubahan penjenjangan dan materi didalamnya. Hal ini berarti pula bahwa wacana perkaderan HMI terus mengalami perubahan secara mendalam dan intensif. HMI sebagai organisasi kader harus berupaya terus-menerus menyempurnakan pedoman perkaderan HMI lembaga-lembaga pengelolanya.

4.3.3. Kurikulum Training

Pada awal dekade 1970 an seiring dengan perkembangan model pengelolaan perkaderan, maka materi secara aspek pokok kaderisasi juga mengalami perubahan sebagaimana diharapkan. Secara sistematis dapat dijelaskan bahwa untuk Maperca disampaikan materi keIslaman, ke HMI an, keorganisasian, perguruan tinggi dan kemahasiswaan, ketrampilan dan studium general. Adapun materi untuk intermediate training meliputi keIslaman, ke HMI an, keorganisasian, perguruan tinggi dan kemahasiswaan, ketrampilan dan studium general. Sementara materi advance training adalah keIslaman, ketrampilan dan studium general. Kesemuanya juga disertai silabinya masing-masing. Sebelum HMI merumuskan NDP/NIK sebagai semacam panduan ideologi politik HMI itu, materi-materinya masih kurang terarah seperti masalah

¹⁶⁰ Periksa berbagai hasil kongres dan tulisan sejarawan HMI Agussalim Sitompul.

falsafah/tauhid, perbandingan agama, ketrampilan umum dan psikologi masa, meskipun sudah membahas masalah-masalah ke HMI an dan keorganisasian.¹⁶¹

4.3.4. Metode Training.

Berdasarkan hasil studi-studi mendalam yang pernah dilakukan HMI, ditetapkan metode perkaderannya. Metode yang dipakai terutama sejak masa tahun 1970an adalah gabungan antara sistem diskusi (Aloka sistem), sistem ceramah, dialog dan sistem penugasan. Sistem Aloka mengembangkan pemahaman terhadap materi-materi training HMI melalui model diskusi, sedangkan materi indoktrinasi dilakukan melalui metode ceramah.

Sedangkan penugasan adalah pemahaman materi-materi training HMI dengan menggunakan pelatihan ketrampilan peserta dimana sarannya adalah membangun kemampuan tertentu melalui penulisan, laporan kerja dan bentuk-bentuk uji coba lainnya. Akan tetapi metode yang digunakan dirancang agar tidak kaku dan disesuaikan dengan keadaan lingkungan terutama kondisi kampus dimana perkaderan itu diselenggarakan. Metode juga melibatkan unsur peserta untuk ikut melibatkan diri dalam proses pelaksanaan. Misalnya ada proses pelibatan peserta dalam kontrol belajar antara peserta dengan panitia khususnya *Master of Training*. Sehingga metode pelatihan dan kaderisasi HMI mengikuti konsep pendidikan politik modern.¹⁶²

4.3.5. Instruktur

Kegiatan perkaderan didukung oleh para instruktur sebagai elemen yang menentukan jalannya sistem perkaderan HMI. Instruktur biasanya diambil dari aktivis

¹⁶¹ Lihat Agussalim Sitompul. dan bandingkan dengan hasil lokakarya tahun 1997 yang sebetulnya jauh lebih lengkap; Memasukkan aspek iptek, pendalaman misi NDP, mahasiswa sebagai kekuatan pembaharu, ideopolitor stratak serta perkembangan peradaban dunia, kepemimpinan, manajemen organisasi serta sistem pembangunan nasional dan wawasan global.

¹⁶² *Ibid.* hal 269-270

HMI yang senior yang dianggap telah matang memahami dan mendalami proses perkaderan disertai berbagai pengalaman keHMIan. Instruktur bertugas untuk menyampaikan materi, wawasan, bimbingan, pembinaan dan membentuk kader-kader HMI. Seorang trainer (instruktur) harus melakukan pembinaan dan pendidikan secara efektif dan komprehensif. Mereka ini harus mengarahkan kader-kader HMI yang lebih junior untuk mencapai profil ideal kader-kader HMI yaitu membentuk integritas dan kepribadian, pengembangan kualitas intelektual dan pengembangan kemampuan profesional yang terpadu dan integralistik. Menjadi instruktur HMI mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi tentu saja telah lulus LK I dan mengikuti kursus senior course yang memang sebagai wadah melatih instruktur, dalam senior course dilakukan pendalaman materi-materi pokok maupun materi pendukung lainnya.¹⁶³

4.3.6. Evaluasi Perkaderan

HMI memandang penting evaluasi perkaderan, karena hal itu merupakan landasan berpijak untuk mengetahui baik buruh, efektif atau tidak efektifnya metode dan pengelolaan perkaderan yang dilakukan. Bagi HMI evaluasi perkaderan dilakukan dengan dua jalan. *Pertama*, evaluasi latihan kader, hal itu dilakukan untuk menilai keberhasilan kader-kadernya. Evaluasi ini untuk mengetahui standar validitas dan reabilitas, sedangkan teknik yang digunakan adalah tes obyektif, tes subyektif, wawancara, observasi dan lainnya. Bentuknya misalnya menilai aspek afektif (sikap), kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (ketrampilan). *Kedua*, evaluasi pedoman perkaderan, kegiatan ini didasarkan pada apakah fungsi HMI sebagai organisasi

¹⁶³ Materi yang menonjol adalah public speaking, psikologi pendidikan, didaktik dan metode penyampaian materi, latihan praktek mengajar.

perkaderan masih berfungsi atau tidak. Berikut tingkat kesuksesan pelaksanaan profesionalisme perkaderan HMI.

Format evaluasi penerapan pedoman perkaderan meliputi aspek kurikulum, mekanisme pengelolaan latihan dan pola rekrutmen, pelaksanaan akreditasi. Dan pastikan ada laporan periodik tiap-tiap badan koordinasi (*badko*) mengenai perkembangan perkaderan diwilayah kerjanya.

4.3.7. Follow Up Training.

Disamping pelaksanaan fungsi-fungsi perkaderan HMI, juga terdapat beberapa bentuk *follow up* perkaderan HMI. Proses perkaderan memerlukan pembinaan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang secara terencana, teratur dan *continue*. Kegiatan ini dilakukan baik secara formal, melalui forum-forum perjuangan dan kegiatan individu dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dikatakan bahwa *follow up* ini mencakup *training in practice*.

Pelaksanaan *follow up* merupakan tanggungjawab kader yang sudah menjadi pengurus pada setiap tingkatan kepengurusan organisasi. Misalnya melalui model *study club*, mengadakan riset pengembangan diri dan organisasi. Menyusun kertas kerja, mengembangkan dinamika kelompok, *job training* dan fungsi-fungsi kepanitiaan baik di tingkat internal maupun eksternal.¹⁶⁴

4.3.8. Insan Cita HMI

Secara keseluruhan gerakan perkaderan HMI diarahkan untuk mencapai derajat sebagai kader yang memenuhi syarat sebagai insan cita. Menurut Ahmad Wahib bahwa insan cita HMI adalah mereka yang berkemampuan akademis, bersikap hidup kreatif,

¹⁶⁴ Dikutip dari tulisan-tulisan Agusalam Sitompul, *Op Cit*

berwatak pengabdian dan bernaafaskan Islam. Kemampuan akademis dan emosi kreatif yang dimilikinya akan melahirkan *scientific creatifity* atau *developed cretlivity*. Sedangkan insan akademis tanpa kreasi adalah seorang sarjana atau seorang tukang yang bekerja secara rutinitas. Mereka yang tergolong tukang ini tidak akan kecewa bila dirinya tidak lagi mampu memecahkan masalah dalam kehidupan masyarakat yang timbul. Dalam paduan kemampuan akademis dan fungsi kecendekiawan ini insan cita HMI akan merupakan radikal dalam ide, rasional dalam pencapaian. Oleh karena itu, syarat-syarat HMI sebagai organisasi kader adalah sebagai berikut:

1. Mendidik anggota yang sadar bukan penurut, Wahib mengkritisi kader-kader HMI saat itu (1970an) yang cenderung untuk menghasilkan manusia-manusia yang tidak berkepribadian dan kurang sadar akan apa yang sesungguhnya terjadi pada organisasi kita. Mereka pemimpin manusia mati, takut pada kepemimpinan manusia hidup.
2. Mengutamakan kejernihan rasio daripada kehangatan agitasi dan demagogi yang karenanya tak akan bersifat isolatif dan membuka diri bagi dialog dengan segala ide. Hal ini dikritik wahib sebagai kader yang kurang berdialog dengan perkembangan-perkembangan politik yang mendasar.
3. Pimpinannya secara periodik terus mengalami pergantian.
4. Anggota-anggota mendapat saluran untuk meningkatkan diri bahkan dipaksa untuk meningkatkan diri.
5. Tidak mengutamakan besarnya jumlah anggota, melainkan tingginya kualitas anggota.
6. Daya kreasi dan semangat kritis anggota dihormati dan kemerdekaan jiwa dirangsang, hal ini sesuai dengan konsep organisasi modern yang merangsang kreatifitas anggota-anggotanya.
7. Dihidupkan kompetisi diantara mereka, dimana setiap fungsionaris diberikan kesempatan untuk mencapai karier atau prestasi yang setinggi mungkin.
8. Membangkitkan semangat percara diri sendiri dan membunuh setiap sikap membeoan (menurut atau mengikuti orang lain apalagi kekuasaan).
9. Menghormati pada nilai-nilai pribadi, *right to dissent, duty to answer* dan pengikisan prinsip-prinsip *identification with whole*. Dalam sebuah organisasi kader menurut Wahib, tidak ada keharusan bahwa keputusan organisasi harus juga menjadi sikap pribadi tiap-tiap anggota dalam statusnya sebagai individu.
10. Pengurus selalu mengikuti kemajuan yang diperoleh tiap-tiap anggota, karena itu bagi HMI merupakan suatu keharusan untuk secara periodik bisa menilai kemajuan tiap anggota, dalam perkembangan; kemampuan akademisnya, sikap kreatifitas, moral pengabdian dan nafas Islamnya, maka diperlukan adanya *education evaluation dan measurement*.

11. Anggota-anggota ialah mereka yang masih mempunyai potensi untuk mengembangkan diri.
12. Struktur organisasi dan mekanismenya diatur sesuai dengan tujuan dari proses perkaderan. Dalam pandangannya bahwa HMI belum menunjang lancarnya konsep ini karena struktur kekuasaan HMI sama sekali belum menjamin hal itu, yang dihasilkan hanya kesibukan dan pemborosan tenaga, dll.
13. Selalu bereksperimen untuk pengembangan pemikiran-pemikiran baru. Dan
14. Sesuai dengan fungsinya yaitu pengembangan individu, maka anggotanya merupakan suatu flux (contant flow) dan organisasi kader harus kita penuhi kalau tetap konsisten dengan organisasi kader itu.¹⁶⁵

Di samping itu juga HMI diharapkan membangun komitmen dan cita-cita kebangsaan. Akbar Tanjung menegaskan bahwa tujuan HMI seperti itu dengan terang memberikan orientasi dan aksentual gerak yang strategis bagi HMI bahwa HMI mempunyai parameter yang jelas tentang kader-kader yang hendak dihasilkan yaitu insan cita HMI. Insan cita menurut Akbar bahwa HMI harus melahirkan model manusia sempurna yang dalam Islam dikenal konsep insan kamil. Akademis dalam arti kader HMI harus mempunyai kapasitas keilmian yang mendatangkan kreatifitas dan inovasi untuk melahirkan hal-hal yang baik. Menurut Akbar bahwa implementasi nyata baru konsep insan cita adalah HMI memotori gerakan pembaharuan kebangsaan secara kolusif dengan organisasi kemahasiswaan lainnya yaitu PMKRI, GMKI, GMNI dan organisasi PMII. Salah satu butirnya menegaskan bahwa: "Indonesia yang kita cita-citakan adalah Indonesia yang kuat bersatu Indonesia yang cerdas dan modern Indonesia yang demokratis dan adil. Indonesia yang menjunjung tinggi martabat manusia dan wibawa hukum, Indonesia yang sehat dan makmur, Indonesia yang bebas dari ketakutan dan penindasan, Indonesia yang berperan dalam perjuangan bangsa

¹⁶⁵ Lihat Ahmad Wahidi, *Pengalaman Pemikiran Islam, Catatan Harian IPIES dan Proeskon Institute, Jakarta, 2001*, hal 272-277

Anggota di antara Indonesia yang layak bagi tempat dan kehidupan manusia sebagai makhluk rasul.¹⁶⁶

Pandangan insan cita HMI, bagi Akbar terasmin dari proses perkarahan kalangan muda (HMI) untuk melahirkan kader-kader umat dan bangsa yang berkualitas, yang berorientasi pengembangan sumber daya manusia serta HMI menjadi sumber insani pembangunan bangsa¹⁶⁶. Sebagai penegasan bahwa yang perlu disadari bahwa sistem perkaderan HMI dengan segala muatannya jelas tidak akan mampu memberikan segala-galanya kepada seorang kader. HMI dijadikan sebagai universitas kedua dan yang pertama adalah perguruan tinggi dimana ia dikader. Selain memahami kepemimpinan organisasi dan wawasan keagamaan tetapi yang terpenting bahwa kader HMI dapat mengembangkan dirinya melalui berbagai alternatif kegiatan seperti studi club dan aktivitas kemasyarakatan.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Akbar Tanjung, *HMI dan Indonesia Yang Kita Cita*, dalam 10 th HMI Indonesia Republik 1971-1976, hal 91-96.

¹⁶⁷ Lihat Salah Khalid, *Via Keleluhan dan Kebungaran HMI Sebagai landasan Perkaderan*, makalah 1971.



BAB V

HMI DAN PENGISIAN STRUKTUR KEKUASAAN

Studi tentang kekuasaan di dalam perkembangan Indonesia modern, memperlihatkan adanya peranan HMI dalam proses pengisian struktur kekuasaan baik di lembaga-lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif dan berbagai cabang kekuasaan lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Victor Tanja dan Anas Urbaningrum bahwa komitmen kebangsaan dan peranan kesejarahannya yang tidak diragukan lagi dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan republik Indonesia. Realitas kini mencatat, betapa besar alumni HMI mengisi peran diberbagai bidang kehidupan. Di birokrasi tercatat nama-nama; Akbar Tanjung, Ibrahim Hasan, Amiruddin, Mar'i Muhammad dan sebagainya. Terdapat Yusuf Kalla, Sugeng Suryadi dan Fahmi Idris dikalangan usahawan. Perkaderan HMI juga melahirkan Buya Ismail Hasan, Aisyiah Amini, Ridwan Saidi dan lainnya dikalangan politisi. Di kalangan kelompok kepentingan dapat di lihat ICMI merupakan wadah aktualisasi misi HMI mengingat sebagian besarnya berasal dari kalangan HMI¹⁶⁸

HMI telah banyak melahirkan kelompok terdidik yang memiliki komitmen keumatan dan kebangsaan yang tinggi di tengah krisis sumber daya manusia khususnya di sektor politik negeri ini.

¹⁶⁸ Anas Urbaningrum, *Menuju Masyarakat Madani*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1997. hal 64 -65, Victor Tanja, *HMI, Sejarah...Op Cit.*

5.1. Perkaderan Politik HMI

HMI adalah suatu organisasi kader dan perjuangan. Hal itu didasarkan pada tujuan HMI yaitu "terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT". Menurut Harry Azhar Azis, rumusan tujuan itu seperti sebuah ayat suci bagi kader HMI yang memiliki daya refleksi yang abadi baik bagi kader HMI, baik yang masih anggota ataupun yang telah alumni, tujuan HMI telah menjadi semacam cita-cita perjuangan mereka yang intrinsik ke dalam semangat untuk membangun diri, masyarakat bangsa dan negaranya. Setelah hampir 57 tahun HMI berdiri dan berjuang, tebaran alumni HMI merasuk kesemua lini dan pelosok bidang pengabdian kehidupan. Tidak sedikit alumni HMI yang mengabdikan melalui jabatan-jabatan seperti menteri, duta besar, gubernur, bupati, walikota, camat dan desa. Selain itu juga tidak sedikit alumni HMI menjadi profesional seperti birokrat atau teknokrat, pekerja sosial serta politikus profesional seperti DPR atau DPRD, peneliti, doktor dan profesor, yang semuanya menjadi semacam indikasi keberhasilan perkaderan HMI¹⁶⁹

Pengalaman baik dalam kaderisasi formal maupun non formal di HMI sangat nyata memberikan kemandirian dan kepercayaan diri (self confidence) untuk bergaul serta keberanian mengungkapkan pendapat kader-kader HMI pada orang lain. Melalui wadah perkaderan HMI, maka dimungkinkan membangun kebersamaan, solidaritas dan bahkan kekuatan. Berbagai wadah kemahasiswaan seperti Dewan Mahasiswa (DEMA), Senat Mahasiswa dan lainnya dijadikan HMI sebagai wahana berlatih memainkan peran politik khususnya bagaimana memenangkan pertarungan merebut jabatan di lembaga-

¹⁶⁹ Lihat Harry Azhar Azis, *Membangun...Op Cit.*

lembaga kemahasiswaan yang demokratis saat itu. Menurut Fuad Bawazier bahwa lembaga-lembaga kemahasiswaan yang dikuasai HMI itu juga dijadikan sebagai momentum membangun hubungan dengan dekan, rektor dan lainnya dan mempengaruhi berbagai kebijakan-kebijakan mereka.¹⁷⁰

Melalui sistem perkaderan HMI yang terbuka, egaliter dan independen, maka kader-kader HMI dapat berdialog dengan lembaga-lembaga negara dan orang-orang penting, apalagi antara HMI dan kekuasaan memiliki visi yang sama misalnya agenda modernisasi Indonesia. Semula HMI merupakan organisasi kemahasiswaan yang cenderung melawan kekuasaan khususnya pemerintah. Tetapi terdapat suatu vase perubahan dari rezim Orde Lama kepada Orde Baru, dibawah pimpinan Soeharto, dimana HMI dipandang sangat berpeluang digiring masuk kedalam kehidupan politik Soeharto. Soeharto melihat efektifitas Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang banyak didominasi oleh HMI.

Dalam KAMI, HMI merupakan kekuatan terbesar karena pada saat itu HMI merupakan organisasi mahasiswa terbesar yang memiliki basis sosial yang sangat luas. barangkali tidak terlalu berlebihan bila HMI mengklaim diri sangat berjasa dalam melahirkan Orde Baru. HMI dalam menyikapi kerangka hubungannya dengan Orde Baru memandang perlu dapat ikut serta dalam kegiatan politik Orde Baru, mengisi lembaga-lembaga politik dan lembaga ekonomi.¹⁷¹

Menurut Ramlan Siregar bahwa salah satu hal yang menonjol dalam perkaderan HMI adalah diterapkannya sistem perkaderan yang sama. Hal itu bersumber dari tujuan HMI yang berorientasi kebangsaan. Dengan konsep perkaderan yang relatif seragam, maka terbangun suatu visi yang sama, budaya dan pandangan politik yang juga

¹⁷⁰ Wawancara Dr. Fuad Bawazier, di kediamannya Menteng, Jakarta, Juli 2004.
¹⁷¹ Ridwan Saidi, *Pemuda Islam dan Dinamika Politik Bangsa*, Rajawali, Jakarta, 1984. hal 48-49. lihat juga Hasanuddin M. Saleh, *HMI dan Rekayasa*, Op Cit.

memiliki kesamaan. Didalamnya juga terdapat wacana dan konsep-konsep kehidupan politik yang ideal sebagaimana ditegaskan dalam tujuan HMI yakni terciptanya masyarakat adil dan makmur itu. Meskipun kader-kader HMI itu memiliki posisi dan peran yang berbeda yang berarti pula memiliki cara dan posisi yang berbeda, tetapi tetap mempunyai tujuan yang sama. HMI tidak punya patokan yang baku seperti misalnya NU, tetapi bersifat independen. Dengan independensi itu, maka komunikasi di antara kader-kader HMI itu akan mudah terbangun atau relatif cepat membangun sinergi¹⁷²

Pilihan politik Soeharto yang mengajak HMI sebagai bagian dari kekuatan Orde Baru itu sebenarnya di tolak oleh sebagian besar HMI dengan pertimbangan bahwa HMI lebih terbiasa sebagai oposisi dari pada menikmati posisi dalam kekuasaan karenanya HMI memilih garis oposisi. Tetapi persoalannya kemudian adalah diawal pemerintahan Soeharto banyak merekrut dari kalangan non HMI. Fuad Bawazier menilai bahwa keengganan HMI masuk dalam kekuasaan Soeharto saat itu, maka dimanfaatkan oleh kalangan minoritas yang menerima untuk bekerjasama dengan pemerintahan Soeharto di Orde Baru. Dalam perkembangannya kemudian, HMI sadar akan kekeliruan strateginya itu dan mulai bergabung secara intensif dan fungsional dalam politik dan birokrasi. Ternyata keikutsertaan HMI dalam pemerintahan dan lembaga legislatif mulai mampu menggeser kelompok-kelompok pendukung Soeharto yang lama¹⁷³

Sejalan dengan itu, Akbar Tanjung mengatakan bahwa HMI melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang berwawasan kebangsaan yang tinggi. Karena itu HMI harus tetap kuat dan mampu mempertahankan independensinya ketika berhadapan dengan para

¹⁷² Wawancara dengan Ramlan Siregar, dosen Pascasarjana Ilmu Politik UNAS, alumni HMI, tanggal 30 Agustus 2004.

¹⁷³ Wawancara Fuad Bawazier, *ibid.*

senior yang sedang memegang kepemimpinan bangsa. Pada awal tahun 1970 an HMI sudah banyak membahas persoalan-persoalan politik seperti HMI memperjuangkan diundangkannya undang-undang perkawinan dan ternyata substansi dari undang-undang itu bisa menjadi model dan aturan yang berlaku sampai dewasa ini. Menurut Akbar, terdapat kecocokan antara idealisme perjuangan HMI dengan agenda demokrasi di Indonesia¹⁷⁴

Apalagi posisi HMI di tengah perkembangan politik, sebelum dan sesudah pemilu 1971, seakan-akan semakin melegitimasi keharusan perjuangan umat Islam yang bersifat peneratif (lintas parlemen, birokrasi dan struktur politik). Restrukturisasi sistem kepartaian oleh pemerintah pada 1973 semakin menghilangkan harapan kembalinya Islam politik secara formal di panggung politik, bahkan struktur lama partai-partai Islam akhirnya memudar. Partai-partai Islam di gabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, hal ini diperkuat oleh pemberlakuan masa mengambang (floating mass)¹⁷⁵ Meskipun demikian HMI tetap merasa penting untuk menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga politik dan birokrasi yang ada sekarang. Para pendukung aliran reformasi ini pada umumnya mengatakan bahwa para pemimpin dan aktivis baru dapat memainkan peran secara efektif dalam proses pembuatan kebijakan negara jika mereka memasuki lembaga-lembaga negara di eksekutif dan legislatif yang formal. Secara lebih khusus bahwa partisipasi politik mereka dalam birokrasi dapat menghapus kesan mengenai Islam yang memusuhi negara dan kantor-kantor birokrasinya. Saat Orde Baru, pola sosialisasi politik HMI pun menyesuaikan dengan irama negara yang melakukan hegemoni atas masyarakat melalui pendekatan otoritarianisme negara.

¹⁷⁴ Diskusi dengan Akbar Tanjung di kantor DPR RI, tanggal 26 Agustus 2004.

¹⁷⁵ M Deden Ridwan dan M. Muhadjirin, *Membangun Konsensus, Pemikiran dan Praktek Politik Akbar Tanjung*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.

Meminjam terminologi, Karl D Jackson sebagai fenomena masyarakat politik birokratik (bureaucratic policy), yaitu suatu sistem politik di mana kekuasaan dan partisipasi politik dalam pembuatan keputusan berada pada otoritas para penguasa negara, terutama penguasa militer dan pejabat tinggi birokrasi¹⁷⁶

HMI dan negara saat itu sedang mengalami kondisi saling berbenturan dan di saat itulah mulai terjadi langkah moderasi politik HMI. Akbar sebagai generasi HMI tahun 1970 an yang memulai melakukan penyesuaian dengan negara dengan memasuki partai politik plural dan sekuler. Sementara Nurcholish Madjid tetap memainkan gerakan pemikiran modern yang sekuler. Tanpaknya terdapat sinergisitas antara visi modernisme Madjid dengan praktik politik Akbar Tanjung yang cenderung akomodatif terhadap kekuasaan.¹⁷⁷

Hubungan HMI dengan Orde Baru khususnya dalam kaitannya dengan keikutsertaan HMI kedalam kerangka sistem politik rezim itu ditandai dengan sikap akomodatif dan dipertengahan tahun 1970 an HMI secara tegas memberikan dukungan terhadap pemerintahan Orde Baru itu secara aktif guna melancarkan program yang berorientasi edukatif dan sosial politik. Hal itu terlihat dari keterlibatan HMI pada program sosialisasi Keluarga Berencana (KB), komitmen kelompok Cipayung (1972) yang berisi rumusan Indoensia yang dicita-citakan dan dominasi HMI dalam kekuatan tunggal kepemudaan yaitu KNPI. Al Mandari menilai bahwa dengan berbagai aktivitas seperti itu telah memungkinkan HMI berpartisipasi aktif dalam lembaga-lembaga negara secara formal seperti di DPR dan pemerintahan.¹⁷⁸

¹⁷⁶ Ibid hal 112-113

¹⁷⁷ Ibid hal 115

¹⁷⁸ Syafruddin Al Mandari, *HMI dan Wacana Revolusi Sosial, Hijau Hitam*, PSPI, 2003 hal 51

Peranan HMI adalah memberikan proses pembelajaran, sumber daya (resources), refleksi dalam kehidupan nyata. Sementara menurut Sudarmadi bahwa kiprah HMI dalam birokrasi itu sebenarnya tidak terencanakan, tetapi by chance (secara kebetulan) berdasarkan kemampuan dan bakat seseorang kader. Namun sinergisitas HMI ketika berada di lembaga-lembaga negara seperti birokrasi dan DPR itu karena adanya solidaritas di antara HMI terutama budaya senioritas yang saling membantu serta uluran tangan. Model perkaderan yang diterapkan dalam ABRI dan atau juga PKI ialah karena berhasil membangun solidaritas perkaderan, tidak saling konflik satu sama lainnya¹⁷⁹

5.2. Pandangan Ideologi HMI dan Pengaruh Nilai Dasar Perjuangan (NDP)

Nilai Dasar Perjuangan (NDP) merupakan nilai dasar yang dipakai sebagai alat melakukan peranan HMI sebagai organisasi perjuangan, didalamnya terdapat 103 buah ayat Al Quran dan 30 hadist. Dalam prakteknya NDP dapat dijadikan juga sebagai seperangkat ideologi HMI yang meliputi filsafat sosial, lahirnya teori-teori sosial dan dapat dilakukan sebagai sarana melakukan perubahan sosial¹⁸⁰ Memang HMI pernah menggunakan azas Pancasila dan azas Islam, tetapi substansinya tetap berorientasi pada visi keIslaman dan kebangsaan secara pluralistik. HMI harus pandai-pandai melakukan berbagai strategi politik agar tidak tergilas oleh dunia politik. Artinya pandangan ideologi HMI tetap bersandar pada konteks keindonesiaan.

Melalui Kongres HMI ke 9 di Malang pertengahan tahun 1969 Nurcholish Madjid, Endang SA dan Sakib Mahmud merumuskan NDP itu, NDP merupakan

¹⁷⁹ Wawancara, Lalu Sudarmadi, di kantor BKKBN, 7 Januari 2004.

¹⁸⁰ Wawancara dengan Agussalim Sitompul, di Singaraja Bali, 06 September 2004.

perumusan tentang ajaran-ajaran pokok agama Islam yaitu nilai-nilai dasarnya, sebagaimana tercantum dalam Al Quran dan Sunnah. Mulanya dinamakan Nilai Dasar Islam, tetapi dengan mempertimbangkan kapasitas mahasiswa, maka dinamakan NDP saja. Secara sederhana kalau disimpulkan bahwa inti NDP itu adalah beriman, berilmu dan beramal, walaupun terdiri dari beberapa bagian yaitu dasar-dasar kepercayaan, kemanusiaan, kemerdekaan manusia, ikhtiar dan takdir, ketuhanan yang maha esa dan perikemanusiaan, lalu individu yang masyarakat, keadilan sosial, keadilan ekonomi dan kemanusiaan serta ilmu pengetahuan¹⁸¹ NDP mengalami perubahan nama dari NDP ke Nilai Identitas Kader (NIK), disebabkan oleh perubahan azas HMI dari Islam kepada Pancasila. Perubahan ini menandai penguatan peranan HMI dalam kehidupan kebangsaan Indonesia, terlepas dari segala kontroversinya. Seperti yang diprediksikan sebelumnya bahwa NDP atau NIK itu dapat bertahan lebih dari satu generasi yaitu sekitar 30 tahunan.

Posisi NDP sebagai ideologi politik HMI semakin tidak relevan dengan dinamika dan kebutuhan jaman¹⁸² Oleh karenanya Sidi Mawardi menawarkan diperlukannya rekonstruksi kembali konsep-konsep gerakan HMI, yang terdiri dari lima rumusan pokok; (1) Filsafat atau ideologi gerakan yaitu segi yang menjadi fondasi, dasar, orientasi atau arah dan cita-cita ideal yang akan dituju sebuah gerakan. (2) Teori gerakan yaitu rumusan tentang asumsi-asumsi gerakan yang sudah teruji kebenarannya (NDP sebagai patokan) dan didasarkan pada problem masyarakat serta ideologinya. (3) rumusan sejarah dan problem obyektif masyarakat. (4) mekanisme dan program organisasi yaitu rumusan sasaran yang ingin dicapai. Serta (5) Strategi dan taktik

¹⁸¹ Agussalim Sitompul, *Dokumen landasan Perjuangan HMI, dalam Menuju Insan Cita*, Badko HMI Intim, 1999. hal 193-195

¹⁸² Lihat Sidratahta, *HMI Menjadi Beban Bangsa*, Op Cit.

gerakan. HMI memandang NDP itu sebagai filsafat gerakan yang terinspirasi dari lawatan Nurcholish Madjid ke Amerika Serikat (1968) yang dipandang Ahmad Wahib sebagai perjalanan yang mengubah pandangan tokoh pembaharu dan mantan kader HMI itu¹⁸³ Bagi Sidi bahwa NDP tidak hadir dalam ruang hampa tetapi banyak pemikiran lainnya yang mewarnainya yaitu Willy Eicher, seorang ideolog partai sosial demokrat Jerman dan juga pengaruh pemikiran Syahrir mengenai sosialisme Indonesia yang diadopsinya dari manifesto Hitler, Mein Kampf. Tetapi satu hal yang terpenting bahwa NDP memiliki keberpihakan yang tegas yaitu berpihak pada kaum tertindas, menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat.

Pada dekade 1960 an terjadi pertarungan antara HMI dengan PKI dan hal itu sangat membekas pada kader-kader HMI. Meskipun akhirnya PKI yang terkalahkan setelah dibantu oleh terutama TNI AD, tetapi pengalaman politik HMI itu menjadi dasar atau faktor yang mendorong HMI untuk menduduki kekuasaan¹⁸⁴ NDP merupakan landasan penting bagi kader HMI untuk menjadi visioner dan radikal, karena didalamnya terdapat konstruksi nilai-nilai termasuk visi terhadap dimensi kebenaran dan keadilan yang dapat diperjuangkan melalui jalur kekuasaan. Meskipun HR Songge ini menilai sudah banyak mengalami reduksi visi yang mengarah kepada membenaran terhadap kekuasaan. Menurutnya HMI ikut memberikan membenaran teoritik tentang kepentingan sharing power. Bila mendasarkan pada tafsir NDP, maka HMI harus mampu menggeser orientasi kekuasaan yang otoriter dan tidak adil itu kepada model kekuasaan yang menghargai kebebasan berpikir dan demokratisasi dan sebagainya.

¹⁸³ Lihat Sidi Mawardi, *Rekonstruksi Konseptual Gerakan HMI, kearah Transformasi Sosial Politik*, Kreatif Monirity, Yogyakarta, 2004.

¹⁸⁴ Wawancara dengan Dr. Fuad Bawazier, Ketua Umum Korps Alumni HMI (KAHMI), di Jakarta, Juli 2004.

Kedepan diperlukan adanya kreatifitas intelektual dan rekunstruksi nilai sebagai substansi perkaderan HMI¹⁸⁵

Studi yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum tentang pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid terlihat bahwa substansi NDP itu telah memberikan basis penjelasan dengan disertai rujukan ayat-ayat Al Quran tentang perlunya seorang muslim dalam bersikap untuk mentransendensikan pilihannya pada sumber yang tertinggi (ultimate goal) dan dasar epistemologis semacam ini tampak dalam konsepsi tauhid, karena menjadi dasar pembaharuan pemikiran Islam. Menurut Anas bahwa gagasan-gagasan pembaharuan yang digulirkan Nurcholish Madjid bertolak dari warisan kekayaan khasanah intelektual Islam klasik yang ditransformasikan dalam jargon modern¹⁸⁶

5.3. Rekrutmen Politik Orde Baru Terhadap HMI.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pandangan politik HMI didasarkan pada pemahaman bahwa sistem kekuasaan bagi HMI adalah kekuasaan yang mampu menopang perkembangan Islam di Indonesia. Menurut Hasanuddin bahwa secara ideal pandangan inilah yang akan menentukan garis utama yang ditempuh HMI dalam berinteraksi dengan sistem sosial dan politik¹⁸⁷

Sebagai organisasi perkaderan, HMI mampu melatih kader-kadernya untuk selalu siap memasuki dunia politik dan birokrasi. Menurut Lalu Sudarmadi bahwa HMI sangat besar pengaruhnya kepada kita dalam menempa diri sebagai kader bangsa. Perkaderan itu dijadikan sebagai landasan moral setiap kadernya sebelum masuk dalam

¹⁸⁵ Diskusi dengan Harun Al Rasyid Songge, intelektual muda HMI, mantan Ketua Umum HMI Cab.

Yogyakarta, tanggal 17 September 2004.

¹⁸⁶ Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi, Pemikiran Demokrasi Nurcholish Madjid*, Republika, 2004, hal 49-51

¹⁸⁷ Periksa Hasanuddin M. Saleh, *HMI dan Rekayasa... Op Cit.* hal 38

kehidupan nyata dalam masyarakat. Hal itu dapat membangunkan kesadaran diri dan dapat menciptakan social solidarity sebagai sesama korps himpunan.¹⁸⁸ Berkaitan dengan partipasi politik HMI, Sudarmadi memandang memang HMI pernah mengalami puncak kesuksesannya dalam birokrasi dengan mendominasi pada berbagai kebijakan negara.

Dibidang kepemudaan, pemerintah membentuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang awalnya merupakan satu wadah forum komunikasi organisasi-organisasi mahasiswa dan pemuda. Dalam perkembangannya organisasi ini menjadi organisasi yang solid mengatasi masalah kepemudaan terutama potensi radikalisasinya. Menyadari kondisi ini HMI segera menyusun strategi bersama PMKRI, GMNI, GMKI, (masuk kemudian PMII dan IMM) membentuk kelompok Cipayung¹⁸⁹ dan perjalanan forum ini menjadi salah satu kekuatan penentu yang menjadi kekuatan penekan (pressure group) terhadap sistem politik Orde Baru. Misalnya kasus Malari 1974 dan penolakan NKK/BKK, suatu aturan yang melarang mahasiswa terjun dalam dunia politik. Meskipun HMI tidak berreaksi atas gerakan penolakan itu tetapi jelas keberpihakan HMI terhadap perubahan sosial politik yang sedang berlangsung.¹⁹⁰

Perkembangan dunia kemahasiswaan mulai mengalami pergeseran peran dan posisinya dalam kekuasaan ketika KNPI mulai berperan. Bila sebelumnya secara personal kader-kader HMI dan OKP lainnya menjadikan organisasi mereka sebagai media mobilitas sosial, maka kehadiran KNPI menyebabkan terjadi perubahan sumber

¹⁸⁸ Lalu Sudarmadi, *Op.Cit*

¹⁸⁹ Keberadaan kelima organisasi di dalam Kelompok Cipayung, disamping memiliki kandungan histories yang fenomenal, juga memiliki mekanisme kerja yang menarik. Perbedaan latar belakang dapat merajut rasa kebangsaan. Pemikiran dan gagasan kelompok ini menonjol sekali dalam berbagai wacana dan forum. Hasilnya dapat disumbangkan pada Negara dan masyarakat. (Kristya, 1997).

¹⁹⁰ Lihat Hasanuddin M. Saleh, *HMI dan Rekayasa...* hal 51-52

rekrutmen politik itu. Didalamnya banyak dimotori oleh kader-kader HMI. Pada saat awalnya tokoh-tokoh HMI seperti Abdul Gafur, Akbar Tanjung dan sebagainya sangat menonjol. Demikian juga dengan diberlakukannya Normalisasi Kehidupan Kampus yang dikenal dengan NKK/BKK, maka terjadi perubahan dalam dunia kemahasiswaan saat itu di mana tradisi perebutan kekuasaan intra kampus yakni melalui Dema mulai pudar karena nuansa ideologisnya mengalami kehilangan.¹⁹¹

HMI lahir dari kerangka aktualisasi nilai-nilai Islam dan kebangsaan Indonesia. Dalam Dies Natalis ke 43 HMI, Nurcholish Madjid menulis bahwa jika tahun 1966 disebut, maka asosiasi pertama seseorang Indonesia ialah kepada satu angkatan yang sangat erat kaitannya dengan tumbanganya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru. Dan kalau kita pusatkan perhatian kita hanya pada KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) saja, maka peranan dominasi HMI sangat nyata, bahkan tidak berlebihan bila dikatakan oleh banyak pengamat bahwa sebenarnya KAMI identik dengan HMI, suatu hal yang banyak menimbulkan kecemburuan banyak kalangan¹⁹²

Menurut Tjahjo Kumolo bahwa kader HMI yang muncul pada masa Orde Baru justru lebih memilih masuk ke dalam ruas-ruas struktur politik birokrasi dan mereka rata-rata sebelumnya pernah di KNPI dan ormas kepemudaan. Efektivitas HMI masuk mendominasi KNPI nampak terlihat ketika Akbar Tanjung menjadi Ketua Umum KNPI, dan kiranya tidak mengada-ada bahwa Abdullah Puteh dan Aulia Rahman dapat duduk memimpin KNPI merupakan keberhasilan Akbar Tanjung dalam mendistribusikan peran kader terbaiknya. Kumolo mengungkapkan bahwa terlepas dari sesuai tidaknya strategi politik HMI terhadap misi serta perjuangan HMI dalam

¹⁹¹ Wahyuni Nafis dan M Rifki, *HMI, Beban Sejarah Bagi kadernya*. Hal 34.

¹⁹² Lihat Nurcholish Madjid, *Catatan Kecil Tentang HMI Sekitar 1966*, dalam Dies Natalis ke 43, PB HMI, dalam Agussalim Sitompul, 2003.

memberdayakan kader-kadernya, dapat dikatakan bahwa KNPI merupakan kemenangan seniornya di pemerintahan dalam rangka penataan potensi HMI ke dalam struktur politik Orde Baru¹⁹³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KNPI merupakan salah satu wadah rekrutmen politik HMI untuk masuk ke dalam sistem birokrasi dan lembaga-lembaga politik seperti DPR. KNPI yang dipandang sebagai simbol korporatisme negara Orde Baru itu juga sebagai media kaderisasi informal HMI dalam memasuki arena kekuasaan. Kumolo membuat catatan simpulan bahwa peran HMI di KNPI harus benar-benar mampu menuntaskan proses peredaman militansi kaum muda, khususnya di KNPI agar tidak nakal atau menyulitkan posisi pendahulunya yang telah membuktikan memiliki kemampuan ikut menentukan kebijakan negara di tingkat elite kekuasaan.¹⁹⁴

Segi efektifitas rekrutmen politik kekuasaan dari unsur HMI dapat di lihat dari banyaknya kader HMI di dalam sumbu kekuasaan. Majalah Ummat pernah mengkalkulasikan kurang lebih ada 200 mantan aktivis HMI tampil sebagai wakil rakyat (DPR), karena itu Ridwan Saidi dan Nurcholish Madjid adalah tokoh-tokoh HMI yang kritis saat itu. Bila Madjid menegaskan bahwa kalau kader HMI yang banyak itu tidak mampu mengemban tugas menegakkan keadilan dan demokrasi serta moral politik, maka mereka tidak ada gunanya. Sementara Saidi mengatakan berarti HMI sudah menjadi satpam kekuasaan. Bisa kita asumsikan juga bahwa hal ini menandai perubahan orientasi dari gerakan intelektual kepada gerakan struktural¹⁹⁵

¹⁹³ Lihat Tjahjo Kumolo, *Catatan Singkat Tentang Konsistensi Perjuangan HMI, sumbangan Tulisan dalam 50 tahun HMI... Op Cit.* hal 262-263.

¹⁹⁴ Ibid hal 264.

¹⁹⁵ Lihat Majalah Ummat edisi 04/08/97.

Sebagaimana dijelaskan pada bab awal bahwa Di antara mereka yang menempati posisi penting itu adalah Deliar Noer, Bintoro Tjokroamidjojo, Barli Halim, Madjid Ibrahim, Bustanul Arifin, Zainul Zamsi dan Umar Tusin. Bahkan ada yang menduduki pos menteri seperti Abdul Gafur, Akbar Tanjung, Mar'ie Muhammad, Mintaredjo dan lainnya. Meskipun dalam sejarahnya umat Islam pernah menggunakan partai politik Islam dan organisasi massa sebagai media politiknya tetapi HMI tidak pernah berafiliasi kepada partai politi apapun, sesuai dengan prinsip independensinya, HMI tidak berhubungan secara formal dengan suatu partai politik apapun.¹⁹⁶ Namun menurut Agussalim Sitompul bahwa salah satu kader HMI yang pertama kali diminta oleh pemerintahan Orde Lama di bawah Soekarno untuk masuk menjadi anggota kabinet adalah Sanusi, mantan pimpinan HMI generasi pertama.¹⁹⁷

Menurut sejarahwan HMI itu bahwa masuknya HMI ke dalam lembaga legislatif dan birokrasi merupakan wujud dari komitmen kebangsaan HMI yang tidak diragukan lagi dan hal itu jelas sejalan dengan visi perjuangan HMI. Strategi perebutan posisi yang menentukan dalam kekuasaan itu nampaknya dilakukan dengan memanfaatkan jaringan alumni HMI yang telah terbentuk sebelumnya. Pendekatan sesama kader merupakan salah satu model dominasi yang dapat dilakukan. Asal usul masuknya HMI di ranah kekuasaan disebabkan oleh faktor historik bahwa PKI pernah mendominasi dan mendapat posisi yang menentukan semasa Orde Lama, apalagi visi gerakan Tritura terdapat tuntutan restrukturisasi kabinet¹⁹⁸ dalam doktrin politik HMI memandang bahwa mendekati dan menduduki birokrasi atau lembaga politik penting merupakan bagian dari kemenangan atau sudah dianggap setengah kemenangan. Berkaitan dengan

¹⁹⁶ Masykur Hakim, *Pergolakan HMI*, Op Cit

¹⁹⁷ Wawancara Agussalim Sitompul, Op Cit.

¹⁹⁸ ibid

orientasi HMI dalam struktur birokrasi dan DPR, Ramlan Siregar menunjuk bahwa kode etik KAHMI yang memuat banyak aspek tentang peranan HMI –KAHMI dalam kehidupan negara memiliki kesamaan dengan kode etik negara.¹⁹⁹

5.4. Peranan HMI di Lembaga Legislatif

Sebagai orientasi yang memiliki orientasi pada pengisian jabatan-jabatan struktural di lembaga-lembaga negara khususnya di DPR, kita melihat banyaknya kader-kader HMI masuk sebagai anggota dan pimpinan lembaga legislatif yang berpengaruh itu. Banyaknya kader HMI yang kemudian menjadi anggota legislatif merupakan kristalisasi dari visi perjuangan HMI yang mengutamakan independensi, keterbukaan, pluralisme, berorientasi pada nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kerakyatan.

Apalagi visi perkaderan HMI yang terbangun dari relasi senior dan junior di HMI, sehingga dapat dikembangkan suatu bangunan koneksi dan jaringan (networking) saling mendukung dalam rekrutmen politik HMI. Wacana-wacana pemikiran yang berkembang di HMI baik masalah ideologi dan politik kenegaraan selama ini telah memberikan inspirasi bagi kader-kader HMI untuk mengutamakan peranan dalam dunia politik.

Bila pada masa penghujung Orde Baru, tahun 1997 lalu, kalangan HMI mendominasi lembaga wakil rakyat itu dengan porsi terbesar dari kalangan organisasi kemasyarakatan yaitu sekitar 200 an mantan HMI masuk dalam DPR. Semasa reformasi dapat kita lihat masih dominannya HMI di DPR. Hal ini perlu kita

¹⁹⁹ Ramlan Siregar, Op Cit.

kalkulasi jumlah mereka dan peranan mereka di DPR. Mulai dari Ketua DPR sejak 1999 itu yaitu Akbar Tanjung, Ketua MPR, Amien Rais, Taufiqurahman Saleh (Ketua Komisi VI dari FKB DPR), AM Fatwa (Wakil Ketua DPR). Dari unsur kepartaian di DPR nampaknya kader HMI yang menjadi pimpinan dan anggota DPR yang terbanyak adalah dari Partai Golkar. Seperti Yahya Zaini, Ade Kamarudin, Ibrahim Ambong, dan sebagainya.

Peranan mereka di lembaga legislatif dapat digolongkan sebagai anggota-anggota DPR yang kritis dan mengambil peranan yang lebih besar di banding yang lainnya. Beberapa menteri kabinet Gotong Royong saat ini seperti Ali Marwan Hanan, Bahtiar Khamisyah, Syamsul Muarif, yang sebelumnya pernah menjadi pimpinan fraksi-fraksi DPR adalah para mantan Ketua Badan Koordinasi HMI. Dengan demikian dapat dipandang bahwa partisipasi politik HMI di lembaga legislatif cukup efektif dalam membangun demokrasi di Indonesia. Mereka pernah di kader dalam sistem dan lembaga perkaderan HMI yang relatif sama secara nasional, sehingga visi perjuangan politik mereka dapat disinergikan, meskipun berasal dari beragam partai politik dan kepentingan dan pandangan yang berbeda pula dalam hal kekuasaan.

5.5. Dampak Orientasi Kekuasaan HMI Terhadap Perkembangan HMI Saat ini.

Saat ini telah banyak kalangan internal HMI maupun luar HMI yang menilai bahwa HMI tidak lagi memiliki peranan yang strategis dan signifikan dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan. Hal ini karena dipandang HMI telah mengalami degradasi visi intelektualitasnya. Mulanya menurut Didik J Rachbini akibat sistem

kekuasaan Orde Baru yang mengutamakan aspek ekonomi dan stabilitas, sehingga eksistensi HMI dalam sistem yang otoriter itu mengalami tekanan. HMI tidak mampu mengimbangi konsolidasi kekuatan Orde Baru dengan melakukan konsolidasi organisasi secara massif pula.²⁰⁰

Perubahan medan politik sebagai wahana eksperimen kader-kader HMI mengalami perubahan terutama pasca depolitisasi kampus dan pemberlakuan asas tunggal. Justru yang terjadi adalah proses pemiskinan kualitas kader, dan elite HMI tidak dapat berbuat banyak ketika HMI harus berhadapan dengan realitas yang cenderung melakukan proses pemiskinan.²⁰¹ Fachry Ali mengkritik HMI tidak lagi mampu merespons apa yang dibutuhkan anak muda terutama mahasiswa akibatnya HMI tidak lagi banyak diminati oleh kalangan dunia kampus. Problem yang dihadapi HMI saat ini bagi Fachry merupakan krisis yang fundamental sebab perkembangan kaum menengah perkotaan di mana struktur kekuasaan terlalu kuat sehingga HMI tidak lagi memiliki peluang bekerja secara sosial. HMI kemudian tidak lagi mampu menangkap dan mengembangkan kembali secara kreatif tradisi intelektual yang terwariskan dan karena itu dian menjadi mitos.

Kritik dari aspek perkaderan yang sudah tidak relevan diangkat oleh Nanang Taqdir yang mengatakan :

Ada tiga kekuatan kunci saling bertaut, telah menciptakan HMI begitu memukau, masing-masing Latihan Kader (LK), tradisi intelektual dan independensi. Ketiga kekuatan itu merupakan kesatuan tidak tercerai dan utuh, elemen-elemen pokok yang saling menunjang dalam membangun basis perkaderan yang tangguh. Lewat

²⁰⁰ Didiek J Rachbini, HMI dalam Dekade 1980 an, Lihat Agussalim Sitompul, *40 Indikator Kemunduran HMI*, Pustaka Harapan Masyarakat Indonesia, Yogyakarta, 2003, hal 7

²⁰¹ Ibid hal 8

bahasa HMI, ketiga unsur itu ditujukan demi meraih tujuan HMI. Setelah beberapa dekade, ada baiknya dukungan HMI di timbang-timbang lagi, sembari mengukur apresiasi maupun prestasi, mengingat banyak perubahan terjadi. Teristimewanya ketika kunci kekuatan itu sudah tidak ada lagi.²⁰²

Strategi ganda yang dikenal dengan berjuang dari dalam (*struggle from within*) dan berjuang dari luar kekuasaan (*struggle from without*) nampaknya sudah tidak relevan lagi. Ketika HMI memilih dekat dengan kekuasaan, di mana para mantan HMI duduk dalam struktur elite kekuasaan, maka upaya pertama yang dilakukan pemerintah melalui misalnya HMI adalah meredam kritisisme masyarakat (HMI) terhadap kekuasaan. Hal ini menurut Dawan Rahardjo sebagai penyebab independensi HMI terganggu. Dalam kenyataannya bahwa mainstream kekuasaan cukup dominan terhadap HMI. Hal ini dipandang terjadi perubahan dari pemikiran ideologis kepada orientasi politik, duduknya sekitar sembilan alumni HMI dalam kabinet pembangunan VI merupakan bukti orientasi itu yang membawa konsekuensi logis kurang kritisnya HMI.²⁰³

Konflik di antara KAHMI saat ini yang berujung pada lahirnya dua kepengurusan KAHMI versi presidium dan presidensil justru semakin memperlemah peranan HMI sendiri. Dan hal itu akan menghilangkan esensi HMI yaitu solidaritas, kebersamaan dan militansi.²⁰⁴

Berbagai kritik terhadap HMI tersebut perlu dipertimbangkan untuk melakukan reorientasi sistem dan pola perkaderan agar HMI dapat relevan kembali kepada bangsa

²⁰² Lihat Mochtar dan Nanang Taqdir, *Op Cit*.

²⁰³ Dollie Kurnia, *Meluruskan Jalan Ke Khitah HMI*, Belukar, 2002. hal 25-27

²⁰⁴ Sudarmadi, *Op Cit*

dan negara. Reorientasi visi yang perlu dikembangkan adalah model gerakan sosial baru yang sesuai dengan tuntutan perubahan HMI ke depan.



BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan kajian yang dilakukan tentang perkaderan HMI dalam mengisi struktur kekuasaan di Indonesia, maka dapat penulis memberikan sejumlah wacana, pemikiran, peranan dan berbagai dinamika HMI dalam kehidupan keumatan, kemahasiswaan dan kebangsaan. Sejak awal HMI sudah langsung bersentuhan dengan masalah-masalah politik negara dan hal itu sesuai dengan cita-cita kelahirannya HMI yang berorientasi kebangsaan. Meskipun sistem perkaderan HMI dan pandangan ideologisnya baru dirumuskan secara modern pada dua dekade kemudian, tetapi sejak awal HMI telah mempunyai cita-cita sebagai lembaga perkaderan politik yang berusaha melahirkan calon-calon pemimpin bangsa dan negara yang mempunyai etika dan moral yang kuat.

Harus diakui bahwa kondisi masyarakat dan bangsa pasca kemerdekaan yang masih diwarnai polarisasi dan konflik disemua tingkatan, mulai dari elemen-elemen pemuda dan mahasiswa hingga pada elite kekuasaan saat itu telah memungkinkan tumbuhnya militansi, idealisme dan rasa kebangsaan yang tinggi. HMI beruntung telah diletakkan para pendirinya sebagai suatu organisasi yang independen. Dengan menjadikan independensi sebagai strategi perjuangan, maka HMI berusaha melihat secara obyektif semua gejala dan orientasi politik berbagai aliran politik yang tumbuh terutama nasionalisme, komunisme dan agama. Sebagai organisasi yang mengacu kepada nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan, maka HMI dengan tegas melawan kelompok komunisme radikal yaitu PKI. Demikian juga sebaliknya, PKI menunjuk

bahwa lawan politiknya yang membahayakan dimasa depan adalah HMI. sejarah membuktikan, seperti yang ditulis Hasanuddin (1996) HMI adalah satu-satunya organisasi yang mampu menandingi PKI dalam usaha melawan usaha-usaha mendudukkan ideologi komunisme dalam kehidupan politik Indonesia.

Dalam perkembangannya, HMI membangun wacana-wacana, pemikiran-pemikiran serta pandangan ideologis yang lebih berorientasi kekuasaan. Gerakan pemikiran HMI dikonstruksikan dari visi keIslaman modern kearah pemikiran dan praktek politik modern pula. Berkaitan dengan pemikiran politik misalnya terlihat dari pemberian kebebasan bagi kader-kader HMI untuk memilih partai-partai Islam sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Tidak memobilisasi para anggotanya kepada partai Masyumi yang merupakan partai bersama umat Islam. dalam konteks independensi HMI, maka diterapkan prinsip-prinsip keterbukaan, bebas, rasional, obyektif, kritis, berorientasi kebenaran dan keadilan dan lain sebagainya.

Nilai Dasar Perjuangan (NDP) sebagai sumber nilai dan pegangan ideologis HMI sengaja dirumuskan dengan mendialogkan pandangan dunia barat (western world view) dengan pandangan dunia Islam (Islamic world view). Sehingga visi awal perjuangan HMI dalam membebaskan umat Islam dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan ternyata dapat membebaskan pendekatan keIslaman konservatif yang selama penjajahan bangsa-bangsa kolonial Belanda dibiarkan tumbuh. Hasilnya adalah bahwa HMI merupakan pelopor neomodernisme Islam di Indonesia.

Pilihan gerakan pembaharuan pemikiran Islam yang dimotori HMI, nampaknya berkembang kearah pemikiran-pemikiran politik. Model pemikiran politik HMI merupakan dialektika antara pemikiran demokrasi umumnya dengan perkembangan

pemikiran keindonesiaan terutama berbasis keislaman. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Barton bahwa kategori pemikiran HMI adalah kompromi politik, hal ini dapat ditelusuri dari penerimaan HMI terhadap konsep Nasakom yang diterapkan Soekarno dan dukungan HMI dalam melahirkan Orde Baru. Sikap-sikap politik akomodasionis dilatarbelakangi oleh banyaknya tantangan dan masalah yang melingkupi HMI sejak awal dan dalam perkembangannya terutama menyangkut masalah umat Islam, kondisi kebangsaan dan dinamika kepemudaan.

Secara moral politik bahwa pemikiran dan praktek politik HMI semasa Orde Baru yang lebih banyak memberikan justifikasi terhadap tindakan-tindakan politik Orde Baru yang represif dan berorientasi pembangunan ekonomi dan menekankan pentingnya keamanan. Hal itu nampak sekali pada periode Akbar Tanjung (awal tahun 1970 an) yang lebih berorientasi pada partisipasi politik dan perkembangannya kemudian juga memperlihatkan semakin kuatnya pengaruh dan peran HMI dalam Orde Baru dengan menjadi menteri, politisi di DPR dan sebagainya.

Pada periode yang menjadi obyek studi penulis yaitu dekade akhir tahun 1960 an hingga 1970 an memperlihatkan adanya perkembangan perkaderan politik yang sangat terbuka, terarah, terencana dan dengan dinamika pemikiran yang tinggi. Proses perkaderan para periode puncak lahirnya kader-kader HMI yang berkualitas itu telah melahirkan sangat banyak alumni HMI yang kemudian memiliki peranan yang strategis dalam kehidupan politik dan pemerintahan Orde Baru bahkan sampai saat ini. Sebagai konsekuensi dari organisasi perkaderan, maka di antara mereka yang tersebar baik di lembaga legislatif (DPR) maupun pemerintah serta lembaga-lembaga negara lainnya itu melakukan sinergi dalam membangun kebersamaan dan jaringan kekuasaan. Model

perkaderan yang sama diterapkan secara nasional memungkinkan terbangunnya budaya, pemikiran dan cara pendekatan yang hampir sama dalam mengarahkan pada tujuan HMI, membangun bangsa dan negara secara adil dan bermartabat.

Berkaitan dengan pengisian kekuasaan HMI nampak bahwa sangat banyak kalangan HMI yang berperan dan berpartisipasi dalam kehidupan kenegaraan khususnya di lembaga legislatif dan birokrasi. *Pertama*, peranan HMI di DPR tergolong yang dapat mengartikulasikan peranan mereka secara maksimal, karena eksistensi HMI yang ada di hampir semua fraksi di DPR. Mereka menjadi pimpinan dan anggota yang kritis terhadap negara. Peranan seperti itu merupakan wujud dari masih terjaganya komitmen independensi etis HMI. Pada vasa akhir Orde Baru, HMI juga nampak sangat dominan di DPR karena lebih dari 200 anggota dan pimpinan DPR saat itu adalah dari kalangan HMI. *Kedua*, birokrasi adalah salah satu tempat penting bagi pengisian struktur kekuasaan bagi HMI. Hal ini dilatarbelakangi oleh dukungan dan jasa politik HMI terhadap proses berdirinya Orde Baru, sehingga HMI diperhitungkan sebagai salah satu sumber rekrutmen dalam birokrasi. Dalam periode lima tahunan kabinet HMI selalu mendapatkan bagian untuk menjadi menteri dan bagian ini dalam jumlah yang cukup banyak antara 5 sampai 8 anggota kabinet.

Berdasarkan studi itu, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut :

1. HMI adalah suatu organisasi yang berbasis kemahasiswaan yang sejak awal memiliki peranan dalam rangka mempertahankan integritas negara dan meningkatkan derajat umat Islam. Hal ini terlihat dalam beberapa momentum penting HMI terlibat dalam politik kebangsaan yaitu mempertahankan kedaulatan

- negara baik dari ancaman negara lain maupun dalam (PKI). Hal itu membawa konsekuensi HMI berorientasi pada perkaderan politik.
2. Perkembangan pemikiran dari pemikiran keislaman kepada pemikiran politik telah mampu merumuskan peranan yang tepat dan strategis dalam mengisi berbagai jabatan dalam lembaga-lembaga negara terutama di DPR dan pemerintahan. Visi perjuangan HMI yang berorientasi modernisasi, pembangunan, penguatan masyarakat sipil, pemerintahan yang modern dan sebagainya, juga sesuai dengan perkembangan pemikiran kebangsaan Indonesia. Apalagi akomodasi politik HMI telah membuka peluang bagi peranan HMI dalam kehidupan kebangsaan.
 3. HMI dikenal sebagai organisasi yang berorientasi kekuasaan. Orientasi ini telah meningkatkan partisipasi politik HMI dalam dunia birokrasi dan DPR di Indonesia. Namun orientasi kekuasaan itu telah menyebabkan HMI dewasa ini mengalami degradasi baik sistem perkaderan maupun wacana dan tradisi pemikiran-pemikirannya. HMI kurang lagi memiliki pengaruh yang kuat dalam wacana kebangsaan, keumatan dan terutama dalam dinamika kemahasiswaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia (Kumpulan Karangan)*, YIIS dan Gramedia, Jakarta, 1983
- Abdul Mu'iz Utsman, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin (Studi Proses Pendidikan Politik Ikhwan untuk anggota dan masyarakat Mesir dari tahun 1928 hingga 1954)*, Intermedia, Jakarta, 2000.
- Ali, Fachry, *HMI dan KAHMI, Meyongsong Perubahan, Menghadapi Pergantian Zaman*, KAHMI, Jakarta, 1997
- Azra, Azyumardi, *Mengabdikan Republik, Memberdayakan Umat: Apresiasi Atas Pemikiran Keislaman dan Kiprah Keindonesiaan HMI*. Pengantar buku Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, menyatu dengan Bangsa*, Logos, Ciputat, 2002
- Al Mandari, Syafiruddin, *HMI dan Wacana Revolusi Sosial*, Hijau Hitam, PSPI, Makasar, 2003
- Anwar, M. Syafii, *Pemikiran dan Aksi Indonesia, Kajian politik Cendekiawan Muslim Orde Baru* Paramadina, Jakarta, 1995
- Azhar Azis, Harry, *Membangun Kembali Keadilan dan Kesejahteraan*, makalah Orasi Ilmiah Pelantikan PB HMI Periode 2003-2005, 12 November 2003 di Jakarta.
- Ali, Fachry, *HMI dan KAHMI Menyongsong Perubahan dan Pergantian Zaman* KAHMI, Jakarta, 1997
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia (Pemikiran Neo Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad wahid dan Abdurrahman Wahid)*, Paramadina, Pustaka Antara, Jakarta, 1999
- Effendy, Bahtiar, *Islam and The State: The Contribution of Islamic Parties to The Declined Of Democracy in the 1950*, makalah, tidak diterbitkan.
- _____, *Islam dan Negara (Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia)*, Paramadina, Jakarta, 1998.
- _____, *Teologi Baru Politik Islam (Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi)*, Galang Press, Yogyakarta, 2001.
- El Qudsi, M. Ichlas, *Komunikasi Pengambilan Keputusan Organisasi Mahasiswa Ekstra Universitas dalam Persoalan Kebangsaan, studi kasus sikap PB HMI*

- terhadap pergantian jabatan presiden dari Suharto ke Habibie, Tesis, UI, 2002.
- Greenstein, Fred, *Political Socialization, International Encyclopedia of social science*, vol 14.
- Huntington, Samuel P & Nelson, Joan, *Partisipasi Politik (Di Negara Berkembang)*, Rineka Cipta, 1994.
- Hisyam, Muhamad, *Merancang Penelitian Sejarah Politik*, makalah disampaikan dalam Pelatihan Tenaga Teknis Kesejarahan Tingkat Lanjutan, Direktorat Sejarah, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata di Ciawi, 1-10 Juli 2003.
- Hasil-Hasil Kongres X HMI, Palembang, 3-10 Oktober 1971.*
- Hasil-Hasil Kongres XI HMI, Bogor, 23-30 Mei 1974*
- Hasil-Hasil Kongres HMI XII, Semarang, 10-17 Oktober 1976*
- Hasil-Hasil Kongres HMI XIII, Ujung Pandang, 9-11 Februari 1979*
- Hasil-Hasil Kongres HMI XIV, Bandung, 23 April sampai 1 Mei 1981*
- Hakim, Maskyur, *The Response of Muslim Youth Organizations to social-political Change: A Case of HMI Role in Indonesia* Jamia Millia Islamia, India, 1998
- Ikrar, Taruna, *HMI Di Ambang Krisis (Menguji Vitalitas HMI Memasuki Abad 21)*, Subeka Agung, Jakarta, 1999.
- Kartono, Kartini, *Pendidikan Politik*, Mandar Maju, Bandung, 1989
- Kurnia, Ahmad Doli, *Meluruskan Jalan Ke Khitah HMI*, Belukar, Yogyakarta, 2002
- Komaruddin, Ade dan M. Fauzie, (ed) *HMI Menjawab Tantangan Zaman*, KAHMI, Jakarta 1990.
- Komaluddin, Ade, dkk, (ed) *Menuju Masyarakat Cita: Refleksi Persoalan Kebangsaan*, Badko HMI Malirja, Student Press, Jakarta, 1999.
- Lincoln, Yvonna S and Gube E. Egon, *Naturalistic Inquiry*, SAGE Publication, London, 1985
- Maarif, A Syafii, *Islam dan Politik di Indonesia (Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965))*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 1988
- Metareum, Ismail Hasan, *Penegakkan Jiwa Kemandirian dan Kepeloporan HMI, dalam 50 tahun HMI Mengahdi Republik*, Ramli HM. Yusuf, editor, LASPI, Jakarta, 1997
- Madjid, Nurcholish, *Mempertegas Visi Perjuangan HMI, dalam HMI dan KAHMI, Menyongsong Perubahan dan Pergantian Zaman*, Majelis Nasional KAHMI, Jakarta, 1997

-, *HMI Sebaiknya Dibubarkan*, Media Indonesia, 14 Juni 2002
- Muhammad Kamal Hasan, *Modernisasi Indonesia: respon Cendekiawan Muslim*,
Lingkaran Studi Indonesia, Ciputat, 1987
- M. Salch, Hasanuddin, *HMI dan Rekayasa Azas Tunggal Pancasila*, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 1996
- Mawardi, Sidi, *Rekonstruksi Konseptual Gerakan HMI, Arah Transformasi Sosial
Politik Untuk Membangun Bangsa*, Creative Minority, Yogyakarta, 2003.
- Mauladi, Viva Yoga, *HMI Kian Redup*, Kompas, 5 Pebruari 2002.
- PB HMI, *Hasil-Hasil Lokakarya Perkaderan Nasional*, Jakarta, 4-8 November 2000.
- Rome, Eric, *Modern Politics, an Introduction to Behavior and institutions*, NY.
- Rahardjo, Mudjia, *Bahasa dan Kekuasaan : Studi Wacana Politik Abdurrahman Wahid
Dalam Perspektif Hermeneutika Gadamerian*, Proposal Disertasi, Unair, 2003
- Ridwan, M. Deden dkk, *Memangun Konsensus, Pemikiran dan Praktek Politik Akbar
Tanjung*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
- Ranuwihardjo, A Dahlan, *Bung Karno dan HMI, Dalam Pergulatan Sejarah, Mengapa
Bung Karno Tidak Membubarkan HMI?*, Intrans, 2002. (Viva Yoga, editor).
- Soe'dan, *International Centre for Advance Study and Training World Assembly of
Youth*, PB HMI, 1959
- Sitompul, Agussalim, *Sejarah Perjuangan HMI (1947-1975)*, Penerbit Bina Ilmu,
Surabaya, 1976
-, *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam Tahun 1947-1993*,
Intermasa, 1995
-, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran
keIslaman-Keindonesiaan HMI (1947-1997)*, Logos wacana Ilmu, Ciputat,
2002
-, *Pemikiran HMI dan Relevansinya Dengan Sejarah Perjuangan
Bangsa Indonesia*, AdityaMedia, Yogyakarta, 1997
-, *40 Indikator Kemunduran HMI (Suatu Kritik dan Koreksi
Untuk Kebangkitan Kembali HMI)*, Pustaka Harapan Masyarakat Indonesia,
Yogyakarta, 2003.

- Syaifulah SA, *Konsep Nasionalisme HMI Sebagaimana Tercermin Dalam Pidato Dies Natalis Dan Penerimaannya Dalam Gerakan Angkatan 66*, Disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1994
- Sekarsahta, *Ketika HMI Menjadi Beban Bangsa*, Media Indonesia, 19 Juni 2002.
- *HMI Sebagai Kader Politik (Kaderisasi dan Partisipasi Politik HMI)*, Reading Course, PPS UNAS, 2003.
- *Sejarah Politik HMI*, Makalah, basic Training (I.K 1) HMI UNAS, 8-11 Oktober 2003. di Pusat Bogor.
- *Konflik HMI dengan Kekuasaan Orde Baru*, Makalah, 2003
- *Membeikah Gerakan Kooperatisme HMI*, makalah yang ditulis menjelang Kongres ke 21 di Yogyakarta, 1997
- Saidi, Ridwan, *Pemuda Islam dan Dinamika Politik Bangsa*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Soedarma, *Birokrasi Pelayanan Masyarakat Kota (Studi Pembentukan Tertib Interaksi Birokrasi Garis-Depan Dengan Warga Kota)*, (Disertasi, PPS Unair, Surabaya, 1999.
- Tamara, Nasir, *Sejarah Politik Islam Orde Baru*, Prisma 5, 1988
- Tanjung, Akbar, (Pengantar), *Mahasiswa dan Wacana Kenegaraan (Kumpulan Rekomendasi Kongres HMI 1971-9999)*, FOSAL PB HMI, 2002.
- Tanjung, Akbar, *HMI Agar Jadi Organisasi Kader Politik Yang Mandiri*, Jakarta, Kompas, 17 Januari 2000.
- Tanja, Victor, *HMI, Sejarah dan Kedudukannya Di Tengah-Tengah Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1982
- Tahqiq, Nanang, *Bye Bye HMI, dalam HMI. Beban Sejarah Bagi Kaderinya?*, M. Wahyuni Nafis dan Rizki Mochtar (ed), Fosol PB HMI, 2002
- Urbaningrum, Anas, *Menuju Masyarakat Madani, Pilar dan Agenda Reformasi*, Jakarta, Yarsi Watampone, 1999
-, *Islama-Demokrasi, Pemikiran Nurcholish Madjid*, Republika Press Jakarta, 2004.
- Wuisman, J.J.M. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, PPS dengan PHS-Univ. Leiden dan Unibraw, 1991
- Wahib, Ahmad, *Pergolakan Pemikiran Islam, Catatan Harian Ahmad Wahib*, Edisi Cetak Ulang Kerjasama LP3S dan Freedom Institut, Jakarta, 2001.

Jurnal dan Media Massa

Prisma, *Sejarah Politik Islam*, LP3ES, 1988

Madani Vol 2 No 4, tahun 1999

Majalah Umat edisi 04/08/97, *200 Kader HMI di DPR*.

Media Indonesia, 19 Juni 2001

Kompas, 17 Januari 2000.

Wawancara

Wawancara dengan Fuad Bawazier, Ketua Umum Korps Alumni HMI (KAHMI), di Jakarta, Juli 2004.

Wawancara dengan Agussalim Sitompul, di Singaraja Bali, 06 September 2004.

Diskusi dengan Akbar Tanjung (Ketua DPR RI) di kantor DPR RI, tanggal 26 Agustus 2004.

Wawancara dengan Lalu Sudarmadi, (Sekretaris Utama BKKBN), 05 Januari 2004.

Diskusi dengan Harun Al Rasyid Songge, intelektual muda HMI, mantan Ketua Umum HMI Cab. Yogyakarta, tanggal 17 September 2004